



Katalog BPS: 4601003

STATISTIK POLITIK 2012



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK POLITIK 2012

<http://www.bps.go.id>

STATISTIK POLITIK 2012

ISSN : 2303-2448
Nomor Publikasi : 04330.1202
Katalog BPS : 4601003
Ukuran Buku : 16 x 24 Cm
Jumlah Halaman : xv + 152

Naskah:
Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Gambar Kulit:
Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

<http://www.bps.go.id>

Ringkasan Eksekutif

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik. Statistik Politik 2012.

Demokratisasi Indonesia ditandai dengan berbagai perubahan sistem dan budaya politik. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral pada Presiden, yang dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara di luar Presiden dan kabinet. Pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah yang membuat berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat dikelola secara otonom oleh Pemerintah Daerah. Sejak munculnya Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 1999, telah muncul tujuh Provinsi, 131 Kabupaten, serta 25 Kotamadya baru di seluruh Indonesia.

Demokratisasi bukan hanya fokus pada instrumen dan lembaga-lembaga pemerintahan, namun juga pada orientasi dan partisipasi politik masyarakat. Organisasi-organisasi masyarakat banyak muncul sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam. Pada 2009 Kementerian Dalam Negeri mengesahkan 388 Organisasi masyarakat baru, pada 2010 berjumlah 363 organisasi. Dan pada tahun 2011 sebanyak 426 organisasi. Indonesia merupakan negara paling majemuk di dunia yang memiliki kepentingan beragam dan tidak semuanya mampu ditangkap oleh pemerintah. Bukan hanya jumlah suku, dan bahasa, Indonesia juga dihuni oleh masyarakat dengan beragam agama dan kepercayaan.

Kata Pengantar

Alokasi sumber daya negara baik dalam hal besaran maupun caranya tercermin pada pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan negara, pemberian kebebasan menyampaikan aspirasi dan dalam kinerja lembaga-lembaga pemerintahan. Pemerintahan yang dapat menjamin hak-hak politik rakyat, memberikan kebebasan sipil dan memiliki lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya adalah pemerintahan yang memiliki ketahanan terhadap guncangan politik baik dari dalam maupun dari luar.

Publikasi Statistik Politik 2012 menyajikan data tentang keadaan politik di Indonesia, khususnya tentang Pemerintahan, Lembaga-lembaga Politik, dan Kegiatan Politik di Indonesia serta keragaman suku bangsa dan agama. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi evaluasi situasi politik nasional dan bahan masukan untuk perencanaan pembangunan politik di masa mendatang. Publikasi ini diharapkan bermanfaat bagi publik secara luas untuk memahami situasi politik di Indonesia dengan lebih baik sehingga dapat menggunakan hak-hak politiknya dengan benar.

Data dalam publikasi ini bersumber dari sensus dan hasil kompilasi. Data hasil sensus bersumber dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 dan hasil Pendataan Potensi Desa 2011. Data kompilasi dikumpulkan dari berbagai instansi yang terkait di tingkat pusat maupun daerah. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu berbagai masukan dan kritik sangat kami hargai guna perbaikan publikasi ini di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2012

Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Suryamin, M.Sc.

Daftar Isi

	Halaman
Ringkasan Eksekutif	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xv
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab 2 Metodologi	5
2.1. Sumber Data	7
2.2. Metode Pengumpulan Data.....	7
2.3. Konsep dan Definisi.....	8
Bab 3 Pemerintahan	13
3.1. Sistem Pemerintahan	15
3.2. Pemerintah Pusat.....	15
3.2.1 Wilayah	18
3.2.2. Pertahanan dan Hubungan Internasional	18
3.3. Pemerintah Daerah	24
3.4. Aparatur Negara.....	38
3.5. Tata Kelola Pemerintahan	45
Bab 4 Lembaga Demokrasi	55
4.1. Lembaga Demokrasi	57
4.2. Partai Politik	58
4.3. DPR, dan DPD	69
4.3.1. DPR	69
4.3.2. DPD.....	80
4.4. Kekuasaan Kehakiman	83

4.5. Organisasi Masyarakat	89
4.6. Media Massa.....	94
Bab 5 Pemilihan Umum.....	105
5.1. Pemilihan Umum.....	107
5.2. Pemilihan Umum Legislatif 2009	108
5.2.1 Hak Pilih	108
5.2.2. Sistem dan Peserta Pemilu	111
5.2.3. Hasil Pemilu Legislatif 2009	115
5.3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.....	119
5.4. Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.....	123
5.5. Pemilihan Kepala Daerah	127
5.6. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	131
Bab 6 Demokrasi dan Keragaman Indonesia	133
6.1. Demokrasi.....	135
6.2. Keragaman Indonesia	143
Daftar Pustaka	149

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 3.1	Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Menurut Masa Pemerintahan	17
Tabel 3.2	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk	19
Tabel 3.3	Negara dengan Peringkat Kekuatan Militer 2011	20
Tabel 3.4	Daftar Nama dan Asal Negara Sekjen ASEAN 1978-2011	20
Tabel 3.5	Daftar Negara menurut Jumlah Perjanjian Bilateral	21
Tabel 3.6	Kedutaan dan Konsulat Asing di Indonesia	22
Tabel 3.7	Jumlah Perwakilan Indonesia di Luar Negeri	22
Tabel 3.8	Pejabat Perbantuan pada Perwakilan RI di Luar Negeri	23
Tabel 3.9	Kunjungan dan Tamu Diplomatik Indonesia 2011	23
Tabel 3.10	Jumlah Kabupaten dan Kota Menurut Provinsi Tahun 1999-2012	26
Tabel 3.11	Agregat Keuangan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2011 ..	28
Tabel 3.12	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Tahun 2011	29
Tabel 3.13	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2008-2011	30
Tabel 3.14	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2008-2011	31
Tabel 3.15	Jumlah Perda yang Dibatalkan Berdasarkan Provinsi Tahun 2002-2009	32
Tabel 3.16	Jumlah Perda yang Dibatalkan Berdasarkan Tema Tahun 2002-2009 ...	33
Tabel 3.17	Jumlah Perda yang Dibatalkan Berdasarkan Umur Berlaku Tahun 2002-2009	34
Tabel 3.18	Jumlah Perda yang Diminta Klarifikasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2010-2011.....	35
Tabel 3.19	Jumlah Perda yang Diminta Klarifikasi Berdasarkan Tema Tahun 2010-2011	36
Tabel 3.20	Jumlah Perda yang Diminta Klarifikasi Berdasarkan Umur Berlaku Tahun 2010-2011	37

Tabel 3.21	Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2011	39
Tabel 3.22	Jumlah PNS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011	39
Tabel 3.23	Jumlah PNS Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011.....	39
Tabel 3.24	Jumlah Personel POLRI menurut Kepangkatan Tahun 2010.....	40
Tabel 3.25	Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin	41
Tabel 3.26	Jumlah Desa Menurut Kelompok Umur Kepala Desa	42
Tabel 3.27	Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Laki-laki Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	43
Tabel 3.28	Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Perempuan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	44
Tabel 3.29	Jumlah Pengaduan Masyarakat tentang Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Provinsi Tahun 2004-2011	47
Tabel 3.30	Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima KPK Tahun 2011	48
Tabel 3.31	Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima KPK Berdasarkan Lembaga Tahun 2011	49
Tabel 3.32	Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004-2011	49
Tabel 3.33	Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2004-2011	50
Tabel 3.34	Jumlah Vonis Kasus Korupsi yang Diputus MA pada Tingkat Kasasi Menurut Masa Hukuman Tahun 2010-2011	50
Tabel 3.35	Rekapitulasi Data Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Seluruh Indonesia Tahun 2011	51
Tabel 3.36	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional Tahun 1996-2010	52
Tabel 3.37	Ranking Indeks Pembangunan Manusia Provinsi 1996-2010	53
Tabel 4.1	Pembubaran Partai Politik di Indonesia.....	61
Tabel 4.2	Jumlah Partai Politik yang Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan Status Partai dan Tahun Pelaksanaan Pemilu Tahun 1999-2009.....	61
Tabel 4.3	Banyaknya Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Asas Partai	62

Tabel 4.4	Persentase Perolehan Suara Nasional Partai Politik pada Pemilu Tahun 2009	63
Tabel 4.5	Anggota DPR Terpilih pada Setiap Fraksi Periode 2009-2014 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
Tabel 4.6	Jumlah Anggota DPR Perempuan pada Setiap Pemilu	72
Tabel 4.7	Jumlah Anggota Komisi DPR-RI Periode 2009-2014 Menurut Bidang Kerja	73
Tabel 4.8	Jumlah Anggota Alat Kelengkapan DPR-RI Periode 2009-2014	73
Tabel 4.9	Banyaknya Anggota DPR-RI Periode 2009-2014 Menurut Provinsi dan Pendidikan	74
Tabel 4.10	Jumlah UU, Perpu, Penpres/Perpres 1945-2012	75
Tabel 4.11	Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang Undang.....	77
Tabel 4.12	Penggunaan Hak Angket DPR 1999-2011	78
Tabel 4.13	Penggunaan Hak Interpelasi DPR 1999-2011	79
Tabel 4.14	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009-2014 menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	81
Tabel 4.15	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009-2014 menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	81
Tabel 4.16	Jumlah Anggota DPD Periode 2009-2014 menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin	82
Tabel 4.17	Jumlah Perkara yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2010-2011 ...	84
Tabel 4.18	Rincian Keadaan Perkara Masing-masing Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2010-2011	84
Tabel 4.19	Klasifikasi Peraturan dan Jumlah Permohonan Uji Materiil ke MA Tahun 2010	85
Tabel 4.20	Produktifitas MA dalam Memutus Perkara 2010-2011.....	85
Tabel 4.21	Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus yang Ditangani MA Tahun 2010-2011	86
Tabel 4.22	Jumlah Tindak Pidana Khusus yang Diputus di Tingkat Kasasi menurut Jenis/Lamanya Hukuman Tahun 2010-2011	87
Tabel 4.23	Rekapitulasi Perkara Masuk Mahkamah Konstitusi	87
Tabel 4.24	Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga	88
Tabel 4.25	Rekapitulasi Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah	88

Tabel 4.26	Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Kegiatan Lembaga Non Profit Tahun 2011	91
Tabel 4.27	Organisasi Masyarakat – Nahdatul Ulama	92
Tabel 4.28	Organisasi Masyarakat – Muhammadiyah	92
Tabel 4.29	Jumlah Organisasi Internasional Non-Pemerintah di Indonesia Berdasarkan Tahun Terdaftar dan Bidang Kerja	93
Tabel 4.30	Jumlah Organisasi Internasional Non-Pemerintah di Indonesia Berdasarkan Tahun Terdaftar dan Benua Asal	93
Tabel 4.31	Jumlah Organisasi Internasional Non-Pemerintah di Indonesia Berdasarkan Tahun Terdaftar dan Kantor Pusat	93
Tabel 4.32	Perkembangan Jumlah Surat Kabar 2006 - 2010	95
Tabel 4.33	Kelompok Surat Kabar	96
Tabel 4.34	Tiras Media Cetak Tahun 2006 - 2010	96
Tabel 4.35	Rekapitulasi Media Cetak Berdasarkan Provinsi Tahun 2010	97
Tabel 4.36	Rekapitulasi Media Elektronik Berdasarkan Provinsi Tahun 2010	98
Tabel 4.37	Pengaduan pada Dewan Pers Tahun 2010	99
Tabel 4.38	Kebebasan Pers Asia-Pasifik Tahun 1994-2003	100
Tabel 4.39	Kebebasan Pers Asia-Pasifik Tahun 2004-2012	101
Tabel 4.40	Banyaknya Desa Menurut Ketersediaan Program TV yang Dapat Diterima	102
Tabel 4.41	Banyaknya Desa Menurut Ketersediaan Sinyal Telepon Genggam	103
Tabel 5.1	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2009	110
Tabel 5.2	Jumlah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Daerah Pemilihan Provinsi dan Jenis Kelamin	112
Tabel 5.3	Jumlah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin	113
Tabel 5.4	Nomor Urut Terpilih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 ..	114
Tabel 5.5	Nomor Urut Caleg Terpilih Perempuan dan Laki-laki	114
Tabel 5.6	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada Pemilu Legislatif DPR RI Tahun 2009 Menurut Provinsi	116

Tabel 5.7	Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif DPR RI Tahun 2009	117
Tabel 5.8	Jumlah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Menurut Provinsi Perwakilan dan Jenis Kelamin	118
Tabel 5.9	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009	120
Tabel 5.10	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Menurut Provinsi	121
Tabel 5.11	Persentase Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2009 Menurut Provinsi	122
Tabel 5.12	Jumlah Daerah Pemilihan dan Jumlah Caleg DPRD pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Tahun 2009	124
Tabel 5.13	Jumlah Daerah Pemilihan dan Jumlah Caleg DPRD pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009	125
Tabel 5.14	Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	127
Tabel 5.15	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi	128
Tabel 5.16	Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Terpilih	129
Tabel 5.17	Kepala Daerah Hasil Pilkada Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Sebelumnya	130
Tabel 5.18	Sengketa Pemilu di MK	132
Tabel 5.19	Rekapitulasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	132
Tabel 6.1	Status Demokrasi Negara-Negara Dunia Tahun 1972-2011	136
Tabel 6.2	Tren Perkembangan Kebebasan Global	137
Tabel 6.3	Indeks Demokrasi Dunia berdasarkan Rezim	137
Tabel 6.4	Peringkat Demokrasi Indonesia Tahun 2007 – 2011 Versi <i>The Economist</i>	137
Tabel 6.5	Skor IDI menurut Provinsi Tahun 2009-2010	138
Tabel 6.6	Indeks Demokrasi Indonesia 2009	139
Tabel 6.7	Indeks Demokrasi Indonesia 2010	140
Tabel 6.8	Skor Tertinggi Tiap Aspek menurut Provinsi Tahun 2009.....	141
Tabel 6.9	Skor Tertinggi Tiap Aspek menurut Provinsi Tahun 2010.....	142

Tabel 6.10	Jumlah Penduduk menurut Suku Bangsa	144
Tabel 6.11	Jumlah Penduduk Menurut Suku dan Jenis Kelamin	145
Tabel 6.12	Banyaknya Desa Menurut Keragaman Agama dan Suku	146
Tabel 6.13	Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut	147
Tabel 6.14	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut	148

<http://www.bps.go.id>

Daftar Grafik

	Halaman
Grafik 3.1	Komposisi Menteri Berdasarkan Jenis Kelamin 1999 - 2011 17
Grafik 3.2	Pemekaran Daerah di Indonesia 1999 – 2012 25
Grafik 4.1	Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu 1955 – 2009 60
Grafik 4.2	Komposisi Anggota DPR Berdasarkan Status Keanggotaan 71
Grafik 4.3	Latar Belakang Pekerjaan Anggota DPR-RI 2009-2014 71
Grafik 4.4	Latar Belakang Profesi Anggota DPD 2009 – 2014 81
Grafik 4.5	Jumlah Pengesahan Organisasi Masyarakat 2009 - 2011 90
Grafik 4.6	Status Kebebasan Pers Indonesia Tahun 1994-2012 99
Grafik 5.1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif Tahun 1955-2009 109
Grafik 5.2	Jumlah Dapil dan Alokasi Kursi pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009 111

PENDAHULUAN

1

<http://www.pps.go.id>

1.1. Latar Belakang

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam *real* politik Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral pada Presiden. Pemencaran dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga empat kali. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara di luar Presiden dan kabinet yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja Pemerintah. Di samping itu, pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat yang kemudian dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Berbagai perubahan tersebut membuat sistem politik Indonesia mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Beragam segregasi kepentingan dalam masyarakat diberi ruang untuk diartikulasikan melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Pendirian partai politik baru diberi ruang sehingga membuat jumlah partai politik yang sejak lima periode sebelumnya konstan berjumlah tiga, melonjak menjadi 48 partai politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 1999, dan terus berubah pada Pemilu-pemilu selanjutnya. Banyaknya jumlah partai politik yang ada di parlemen dianggap cukup menyita energi pemerintah untuk permasalahan politik sehingga berdampak pada kinerja. Implikasinya, pada Pemilu 2009 terdapat gagasan untuk membatasi jumlah Partai Politik di DPR RI dengan memberlakukan *parliamentary threshold* (PT). Ketentuan PT pada Pemilu Tahun 2009 sebesar 2,5% dan bertambah menjadi 3,5% pada Pemilu 2014.

Aspek penting lain adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi sangat leluasa melakukan kritik atas kebijakan-kebijakan Pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi *civil society*. Organisasi-organisasi masyarakat bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam. Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan. Salah satu gejala yang juga marak muncul adalah adanya tuntutan peningkatan representasi perempuan dalam politik. Perempuan telah berpuluh tahun mengalami domestifikasi peran, sehingga perlu dilakukan upaya afirmasi untuk percepatan kesetaraan dalam jabatan-jabatan publik. Pada Pemilu tahun 2009 dan 2014, ketentuan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) dan sistem *zipper* (minimal terdapat satu orang perempuan dalam tiga calon) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Demokrasi telah membuat politik di Indonesia semakin dinamis. Subjek perhatian politik bukan lagi monopoli Pemerintah Pusat, namun juga lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, bahkan perorangan. Berbagai hal tersebut menarik untuk dicatat sebagai bagian penting untuk memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui publikasi Statistik Politik 2012 ini, berbagai fenomena politik yang terjadi hingga Tahun 2012 dicatat, didokumentasi dan ditampilkan secara berkala sebagai lanjutan dari penerbitan tahun sebelumnya.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan publikasi Statistik Politik 2012 ini adalah untuk menghimpun dan menampilkan data statistik politik Indonesia secara berkala yang dapat dibandingkan antar waktu dan daerah.

1.3. Ruang Lingkup

Statistik Politik 2012 mencakup data-data yang terkait dengan politik dan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat, daerah, hingga luar negeri.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari enam bab. Pada Bab 1 Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab 2 tentang metodologi membahas sumber data, metode pengumpulan data, serta konsep dan definisi. Bab 3 tentang pemerintahan, yang membahas sistem pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparatur negara, serta tata kelola pemerintahan.

Bab 4 membahas Lembaga Demokrasi yang membahas partai politik, MPR, DPR, dan DPD, kekuasaan kehakiman, organisasi masyarakat, serta media massa. Bab 5 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, yang terdiri dari bahasan tentang Pemilu 2009, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, pemilihan kepala daerah, serta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Bab 6 tentang Demokrasi dan Keragaman Indonesia, mengulas tentang berbagai pengukuran demokrasi di dunia dan Indonesia, serta keragaman suku dan agama di Indonesia.

METODOLOGI

2

<http://www.pps.go.id>

Bab kedua ini membahas mengenai sumber data dan metode pengumpulan data. Selain itu, bab ini membahas konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Mengingat bahasan mengenai politik cukup luas, maka perlu adanya pembatasan pembahasan. Konsep dan definisi diperlukan untuk memberikan pengertian yang sama dalam memaknai data yang disajikan dalam publikasi ini.

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik 2012 ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil kompilasi dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Data BPS yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 yaitu data tentang Penduduk menurut Suku Bangsa dan Penduduk menurut Agama. Data BPS lain juga ditemui pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Potensi Desa 2011 serta Statistik Keuangan Daerah 2008 - 2011.

Adapun data dari instansi terkait di tingkat pusat di antaranya diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat DPR RI, badan Kepegawaian Negara, Dewan Pers, Komisi Kepolisian nasional, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan media massa baik cetak maupun elektronik.

Di tingkat daerah, sumber data diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah daerah, dan Sekretariat DPRD. Data di tingkat daerah dikumpulkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi pengumpulan dilakukan oleh BPS provinsi, dan pada tingkat kabupaten/kota pengumpulan dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Data untuk menyusun Statistik Politik 2012 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan instansi terkait. Untuk keseragaman format data antar daerah, pengumpulan data menggunakan dua jenis instrumen pengumpulan data yang telah disusun di BPS Pusat dengan maksud untuk memudahkan petugas mengumpulkan data. Dua instrumen yang telah disusun berupa rancangan (*dummy*) tabel dan kuesioner. Dari kedua jenis instrumen tersebut, BPS daerah diberikan kebebasan untuk memilih instrumen yang dianggap paling sesuai untuk pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data di daerah, kenyataan di lapangan menemukan bahwa permasalahan bukan hanya terletak pada perbedaan format data

yang tersedia di instansi sumber data, bahkan juga termasuk ketersediaan data. Kondisi tersebut menjadi penyebab beberapa data dari daerah tidak bisa disajikan dalam publikasi ini. Untuk mengatasi kekurangan ini kami melakukan kompilasi data-data dari lembaga negara yang berada di pusat.

2.3. Konsep dan Definisi

Mengingat luasnya definisi yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik 2012, diperlukan pembatasan konsep-konsep yang digunakan. Batasan ini akan membantu pemahaman pembaca akan konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

Affirmative Action adalah kebijakan yang memberikan keistimewaan (kepada kelompok tertentu) untuk sementara, demi mencapai tujuan tertentu. Implementasi *affirmative action* dalam Pemilu 2009 dan 2014 diatur lewat Undang-Undang Pemilu dimana sekurang-kurangnya 30 persen calon legislatif dalam daftar calon tetap (DCT) adalah perempuan, serta di antara 3 calon dalam DCT minimal terdapat satu orang perempuan. Selain itu, di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, selain syarat pendirian partai politik (UU No. 2/2011), pengurus dewan pimpinan pusat partai politik juga harus terdapat minimal 30% perempuan.

ASEAN adalah organisasi regional yang beranggotakan 10 negara yang berada di Asia Tenggara, di antaranya; Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Filipina, dan Kamboja.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, badan ini disebut Panitia Pengawas Pemilu (UU No. 22/2007).

Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah harga sebuah kursi di satu daerah pemilihan yang berasal dari jumlah pemilih pada suatu daerah pemilihan (Dapil) dibagi jumlah kursi yang diperebutkan.

Calon Independen/Calon Perseorangan adalah seorang yang menjadi kandidat dalam Pemilu Kepala daerah (Pilkada) tanpa melalui partai politik. Calon independen mulai dikenal

melalui UU No. 12/2008 yang merupakan perubahan atas UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Calon Legislatif (Caleg) adalah kandidat yang mencalonkan diri pada Pemilu legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Calon Presiden/Wakil Presiden adalah orang-orang yang memenuhi syarat sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dan namanya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU No.42/2008).

Daerah Otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32/2004).

Daerah Pemilihan (Dapil) adalah pembagian wilayah pada Pemilu legislatif. Pada setiap Dapil dialokasikan sejumlah kursi tertentu yang akan diperebutkan oleh peserta Pemilu.

Daftar Calon Tetap (DCT) adalah daftar kandidat anggota legislatif yang akan dipilih pada Pemilu legislatif tingkat Pusat, daerah, dan DPD.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32/2004).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga perwakilan daerah yang dipilih melalui Pemilu yang berkedudukan sebagai anggota MPR. Anggota DPD berjumlah masing-masing empat orang pada setiap provinsi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

Electoral Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat menjadi peserta pada Pemilu berikutnya.

Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 27/2009).

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU No. 27/2009).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden serta merubah dan menetapkan Undang Undang Dasar. MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilu legislatif.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32/2004).

Parliamentary Threshold (PT) adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk dapat masuk DPR. Sejauh ini Indonesia hanya memberlakukan PT untuk pemilihan DPR. Pada Pemilu 2014 PT akan diberlakukan juga hingga pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, namun akhirnya pasal yang mengatur hal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada Pemilu 2009 *parliamentary threshold* sebesar 2,5% dan Pemilu 2014 sebesar 3,5%.

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

Partisipasi Politik adalah keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan. Partisipasi politik digolongkan menjadi dua; konvensional seperti memilih dalam Pemilu atau diskusi-diskusi politik, serta; non-konvensional seperti demonstrasi dan mogok.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah serta DPRD (UU no.32/2004).

Pemekaran Daerah adalah pembentukan wilayah administratif pemerintahan baru dari tingkat Provinsi hingga tingkat desa.

Pemerintah Pusat adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat yang terdiri dari Presiden, kabinet, dan lembaga-lembaga pembantu Presiden.

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (UU no.8/2012).

Pemilihan Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pilkada adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati/walikota. Pemilihan dilakukan secara langsung dan diadakan setiap lima tahun sekali menjelang selesainya masa jabatan seorang kepala daerah.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.8/2012).

Penduduk adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

Perjanjian Bilateral adalah perjanjian yang dilakukan antara dua negara.

Peserta Pemilu Legislatif adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU.

Sengketa Hasil Pemilu adalah sengketa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Daerah menyangkut hasil Pemilu dan Pilkada. Sejak Pemilu 2009, sengketa Pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Suku Bangsa adalah paro (suku) dari suatu bangsa yang memiliki identitas yang sama dalam bentuk kebudayaan atau bahasa serta (asal) wilayah.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (UU no.10/2008).

PEMERINTAHAN

3

<http://www.pps.go.id>

3.1. Sistem Pemerintahan

Pasal satu Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam negara kesatuan, kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat (Budiardjo, 2008:269). Pemencaran kekuasaan negara dilaksanakan secara vertikal yang menempatkan kedaulatan negara pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah menjalankan kewenangan otonomi pada tingkat daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hak otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak berarti pemberian kedaulatan kepada pemerintah daerah, karena dalam pelaksanaannya pengawasan kekuasaan tertinggi tetap berada pada pemerintah pusat.

Selain secara vertikal, pemencaran kekuasaan negara juga berlaku secara horizontal atau yang biasa disebut dengan pembagian fungsi. Maksudnya pembagian fungsi merupakan pemencaran fungsi negara pada berbagai struktur pemerintahan yang satu dan yang lain, mempunyai hubungan sederajat, tidak saling membawahkan, tetapi berhubungan secara fungsional dalam usaha bersama mencapai tujuan negara. Pembagian fungsi lazim merujuk terminologi Montesquieu yang membagi menjadi peran lembaga negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh Surbakti (2010:220-221) penggunaan istilah ini dianggap tidak terlalu tepat, jika dibandingkan dengan terminologi Almond yang mengategorikan menjadi: pembuatan peraturan (*rule making*), penerapan peraturan (*rule application*), dan penghakiman peraturan (*rule adjudication*). Dalam konteks Indonesia sebagaimana dimaksud UUD 1945 Pasal 24 ayat 2, lembaga pembuat peraturan terdiri dari DPR, MPR, dan DPD, lembaga pelaksana peraturan Presiden dan Kabinet, lembaga penghakiman peraturan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

3.2. Pemerintah Pusat

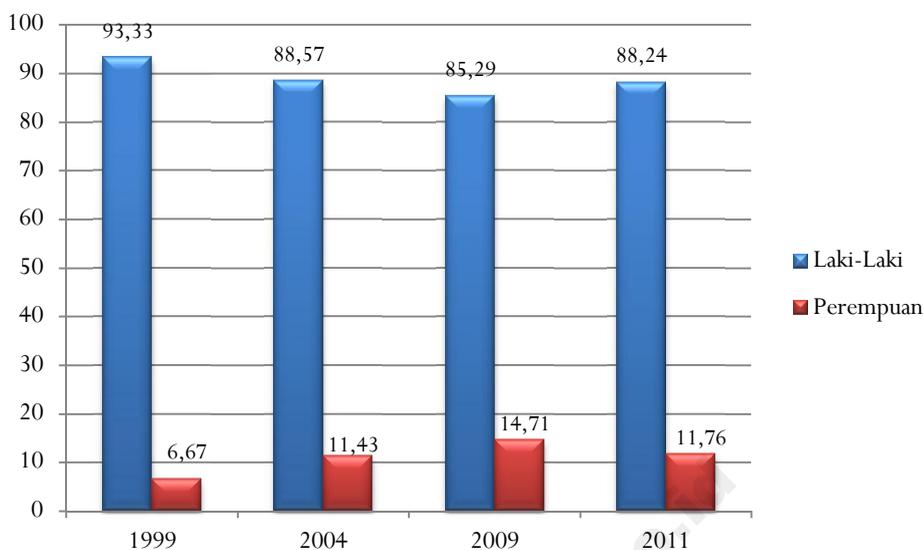
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana pada sistem ini kekuasaan Presiden sangat besar. Surbakti (*ibid*, 219) menguraikan fungsi presiden dalam pemerintahan presidensial ke dalam enam bagian. Pertama, sebagai kepala negara Presiden melaksanakan fungsi simbolis dan seremonial mewakili bangsa-negara. Kedua, sebagai kepala eksekutif dia memimpin kabinet dan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan umum. Ketiga, sebagai kepala legislatif dia mengajukan rancangan undang-undang kepada badan perwakilan rakyat, dan berusaha meyakinkan para wakil rakyat untuk menerima rancangan kebijakannya.

Keempat, sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kelima, sebagai pemimpin dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Keenam, sebagai pemimpin partai.

Sejak Indonesia merdeka sebanyak 6 orang pernah menjabat sebagai presiden dan 11 orang pernah menjabat sebagai wakil presiden. Tabel 3.1 menyajikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia menurut masa pemerintahan. Dua periode pemerintahan terakhir dipimpin oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan langsung oleh rakyat, yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Muhammad Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono. Tabel 3.1 juga memperlihatkan bahwa pada beberapa periode pemerintahan, Presiden memimpin pemerintahan seorang diri tanpa didampingi oleh seorang Wakil Presiden. Selain pasangan presiden dan wakil presiden yang tertera dalam Tabel 3.1, secara *de facto* sejarah Indonesia juga pernah mempunyai pimpinan pemerintahan di masa transisi yaitu Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Mr. Assaat yang merupakan pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia ketika konsensus Konferensi Meja Bundar menghasilkan Republik Indonesia Serikat dibawah kepemimpinan Ir. Soekarno.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet. Menurut Undang-undang Dasar 1945, Indonesia menganut kabinet presidensial. Menteri adalah pembantu Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sehingga tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sejarah Indonesia mencatat bahwa sistem kabinet presidensial pernah ditinggalkan dan beralih ke kabinet parlementer sehingga pimpinan kabinet dipegang seorang perdana menteri. Namun demikian melalui Dekrit Presiden Tahun 1959, Indonesia kembali ke sistem kabinet presidensial. Jumlah kementerian dan jumlah menteri bervariasi dari satu periode ke periode pemerintahan yang berbeda. Saat ini terdapat 3 kementerian koordinator, 31 kementerian, 4 lembaga setingkat menteri, dan 24 lembaga non kementerian. Berdasarkan jenis kelamin, anggota kabinet sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Sejak era reformasi dimana kesadaran akan hak-hak politik perempuan semakin meningkat, jumlah anggota kabinet perempuan tidak pernah lebih dari 15% (grafik 3.1).

Grafik 3.1. Komposisi Menteri Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 1999-2011



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tabel 3.1. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Menurut Masa Pemerintahan

Presiden (1)	Wakil Presiden (2)	Masa Pemerintahan (3)
Ir. Soekarno	Drs. Moehammad Hatta	18 Agustus 1945 – 19 Desember 1948
Ir. Soekarno	Drs. Moehammad Hatta	14 Juli 1949 – 27 Desember 1949
Ir. Soekarno	Tidak ada Wakil Presiden	27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
Ir. Soekarno	Drs. Moehammad Hatta ¹⁾	17 Agustus 1950 – 22 Februari 1967
H.M. Soeharto	Tidak ada wakil presiden	22 Februari 1967 – 27 Maret 1968
H.M. Soeharto	Tidak ada wakil presiden	27 Maret 1968 – 24 Maret 1973
H.M. Soeharto	Sri Sultan Hamengkubuwono IX	24 Maret 1973 - 23 Maret 1978
H.M. Soeharto	H. Adam Malik Batubara	23 Maret 1978 - 11 Maret 1983
H.M. Soeharto	Jenderal (Purn) R. Umar Wirahadikusuma	11 Maret 1983 - 11 Maret 1988
H.M. Soeharto	Letjend (Purn) Soedharmono, SH	11 Maret 1988 - 11 Maret 1993
H.M. Soeharto	Jenderal (Purn) Try Sutrisno	11 Maret 1993 - 10 Maret 1998
H.M. Soeharto	Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie	10 Maret 1998 - 21 Mei 1998
Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie	Tidak ada wakil presiden	21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999
KH. Abdurhaman Wahid	Hj. Megawati Soekarnoputri	20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001
Hj. Megawati Soekarnoputri	Dr (HC) H. Hamzah Haz	23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono	Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2009
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono	Prof. Dr. Boediono	20 Oktober 2009 - Sekarang

Keterangan:

1) Menjadi wakil presiden sampai 1 Desember 1956

- Pada Periode 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, setelah Belanda melakukan penangkapan dan pengasingan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Mr. Syarifuddin Prawiranegara (Masyumi) mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

- Pada Periode 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950, Mr. Asaat merupakan pemangku jabatan sementara Presiden Republik Indonesia setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan terbentuknya Republik Indonesia Serikat dibawah pemerintahan Ir. Soekarno sebagai Presiden

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka

3.2.1. Wilayah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah 1.910.931,32 KM². Survei Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menyebutkan jumlah pulau di Indonesia sebanyak 13.000 pulau. Di antara jumlah pulau tersebut, secara administratif terbagi menjadi 34 provinsi 403 Kabupaten serta 98 Kota (2012). Provinsi dengan wilayah terluas adalah Papua dengan luas 319.036,05 km², disusul dengan Kalimantan Timur 204.534,34 km² (sebelum pembagian wilayah dengan Provinsi Kalimantan Utara) serta Kalimantan Tengah 153.564,50 km². Sebaliknya, tiga Provinsi dengan luas wilayah paling kecil adalah DKI Jakarta dengan luas 664,01 km², DI Yogyakarta 3.133,15 km², serta Bali 5.780,06 km². Indonesia dihuni penduduk dengan jumlah 237.641.326 jiwa. Di antara penduduk tersebut sebanyak 119 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki, dan 118 juta jiwa berjenis kelamin perempuan (Tabel 3.2).

3.2.2 Pertahanan, dan Hubungan Internasional

Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kekuatan pertahanan yang cukup kuat. Dengan membandingkan data CIA (US Library Congress, 2011), situs Globalfire menempatkan kekuatan militer Indonesia pada peringkat 18 di dunia. Pada level Asia, Indonesia menempati posisi 8 di bawah China, India, Korea Selatan, Jepang, Iran, Taiwan, Pakistan. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara kekuatan militer Indonesia dinilai paling kuat, dibandingkan dengan Thailand, Filipina atau Malaysia. Dari sisi peralatan Indonesia tidak sepenuhnya unggul dari negara-negara Asia Tenggara. Namun pemerinkatan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti; jumlah penduduk, usia penduduk angkatan perang, hingga produksi minyak dalam negeri. Negara dengan 30 peringkat kekuatan militer teratas ditampilkan pada Tabel 3.3.

Pada organisasi ASEAN Indonesia memiliki peran yang besar, bahkan dapat disebut sebagai pemimpin alami ASEAN (Chandra, 2009: 234 dalam Wibowo & Hadi [ed], 2009). Asumsi tersebut didasarkan pada peran Indonesia sebagai salah satu inisiator utama terbentuknya organisasi ASEAN dan merupakan kekuatan politik penting di Asia Tenggara. Selain menjadi tempat sekretariat ASEAN, Indonesia juga telah tiga kali pernah menjabat sebagai Sekjen ASEAN, paling banyak di antara negara-negara anggota lain. Sekalipun jabatan Umarjadi Notowijono hanya 4 bulan, negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura, baru dua kali menjabat sebagai Sekjen ASEAN. Brunei Darussalam hanya satu kali, sementara Myanmar, Laos dan Vietnam bahkan belum pernah menjabat (Tabel 3.4).

Dalam pergaulan internasional, Indonesia juga aktif melakukan perjanjian-perjanjian politik dengan negara lain. Hingga tahun 2011, tercatat Indonesia pernah melakukan 2.929 perjanjian bilateral dengan 134 negara di seluruh dunia. Sebagian negara yang pernah melakukan perjanjian bilateral dengan Indonesia telah terpecah menjadi beberapa negara seperti Uni Sovyet, Cekoslowakia, serta Yugoslavia. Di antara jumlah tersebut, 166 di antaranya adalah perjanjian di bidang politik (5,66%). Sebanyak 29 negara yang memiliki lebih dari satu perjanjian bilateral bidang politik, serta yang memiliki perjanjian bilateral terbanyak dengan Indonesia ditampilkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Tahun 2011

Provinsi	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	57.956,00	2.248.952	2.245.458	4.494.410
Sumatera Utara	72.981,23	6.483.354	6.498.850	12.982.204
Sumatera Barat	42.012,89	2.404.377	2.442.532	4.846.909
Riau	87.023,66	2.853.168	2.685.199	5.538.367
Jambi	50.058,16	1.581.110	1.511.155	3.092.265
Sumatera Selatan	91.592,43	3.792.647	3.657.747	7.450.394
Bengkulu	19.919,33	877.159	838.359	1.715.518
Lampung	34.623,80	3.916.622	3.691.783	7.608.405
Kep. Bangka Belitung	16.424,06	635.094	588.202	1.223.296
Kepulauan Riau	8.201,72	862.144	817.019	1.679.163
DKI Jakarta	664,01	4.870.938	4.736.849	9.607.787
Jawa Barat	35.377,76	21.907.040	21.146.692	43.053.732
Jawa Tengah	32.800,69	16.091.112	16.291.545	32.382.657
DI Yogyakarta	3.133,15	1.708.910	1.748.581	3.457.491
Jawa Timur	47.799,75	18.503.516	18.973.241	37.476.757
Banten	9.662,92	5.439.148	5.193.018	10.632.166
Bali	5.780,06	1.961.348	1.929.409	3.890.757
Nusa Tenggara Barat	18.572,32	2.183.646	2.316.566	4.500.212
Nusa Tenggara Timur	48.718,10	2.326.487	2.357.340	4.683.827
Kalimantan Barat	147.307,00	2.246.903	2.149.080	4.395.983
Kalimantan Tengah	153.564,50	1.153.743	1.058.346	2.212.089
Kalimantan Selatan	38.744,23	1.836.210	1.790.406	3.626.616
Kalimantan Timur*	204.534,34	1.871.690	1.681.453	3.553.143
Sulawesi Utara	13.851,64	1.159.903	1.110.693	2.270.596
Sulawesi Tengah	61.841,29	1.350.844	1.284.165	2.635.009
Sulawesi Selatan	46.717,48	3.924.431	4.110.345	8.034.776
Sulawesi Tenggara	38.067,70	1.121.826	1.110.760	2.232.586
Gorontalo	11.257,07	521.914	518.250	1.040.164
Sulawesi Barat	16.787,18	581.526	577.125	1.158.651
Maluku	46.914,03	775.477	758.029	1.533.506
Maluku Utara	31.982,50	531.393	506.694	1.038.087
Papua	319.036,05	402.398	358.024	760.422
Papua Barat	97.024,27	1.505.883	1.327.498	2.833.381
Jumlah	1.910.931,32	119.630.913	118.010.413	237.641.326

*Wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengalami pemekaran pada Oktober 2012, terbagi dua menjadi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2011) dan Sensus Penduduk BPS (2010)

Tabel 3.3. Negara Dengan Peringkat Kekuatan Militer 30 Teratas Tahun 2011

Peringkat	Negara	Militer Aktif	Senjata Darat	Pesawat Tempur	Kapal Perang	Anggaran Pertahanan (juta US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Amerika	1.477.896	56.269	18.234	2.384	692.000
2	Rusia	1.200.000	91.715	2.749	233	\$56.000
3	China	2.285.000	22.795	4.092	562	\$100.000
4	India	1.325.000	75.191	2.462	175	\$36.030
5	Inggris	224.500	11.630	1.663	99	\$73.746
6	Turki	612.900	69.774	1.940	265	\$25.000
7	Korea Selatan	653.000	13.361	1.568	170	\$26.550
8	Prancis	362.485	10.621	1.757	289	\$44.788
9	Jepang	239.430	5.220	1.953	110	\$70.495
10	Israel	187.000	12.552	1.964	64	\$16.000
11	Brazil	371.199	6.395	1.061	100	\$27.120
12	Iran	545.000	12.393	1.030	261	\$9.174
13	Jerman	148.996	4.539	783	90	\$41.000
14	Taiwan	290.000	14.750	837	118	\$15.000
15	Pakistan	617.000	16.461	1.414	11	\$6.410
16	Mesir	468.500	48.740	884	221	\$7.150
17	Italy	293.202	12.185	1.004	180	\$50.400
18	Indonesia	438.410	1.577	510	136	\$4.740
19	Thailand	305.860	4.392	913	164	\$5.200
20	Ukraina	159.000	20.780	1.003	70	\$1.200
21	Polandia	100.000	7.259	555	80	\$10.800
22	Korea Utara	1.106.000	20.692	1.650	708	\$5.000
23	Philipina	120.000	2.379	289	120	\$2.439
24	Australia	57.500	3.259	374	53	\$26.900
25	Kanada	67.756	5.106	544	33	\$21.800
26	Saudi Arabia	233.500	8.574	1.200	77	\$39.200
27	Malaysia	124.000	2.465	258	65	\$3.500
28	Swedia	25.000	2.809	318	387	\$5.500
29	Spanyol	177.000	3.241	716	95	\$25.507
30	Mexico	259.770	4.286	431	189	\$6.300

Sumber: Diolah dari CIA, U.S Library Congress dalam *globalfirepower.com* (2011)

Tabel 3.4 Daftar Nama dan Asal Negara Sekjen ASEAN 1978 - 2011

Nama Sekjen	Negara Asal	Masa Jabatan
(1)	(2)	(3)
Hartono Rekso Dharsono	Indonesia	7 Juni 1976 - 18 Februari 1978
Umarjadi Notowijono	Indonesia	19 Februari - 30 Juni 1978
Datuk Ali Bin Abdullah	Malaysia	10 Juli 1978 - 30 Juni 1980
Narciso G. Reyes	Filipina	1 Juli 1980 - 1 Juli 1982
Chan Kai Yau	Singapura	18 Juli 1982 - 15 Juli 1984
Phan Wannamethee	Thailand	16 Juli 1984 - 15 Juli 1986
Roderick Yong	Brunei Darussalam	16 Juli 1986 - 16 Juli 1989
Rusli Noor	Indonesia	17 Juli 1989 - 1 Januari 1993
Datuk Ajit Singh	Malaysia	1 Januari 1993 - 31 Desember 1997
Rodolfo C. Severino	Filipina	1 Januari 1998 - 31 Desember 2002
Ong Keng Yong	Singapura	1 Januari 2003 - 31 Desember 2007
Surin Pitsuwan	Thailand	1 Januari 2008 - Sekarang

Sumber: ASEAN Selayang Pandang (2010)

Tabel 3.5 Daftar Negara menurut Jumlah Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Bidang Politik dengan Indonesia

No	Negara	Jumlah Perjanjian Bilateral	No	Negara	Jumlah Perjanjian Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jepang	412	1	Belanda	23
2	Amerika Serikat	259	2	Malaysia	9
3	Australia	183	3	Australia	9
4	Jerman	132	4	China	7
5	Kanada	114	5	Jepang	6
6	Prancis	111	6	India	6
7	Malaysia	86	7	Pakistan	5
8	China	82	8	Prancis	4
9	Belanda	77	9	Filipina	4
10	Belgium	69	10	Iran	4
11	Italy	58	11	Jerman	3
12	Korea Selatan	54	12	Kanada	3
13	Filipina	51	13	Romania	3
14	India	43	14	Vietnam	3
15	Iran	39	15	Timor Leste	3
16	Inggris	38	16	Usbekistan	3
17	Romania	38	17	Bulgaria	2
18	Vietnam	37	18	Thailand	2
19	Russia	34	19	Egypt	2
20	Singapura	34	20	Hongaria	2
21	Bulgaria	33	21	Aljazair	2
22	Thailand	33	22	Korea Utara	2
23	Swiss	31	23	Irak	2
24	Polandia	30	24	Cambodia	2
25	Egypt	29	25	Ukraina	2
26	Hongaria	29	26	Kyrgystan	2
27	Pakistan	29	27	Kazakhstan	2
28	Tunisia	24	28	Portugal	2

Sumber: Diolah dari Kementerian Luar Negeri (2011)

Persahabatan antara dua negara ditandai dengan adanya kedutaan besar. Indonesia memiliki 95 kedutaan besar di luar negeri. Di Indonesia terdapat 94 kedutaan besar negara sahabat, dengan komposisi yang sebagian besar adalah negara-negara di Asia. Jumlah kedutaan besar Indonesia di luar negeri dengan jumlah kedutaan besar negara sahabat yang ada di Indonesia relatif seimbang, jika dibandingkan dengan jumlah konsulat jenderal Indonesia di luar negeri yang berjumlah 34 sedangkan konsulat jenderal negara sahabat di Indonesia berjumlah 15 negara (Tabel 3.6 dan 3.7). Hubungan Internasional Indonesia yang sebagian besar terjadi dengan negara-negara di Asia juga tampak pada jumlah perwakilan Indonesia di luar negeri (Tabel 3.8), dimana 81 (55%) diantaranya terdapat di Asia. Dari seluruh perwakilan Indonesia

di luar negeri, paling banyak merupakan Atase Pertahanan (33 perwakilan) dan Atase Perdagangan (23 perwakilan).

Kunjungan Diplomatik Indonesia ke luar negeri lebih banyak dilakukan Menteri Luar Negeri yang tercatat sebanyak 77 kali, jika dibandingkan dengan Presiden atau Wakil Presiden yang totalnya hanya 12 kali. Terkait dengan kunjungan diplomatik Presiden, Wapres, atau Menteri Luar Negeri, Indonesia lebih banyak mendapat kunjungan diplomatik. Sepanjang Tahun 2011 terdapat 17 kepala negara melakukan kunjungan bilateral dan 32 kepala negara melakukan kunjungan multilateral. Demikian juga dengan menteri luar negeri, berkunjung sebanyak 31 kali dan mendapat kunjungan sebanyak 92 kali. Kondisi ini terjadi karena sepanjang tahun 2011 terdapat banyak kegiatan internasional di Indonesia, di antaranya World Economic Forum on East Asia, Bali Democracy Forum IV, KTT ASEAN Ke-19, serta KTT EAS (Tabel 3.9).

Tabel 3.6 Kedutaan dan Konsulat Asing di Indonesia

Benua/Kawasan	Kedutaan Besar	Konsulat Jenderal	Konsulat	Consular office / consular agency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Afrika	11	0	0	0
Amerika	14	1	1	1
Asia	32	12	5	1
Australia	1	1	0	0
Eropa	34	1	1	0
Pasifik	2	0	0	0
Total	94	15	7	2

Sumber: Kementerian Luar Negeri (2012)

Tabel 3.7 Jumlah Perwakilan Indonesia Di Luar Negeri

Benua / Kawasan	Kedutaan Besar	Konsulat Jenderal	PTRI
(1)	(2)	(3)	(4)
Afrika	16	1	0
Amerika	13	7	1
Asia	34	22	1
Australia dan Oseania	4	0	0
Eropa	28	4	1
Jumlah	95	34	3

Sumber: Diolah Dari Kementerian Luar Negeri (2012)

Tabel 3.8 Pejabat Perbantuan pada Perwakilan RI di Luar Negeri

Bidang	Asia	Afrika	Amerika	Eropa	Australia dan Oseania
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Atase Pertahanan	18	2	2	9	2
Atase Udara	2	0	1	0	0
Atase Laut	3	0	1	2	1
Atase Perdagangan	9	1	2	10	1
Atase Imigrasi	6	0	0	2	0
Atase Pendidikan	9	1	1	4	1
Atase Kejaksaan	1	0	0	0	0
Atase Polri	6	0	1	1	1
Atase Militer	3	0	0	2	1
Atase Perhubungan	3	0	2	2	0
Atase Tenaga Kerja	4	0	0	0	0
Atase Keuangan	2	0	0	1	0
Atase Perindustrian	1	0	0	1	0
Atase Pertanian	1	0	1	2	0
Atase Kehutanan	1	0	0	0	0
Atase Ilmu Pengetahuan	0	0	0	1	0
BIN	12	1	0	4	1
Jumlah	81	5	11	41	8

Sumber: Diolah dari Kementerian Luar Negeri (2012)

Tabel 3.9 Kunjungan dan Tamu Diplomatik Indonesia 2011

Bulan	Kunjungan Kepala Negara Indonesia ke Luar Negeri		Kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan ke Indonesia		Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia*		Kunjungan Tamu Asing Diterima Menteri Luar Negeri	
	Presiden	Wapres	Bilateral	Multilateral	Bilateral	Multilateral	Bilateral	Multilateral
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Januari	2	1	0	0	0	1	2	0
Feb	1	0	0	0	5	1	1	2
Maret	0	1	2	0	0	0	10	5
April	0	0	5	0	2	5	8	4
Mei	0	0	2	8	0	0	28	4
Juni	2	2	4	0	2	0	2	0
Juli	0	0	0	0	0	0	19	0
Agustus	0	1	0	0	1	0	1	0
September	0	0	2	0	6	0	1	0
Oktober	0	0	1	0	3	0	2	0
November	2	0	1	16	2	0	3	0
Desember	0	0	0	8	3	0	0	0
Jumlah	7	5	17	32	24	7	77	15

*Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia tidak termasuk kunjungan dalam rangka mendampingi Presiden

Sumber: Diolah Dari Buku Dimplomasi Indonesia 2011, Kementerian Luar Negeri (2012)

3.3. Pemerintah Daerah

Sejak Indonesia merdeka, hampir seluruh periode pemerintahan dikelola dengan sistem ketatanegaraan yang terpusat. Pemerintah daerah berperan sebagai cabang struktural yang melaksanakan sebagian besar agenda-agenda yang disusun oleh pemerintah pusat. Dalam perkembangannya muncul pemikiran untuk memberikan peran yang lebih besar pada pemerintah daerah. Lebih lagi jika mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan serta dihuni oleh penduduk dengan jumlah terbesar keempat dunia, dapat menjadi hambatan pada jangkauan pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pembangunan dengan konsentrasi dan kualitas yang merata. Pada tahun 1999 kesadaran tersebut memunculkan keputusan untuk melakukan desentralisasi. Pentingnya desentralisasi juga karena didorong adanya keterbatasan birokrasi pemerintah sendiri (Toha, 2002:15), yang oleh Sisk (2002:28) dimaknai sebagai prinsip dimana keputusan yang menyangkut masyarakat sebisa mungkin dibuat oleh pejabat yang tingkatnya paling dekat dengan rakyat.

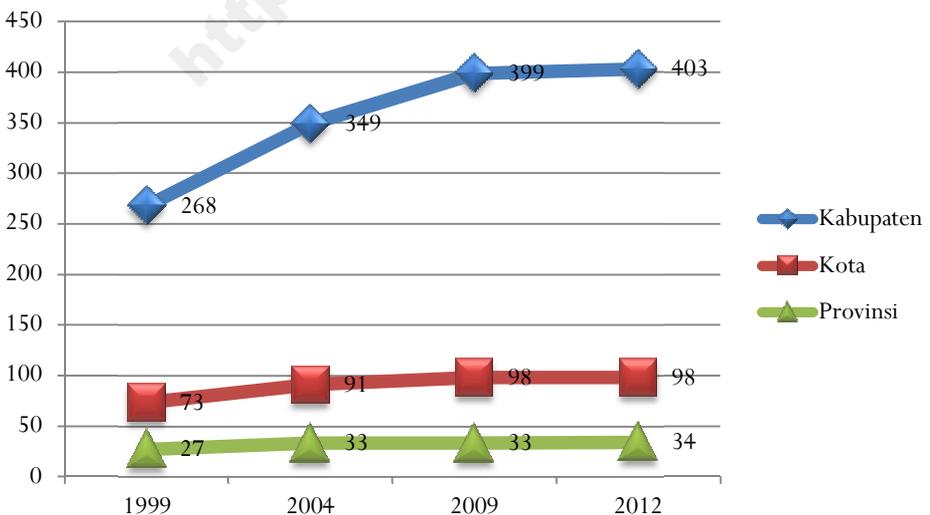
Desentralisasi dalam wujud otonomi daerah dianggap dapat menjawab salah satu prasyarat penting dalam demokrasi, yaitu adanya partisipasi rakyat. Sebagaimana dikemukakan Syarif Hidayat (2002 dalam Ibrahim, 2008:123), dari perspektif *state-society relation*, dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil (*civil society*) untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya.

Semangat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendekatkan rentang kekuasaan pemerintah daerah, berimplikasi pada koreksi atas pembagian besar wilayah yang sebelumnya tidak merata. Beberapa provinsi utamanya yang berada di luar Jawa memiliki wilayah yang sangat luas sehingga perlu untuk dirasionalisasi untuk mendukung optimalisasi otonomi daerah. Luas wilayah dibagi melalui pemekaran wilayah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada awal kemerdekaan, Indonesia terdiri atas 8 provinsi, yang kemudian berubah menjadi 16 wilayah pada masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950). Setelah kembali dalam bentuk NKRI, Indonesia terdiri dari 11 daerah provinsi. Kondisi ini terus berkembang hingga pada akhir tahun 1974, Indonesia terdiri dari 26 provinsi. Integrasi Timor-Timur ke dalam NKRI pada tahun 1975 menambah jumlah provinsi hingga menjadi 27. Kondisi ini bertahan hampir selama seperempat abad sebelum akhirnya berkurang menjadi 26 Provinsi karena Timor Timur memisahkan diri dari NKRI pada tahun 1999.

Pada penghujung tahun 1999, terbentuk Provinsi Maluku Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku. Dengan demikian, jumlah provinsi sampai akhir tahun 1999 tetap sebanyak 27 provinsi. Selama rentang waktu empat tahun antara tahun 2000-2004 terdapat 6 provinsi baru yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, sehingga jumlah provinsi di Indonesia menjadi 33 provinsi. Pada tanggal 25 Oktober 2012 DPR menyetujui pemekaran Provinsi Kalimantan Utara, yang sebelumnya merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga provinsi di Indonesia berjumlah 34.

Bukan hanya pada tingkat provinsi, jumlah kabupaten/kota terus bertambah untuk merespon otonomi daerah. Peningkatan jumlah kabupaten/kota merupakan akibat pemekaran wilayah kabupaten/kota terutama yang terjadi di Papua, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Di Provinsi Papua dari 19 kabupaten dan 1 kota pada tahun 2004 menjadi 28 kabupaten dan 1 kota pada tahun 2009. Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara bertambah sebanyak 5 kabupaten dan 1 kota. Provinsi Nusa Tenggara Timur bertambah 5 kabupaten. Selain menetapkan berdirinya Provinsi Kalimantan Utara, 25 Oktober 2012 juga menjadi hari lahir bagi empat kabupaten baru, yaitu Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat.

Grafik 3.2 Pemekaran Daerah Indonesia 1999 -2012



Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2012)

**Tabel 3.10 Jumlah Kabupaten dan Kota
Menurut Provinsi Tahun 1999 – 2012**

Provinsi	1999		2004		2008		2009		2012	
	Kab	Kota								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	11	2	17	4	18	5	18	5	18	5
Sumatera Utara	13	6	18	7	23	7	25	8	25	8
Sumatera Barat	9	6	12	7	12	7	12	7	12	7
Riau	12	3	9	2	9	2	10	2	10	2
Jambi	9	1	9	1	9	2	9	2	9	2
Sumatera Selatan	8	2	10	4	11	4	11	4	11	4
Bengkulu	3	1	8	1	9	1	9	1	9	1
Lampung	8	2	8	2	9	2	12	2	13	2
Kep. Bangka Belitung	-	-	6	1	6	1	6	1	6	1
Kepulauan Riau *	-	-	4	2	5	2	5	2	5	2
DKI Jakarta	-	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Jawa Barat	20	8	16	9	17	9	17	9	18	9
Jawa Tengah	29	6	29	6	29	6	29	6	29	6
DI Yogyakarta	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1
Jawa Timur	29	8	29	9	29	9	29	9	29	9
Banten *	-	-	4	2	4	3	4	4	4	4
Bali	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1
Nusa Tenggara Barat	6	1	7	2	8	2	8	2	8	2
Nusa Tenggara Timur	13	1	15	1	19	1	20	1	20	1
Kalimantan Barat	8	1	10	2	12	2	12	2	12	2
Kalimantan Tengah	5	1	13	1	13	1	13	1	13	1
Kalimantan Selatan	9	2	11	2	11	2	11	2	11	2
Kalimantan Timur	8	4	9	4	10	4	10	4	6	3
Kalimantan Utara**	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Sulawesi Utara	5	3	6	3	11	4	11	4	11	4
Sulawesi Tengah	7	1	9	1	10	1	10	1	10	1
Sulawesi Selatan	22	2	20	3	21	3	21	3	21	3
Sulawesi Tenggara	4	1	8	2	10	2	10	2	10	2
Gorontalo *	-	-	4	1	5	1	5	1	5	1
Sulawesi Barat *	-	-	5	-	5	-	5	-	5	0
Maluku	6	2	7	1	9	2	9	2	9	2
Maluku Utara *	-	-	6	2	6	2	7	2	7	2
Papua Barat *	-	-	8	1	8	1	10	1	12	1
Papua	12	2	19	1	26	1	28	1	28	1
Indonesia	268	73	349	91	387	96	399	98	403	98

Keterangan : *) Tahun 1999 masih bergabung dengan provinsi induk

**) Provinsi Kalimantan Utara disahkan pada 25 Oktober 2012

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2011) dan DPR RI (2012).

Untuk mendukung otonomi daerah pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar penting penjabaran otonomi daerah dari sisi administrasi keuangan. Regulasi tersebut digantikan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 seiring dengan dicabutnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan digantikan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah, postur anggaran ditetapkan dalam bentuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD). Bentuk agregat Keuangan Daerah Tahun 2010-2011 ditampilkan pada Tabel 3.11. Realisasi penerimaan, pengeluaran, serta jenis pengeluaran ditampilkan dalam Tabel 3.12, 3.13, dan 3.14.

Keberhasilan dalam pengelolaan daerah sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah. Dalam kerangka tersebut, Peraturan Daerah (Perda) merupakan konsekuensi logis dari wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Ryaas Rasyid, 2005 dalam Ibrahim, 2008:126). Meskipun kewenangan membuat Perda ada pada masing-masing daerah, namun tetap ada batasan dalam pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 136 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Perda sebagaimana ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi." Jika melanggar ketentuan tersebut, maka Perda dapat dibatalkan atau diminta pembatalan.

Terdapat dua jalur pengawasan Perda agar tetap sesuai dengan kepentingan umum dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Pertama, adalah pengawasan melalui jalur eksekutif (*executive review*), dimana pengawasan Perda dilakukan oleh presiden melalui menteri terkait atau gubernur. Kedua adalah pengawasan melalui jalur yudikatif (*judicial review*) yang dapat diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menguji kesesuaian Perda terhadap perundang-undangan yang lebih tinggi (Ibrahim, 2008: 127-128). Berdasarkan Laporan Tahunan MA 2011, sepanjang tahun 2011 terdapat 6 permohonan uji materiil tentang Perda dan semuanya telah diputus oleh MA. Pada rentang 2002-2009 terdapat 2.246 Perda yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Tabel 3.15). Tema yang dibatalkan sebagian besar berkaitan dengan retribusi, pajak, serta perijinan (Tabel 3.16). Perda yang dibatalkan memiliki umur berlaku yang beragam (Tabel 3.17). Sementara pada periode 2010-2011 terdapat 757 Perda yang diminta Klarifikasi Kementerian Dalam Negeri (Tabel 3.18 , 3.19, dan 3.20).

Tabel 3.11. Agregat Keuangan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2011

Subjek	2010	2011
(1)	(2)	(3)
Agregat APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota		
Pendapatan	403.922.444	477.698.540
Belanja	444.001.717	513.335.490
Penerimaan Pembiayaan	49.882.185	44.634.620
Pengeluaran Pembiayaan	7.485.597	8.405.350
Komposisi Pendapatan Asli Daerah		
Pendapatan Hibah	5.299.200	5.172.370
Dana Darurat	353.083	2.900.030
Bagi Hasil Pajak	11.994.875	13.141.810
Dana Penyesuaian dan Otsus	16.125.237	31.631.700
Bantuan Keuangan	5.544.395	7.551.660
Komposisi Dana Perimbangan		
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	78.137.620	76.440.730
DAU	193.163.745	225.235.970
DAK	21.665.600	25.481.840
Belanja Daerah		
Belanja Langsung	202.795.127	243.101.470
Belanja Tidak Langsung	241.205.591	270.234.010
Komposisi Belanja Langsung		
Belanja Pegawai	23.926.072	25.696.810
Belanja Barang dan Jasa	82.509.571	103.830.430
Belanja Modal	93.359.484	113.574.230
Komposisi Belanja Tidak Langsung		
Belanja Pegawai	174.611.443	202.641.190
Belanja Hibah	18.425.693	15.990.340
Belanja Bansos	11.966.537	12.055.770
Belanja Bankeu dan Lainnya	36.302.197	-
Belanja Bankeu	-	21.546.270
Belanja Bagi Hasil Pada Prov/Kab/Kota/Desa	-	15.451.360
Belanja Bunga, Subsidi, dan Belanja tak Terduga	-	2.549.090

Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2012)

**Tabel 3.12 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
Menurut Provinsi (ribu rupiah) Tahun 2011**

Provinsi	Penerimaan			Pengeluaran		
	Pendapatan	Pembiayaan	Jumlah	Belanja	Pembiayaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	6.911.764.845	3.141.732.122	10.053.496.967	5.715.623.666	4.337.873.301	10.053.496.967
Sumatera Utara	3.225.853.317	394.258.830	3.620.112.147	2.967.350.795	652.761.352	3.620.112.147
Sumatera Barat	1.723.767.565	258.039.339	1.981.806.904	1.637.700.489	344.106.415	1.981.806.904
Riau	4.164.943.199	466.019.841	4.630.963.040	3.657.889.820	973.073.220	4.630.963.040
Jambi	1.436.381.400	359.487.858	1.795.869.258	1.404.982.484	390.886.774	1.795.869.258
Sumatera Selatan	2.574.429.820	101.043.442	2.675.473.262	2.386.788.811	288.684.451	2.675.473.262
Bengkulu	1.082.518.266	445.850.386	1.528.368.652	1.249.666.188	278.702.464	1.528.368.652
Lampung	1.723.036.643	180.319.738	1.903.356.381	1.711.015.163	192.341.218	1.903.356.381
Bangka Belitung	840.122.439	254.692.423	1.094.814.862	775.348.992	319.465.870	1.094.814.862
Kepulauan Riau	1.356.574.432	184.315.626	1.540.890.058	1.148.936.845	391.953.213	1.540.890.058
DKI Jakarta	19.221.757.881	1.364.256.321	20.586.014.202	15.956.526.086	4.629.488.116	20.586.014.202
Jawa Barat	7.275.007.134	1.350.314.356	8.625.321.490	6.110.959.797	2.514.361.693	8.625.321.490
Jawa Tengah	5.203.414.609	848.298.788	6.051.713.397	5.162.662.476	889.050.921	6.051.713.397
D.I Yogyakarta	1.258.609.946	537.060.364	1.795.670.310	1.453.286.282	342.384.028	1.795.670.310
Jawa Timur	7.075.105.413	1.723.922.045	8.799.027.458	6.203.660.594	2.595.366.864	8.799.027.458
Banten	2.351.380.505	149.104.130	2.500.484.635	2.253.982.712	246.501.923	2.500.484.635
Bali	1.667.342.648	282.503.094	1.949.845.742	1.464.226.342	485.619.400	1.949.845.742
NTB	1.066.716.532	71.073.304	1.137.789.836	1.042.946.465	94.843.371	1.137.789.836
NTT	946.026.752	310.377.666	1.256.404.418	984.233.461	272.170.957	1.256.404.418
Kalimantan Barat	1.474.197.546	134.331.750	1.608.529.296	1.360.959.910	247.569.386	1.608.529.296
Kalimantan Tengah	1.246.835.944	205.554.131	1.452.390.075	1.276.361.391	176.028.684	1.452.390.075
Kalimantan Selatan	1.875.797.122	269.666.395	2.145.463.517	1.545.693.966	599.769.551	2.145.463.517
Kalimantan Timur	6.127.503.221	2.361.237.901	8.488.741.122	6.356.384.491	2.132.356.631	8.488.741.122
Sulawesi Utara	965.147.321	385.989.059	1.351.136.380	913.982.712	437.153.668	1.351.136.380
Sulawesi Tengah	1.042.484.623	108.000.559	1.150.485.182	954.733.636	195.751.546	1.150.485.182
Sulawesi Selatan	2.133.624.783	208.669.551	2.342.294.334	2.134.520.569	207.773.765	2.342.294.334
Sulawesi Tenggara	957.848.767	61.603.700	1.019.452.467	899.241.856	120.210.611	1.019.452.467
Gorontalo	536.574.283	128.731.650	665.305.933	537.171.736	128.134.197	665.305.933
Sulawesi Barat	510.759.425	70.248.928	581.008.353	520.189.772	60.818.581	581.008.353
Maluku	786.335.010	62.415.818	848.750.828	780.644.636	68.106.192	848.750.828
Maluku Utara	676.545.728	26.220.676	702.766.404	645.497.728	57.268.676	702.766.404
Papua Barat	1.502.766.461	193.508.717	1.696.275.178	1.646.990.743	49.284.435	1.696.275.178
Papua	5.757.078.135	0	5.757.078.135	5.750.667.126	6.411.009	5.757.078.135
	96.698.251.715	16.638.848.508	113.337.100.223	88.610.827.740	24.726.272.483	113.337.100.223

Sumber: Statistik Keuangan daerah, BPS (2012)

**Tabel 3. 13 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), Tahun 2008 - 2011**

Jenis Pengeluaran	2008	2009	2010	2011*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Tidak Langsung	45.398.365.063	48.150.149.337	53.152.485.827	61.366.212.828
Belanja Pegawai	16.665.704.476	18.451.835.442	20.692.837.531	25.497.936.889
Belanja Bunga	26.763.459	10.585.697	9.167.475	9.413.074
Belanja Subsidi	60.269.587	116.478.816	64.605.959	101.546.004
Belanja Hibah	5.386.368.439	2.950.402.234	4.428.118.542	6.354.035.958
Belanja Bantuan Sosial	4.670.816.005	4.264.280.761	3.627.404.487	3.455.783.956
Belanja Bagi Hasil	10.596.170.314	11.977.153.663	13.627.990.091	14.040.769.359
Belanja Bantuan Keuangan	7.785.211.795	10.182.621.399	10.552.027.515	11.277.655.036
Pengeluaran Tidak Terduga	207.060.988	196.791.325	150.334.227	629.072.552
Belanja Langsung	43.212.462.677	53.734.476.550	59.000.922.032	66.658.796.697
Belanja Pegawai	5.372.239.813	6.075.451.038	6.669.635.011	6.074.963.065
Belanja Barang dan Jasa	18.943.346.819	23.412.329.896	26.992.274.147	33.474.505.704
Belanja Modal	18.896.876.045	24.246.695.616	25.339.012.874	27.109.327.928
Pembiayaan daerah	24.726.272.483	20.008.181.602	21.319.618.627	2.614.245.499
	113.337.100.223	121.892.807.489	133.473.026.486	130.639.255.024

*) Data APBD

Sumber: Statistik Keuangan daerah, BPS (2012)

Tabel 3. 14 Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (ribu rupiah), Tahun 2008 -2011

Provinsi	2008	2009	2010	2011*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1.399.227.139	2.198.662.228	2.361.186.746	2.739.530.705
Sumatera Utara	1.794.384.366	2.066.194.068	1.991.472.765	2.031.752.186
Sumatera Barat	906.350.514	769.822.721	1.031.743.732	1.117.210.213
Riau	1.461.090.879	1.640.706.475	1.633.624.557	1.831.202.765
Jambi	511.724.076	685.176.280	672.267.047	652.324.655
Sumatera Selatan	1.015.553.590	1.048.976.962	1.167.117.282	1.756.128.503
Bengkulu	316.885.817	393.018.762	521.635.607	574.073.994
Lampung	1.062.018.773	1.053.357.172	968.441.248	1.090.584.311
Bangka Belitung	374.850.548	447.618.758	379.877.151	455.877.667
Kepulauan Riau	378.063.178	478.816.048	525.340.406	570.057.166
DKI Jakarta	6.201.068.273	6.248.430.051	6.972.751.160	9.534.312.666
Jawa Barat	4.543.594.281	5.691.756.883	6.265.732.992	7.120.176.460
Jawa Tengah	3.360.057.527	3.212.099.612	3.796.513.884	3.833.963.415
D.I. Yogyakarta	915.745.609	696.922.383	788.491.846	849.118.418
Jawa Timur	4.322.174.904	4.318.899.232	5.869.745.632	5.797.640.028
Banten	1.165.236.019	1.173.761.522	1.304.622.476	1.764.096.862
Bali	1.024.532.462	1.290.952.454	1.496.158.141	1.721.708.748
Nusa Tenggara Barat	593.847.410	724.553.299	859.304.825	935.732.471
Nusa Tenggara Timur	485.652.667	492.812.023	538.353.060	623.944.785
Kalimantan Barat	561.627.303	750.990.445	774.185.007	888.515.819
Kalimantan Tengah	421.228.751	496.250.002	622.766.793	879.913.775
Kalimantan Selatan	765.453.382	962.700.759	1.142.533.972	1.218.426.010
Kalimantan Timur	3.804.877.592	3.323.786.647	2.936.791.901	3.341.359.242
Sulawesi Utara	498.152.958	518.508.871	632.041.039	689.405.671
Sulawesi Tengah	414.235.264	467.376.968	504.698.487	609.547.717
Sulawesi Selatan	1.322.638.511	1.236.898.965	1.500.511.910	1.847.672.901
Sulawesi Tenggara	448.772.298	446.271.525	597.811.705	742.384.816
Gorontalo	184.400.161	209.993.413	258.083.469	311.594.817
Sulawesi Barat	107.876.721	103.782.681	125.638.652	239.281.336
Maluku	366.660.508	384.430.188	378.672.694	482.308.190
Maluku Utara	268.213.779	233.270.452	242.969.257	224.592.222
Papua Barat	589.067.757	1.421.270.401	1.523.644.287	2.095.780.898
Papua	3.813.102.046	2.962.081.087	2.767.756.097	2.795.993.396
	45.398.365.063	48.150.149.337	53.152.485.827	61.366.212.828

*) Data APBD

Sumber: Statistik Keuangan daerah, BPS (2012)

Tabel 3.15 Jumlah Perda yang Dibatalkan Berdasarkan Provinsi Tahun 2002-2009

Provinsi	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2	-	2	1	1	8	1	30	45
Sumatera Utara	-	7	23	12	18	15	32	92	199
Sumatera Barat	1	4	5	-	5	11	9	27	62
Riau	1	6	10	5	7	7	6	67	109
Jambi	-	5	7	8	4	10	2	70	106
Sumatera Selatan	-	4	9	2	-	10	1	33	59
Bengkulu	7	-	2	3	3	6	1	70	92
Lampung	-	9	11	11	1	1	2	32	67
Kep. Bangka Belitung	-	1	5	2	1	1	6	19	35
Kepulauan Riau	-	-	2	1	-	1	-	11	15
DKI Jakarta	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Jawa Barat	4	6	24	5	2	7	4	86	138
Jawa Tengah	-	6	7	13	6	5	7	79	123
DI Yogyakarta	-	1	-	1	2	5	3	10	22
Jawa Timur	-	15	18	7	1	6	39	66	152
Banten	-	-	5	2	4	7	1	10	29
Bali	-	3	-	1	3	8	4	8	27
Nusa Tenggara Barat	1	5	10	2	6	8	11	26	69
Nusa Tenggara Timur	-	-	6	6	3	5	6	20	46
Kalimantan Barat	1	8	6	6	2	7	2	15	47
Kalimantan Tengah	-	2	11	5	8	5	13	73	117
Kalimantan Selatan	-	5	8	2	2	5	16	25	63
Kalimantan Timur	2	1	10	8	3	3	8	67	102
Sulawesi Utara	-	5	10	1	-	7	4	5	32
Sulawesi Tengah	-	4	14	6	2	2	2	44	74
Sulawesi Selatan	-	5	13	7	22	11	7	31	96
Sulawesi Tenggara	-	-	2	1	3	1	4	44	55
Gorontalo	-	-	6	-	1	3	7	37	54
Sulawesi Barat	-	-	1	-	-	-	1	23	25
Maluku	-	-	2	6	1	2	1	74	86
Maluku Utara	-	3	2	2	-	-	-	33	40
Papua	-	-	1	-	-	1	5	6	13
Papua Barat	-	-	3	-	3	5	24	11	46
Jumlah	19	105	236	126	114	173	229	1244	2246

Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2012)

Tabel 3.16 Jumlah Perda yang Dibatalkan Berdasarkan Tema Tahun 2002 – 2009

Tema	Jumlah								Total	%
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Transportasi dan Perhubungan	-	2	3	2	3	3	1	9	23	1,02
Koperasi	-	-	1	-	-	3	9	3	16	0,71
Pembangunan dan Tata Kota	-	4	2	-	1	1	4	12	24	1,07
Sumbangan, Iuran, dan Pungutan Daerah	2	5	15	4	2	4	2	16	50	2,23
Birokrasi dan Regulasi Daerah	-	2	3	5	7	4	8	53	82	3,65
Peternakan	-	4	-	2	2	4	1	3	16	0,71
Keuangan Daerah	-	2	1	-	1	-	-	2	6	0,27
Retribusi	13	58	158	73	66	116	136	688	1308	58,24
Pajak Daerah	2	7	17	17	8	9	35	213	308	13,71
Perizinan	-	12	17	14	19	15	24	158	259	11,53
Pelabuhan dan Pelayaran	-	4	2	-	-	1	-	4	11	0,49
Lingkungan dan konservasi	-	2	1	2	-	1	1	7	14	0,62
Pengelolaan Sumber daya alam	-	-	-	2	3	3	2	18	28	1,25
Perindustrian dan Perdagangan	2	2	12	5	1	8	5	53	88	3,92
Pengaturan Sosial	-	1	1	-	-	1	1	7	11	0,49
Kelistrikan	-	-	3	-	1	-	-	-	4	0,18
Total	19	105	236	126	114	173	229	1244	2246	100,00

Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2012)

Tabel 3.17 Jumlah Perda yang Dibatalkan Berdasarkan Umur Berlaku, Tahun 2002-2009

Provinsi	Umur (Tahun)												Total
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	-	7	2	7	9	5	9	-	4	-	-	2	45
Sumatera Utara	1	15	23	31	22	19	22	40	6	13	-	7	199
Sumatera Barat	1	1	6	4	3	13	16	4	5	4	-	5	62
Riau	-	9	11	6	18	5	25	10	14	6	2	3	109
Jambi	-	8	8	5	13	12	9	29	8	10	2	2	106
Sumatera Selatan	-	2	8	8	4	8	11	11	1	2	-	4	59
Bengkulu	-	4	7	19	28	2	7	15	1	3	-	6	92
Lampung	-	12	4	11	3	6	7	13	7	2	2	-	67
Kep. Bangka Belitung	-	5	3	6	7	4	2	5	3	-	-	-	35
Kepulauan Riau	-	1	2	2	-	2	-	5	3	-	-	-	15
DKI Jakarta	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Jawa Barat	1	6	14	13	13	14	27	19	18	4	-	9	138
Jawa Tengah	1	15	12	10	18	4	12	24	5	3	4	15	123
DI Yogyakarta	-	2	1	1	5	3	1	2	1	2	-	4	22
Jawa Timur	2	8	20	17	12	22	22	19	6	7	9	8	152
Banten	-	2	3	3	3	7	5	2	4	-	-	-	29
Bali	-	3	1	2	2	3	3	8	-	3	1	1	27
Nusa Tenggara Barat	-	1	14	8	4	7	6	9	11	-	1	8	69
Nusa Tenggara Timur	-	3	3	4	6	3	6	8	4	2	1	6	46
Kalimantan Barat	1	2	10	10	2	5	7	4	1	1	-	4	47
Kalimantan Tengah	6	13	14	10	10	15	7	24	7	6	1	4	117
Kalimantan Selatan	-	2	7	8	7	6	11	4	4	7	2	5	63
Kalimantan Timur	2	3	7	7	13	11	11	23	6	11	1	7	102
Sulawesi Utara	2	1	6	8	5	-	6	2	2	-	-	-	32
Sulawesi Tengah	-	7	3	8	8	1	4	18	25	-	-	-	74
Sulawesi Selatan	1	2	14	13	7	20	13	12	10	1	2	1	96
Sulawesi Tenggara	-	1	3	3	1	17	4	7	9	-	2	8	55
Gorontalo	-	1	-	5	17	2	2	4	-	23	-	-	54
Sulawesi Barat	-	-	1	-	-	1	1	2	6	-	3	11	25
Maluku	-	7	42	2	1	13	13	1	7	-	-	-	86
Maluku Utara	-	12	9	13	1	-	-	1	-	4	-	-	40
Papua	-	-	5	-	4	1	2	1	-	-	-	-	13
Papua Barat	-	-	3	10	6	11	10	2	-	-	-	4	46
Total	18	155	266	255	252	242	281	328	178	114	33	124	2.246

Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri

**Tabel 3.18 Jumlah Perda yang Diminta Klarifikasi
Berdasarkan Provinsi Tahun 2010 – 2011**

Provinsi	2010	2011	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6	9	15
Sumatera Utara	16	44	60
Sumatera Barat	20	32	52
Riau	13	8	21
Jambi	18	10	28
Sumatera Selatan	12	6	18
Bengkulu	6	3	9
Lampung	21	6	27
Kep. Bangka Belitung	4	6	10
Kepulauan Riau	3	4	7
DKI Jakarta	0	0	0
Jawa Barat	22	23	45
Jawa Tengah	39	22	61
D.I.Yogyakarta	9	1	10
Jawa Timur	15	14	29
Banten	16	5	21
Bali	4	13	17
Nusa Tenggara Barat	18	9	27
Nusa Tenggara Timur	8	7	15
Kalimantan Barat	2	6	8
Kalimantan Tengah	30	11	41
Kalimantan Selatan	4	9	13
Kalimantan Timur	13	10	23
Sulawesi Utara	15	6	21
Sulawesi Tengah	11	4	15
Sulawesi Selatan	44	24	68
Sulawesi Tenggara	18	10	28
Gorontalo	0	5	5
Sulawesi Barat	1	0	1
Maluku	6	12	18
Maluku Utara	3	0	3
Papua Barat	1	12	13
Papua	10	18	28
Jumlah	408	349	757

Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2012)

Tabel 3.19 Jumlah Perda yang Diminta Klarifikasi Berdasarkan Tema Tahun 2010-2011

Tema	Tahun		Total	%
	2010	2011		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Retribusi	246	170	416	54.95
Pajak Daerah	60	21	81	10.70
Perizinan	52	24	76	10.04
Perindustrian dan Perdagangan	10	7	17	2.25
Birokrasi dan Regulasi Daerah	5	6	11	1.45
Sumbangan, Iuran dan pungutan daerah	6	71	77	10.17
Pengelolaan Sumber Daya Alam	11	6	17	2.25
Pembangunan dan tata Kota	2	2	4	0.53
Transportasi dan perhubungan	4	4	8	1.06
Koperasi	1	5	6	0.79
Peternakan	0	3	3	0.40
Lingkungan dan Konservasi	3	4	7	0.92
Pelabuhan dan Pelayaran	0	0	0	0.00
Pengaturan Sosial	7	24	31	4.10
Kuangan daerah	0	2	2	0.26
Kelistrikan	1	0	1	0.13
Jumlah	408	349	757	100.00

Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2012)

Tabel 3.20 Jumlah Perda yang Diminta Klarifikasi Berdasarkan Umur Berlaku Tahun 2010 - 2011

Provinsi	Umur (Tahun)												Jumlah
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	0	0	0	1	0	0	7	0	1	4	1	1	15
Sumatera Utara	0	0	1	1	7	3	1	7	7	21	7	5	60
Sumatera Barat	0	1	0	0	2	2	7	8	7	17	4	4	52
Riau	0	0	0	3	1	1	0	1	4	5	3	3	21
Jambi	0	4	0	0	1	0	0	5	10	6	2	0	28
Sumatera Selatan	1	0	0	0	0	3	3	1	5	3	2	0	18
Bengkulu	0	0	0	2	1	1	0	1	2	0	0	2	9
Lampung	2	1	0	0	1	1	2	1	3	3	10	3	27
Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	3	0	0	1	2	1	3	0	10
Kepulauan Riau	0	0	1	0	0	0	1	2	1	1	1	0	7
DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jawa Barat	0	2	1	0	3	3	8	2	5	12	6	3	45
Jawa Tengah	1	2	2	1	3	3	5	5	9	12	7	11	61
D.I.Yogyakarta	0	0	0	0	1	1	1	1	3	1	0	2	10
Jawa Timur	0	0	0	1	0	1	1	3	12	4	6	1	29
Banten	1	0	0	0	2	1	2	1	1	5	6	2	21
Bali	0	0	0	1	0	0	2	1	1	5	2	5	17
Nusa Tenggara Barat	0	3	0	0	2	0	0	5	3	10	4	0	27
Nusa Tenggara Timur	0	0	4	0	0	0	0	2	3	1	2	3	15
Kalimantan Barat	0	0	0	1	0	1	0	2	2	1	0	1	8
Kalimantan Tengah	0	0	0	1	0	6	7	9	11	1	1	5	41
Kalimantan Selatan	0	0	0	0	2	0	3	1	2	0	0	5	13
Kalimantan Timur	0	0	1	1	0	3	5	1	2	2	5	3	23
Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	4	1	2	4	2	3	5	21
Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	5	1	1	1	4	3	0	15
Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	2	2	6	14	15	13	16	68
Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	1	0	2	11	7	1	6	28
Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5
Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Maluku	0	0	2	0	0	0	0	4	9	2	0	1	18
Maluku Utara	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Papua Barat	0	0	4	2	1	2	0	1	1	2	0	0	13
Papua	0	0	0	0	2	6	3	6	1	4	2	4	28
Total	5	14	18	15	32	50	62	82	138	153	97	91	757

Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2012)

3.4. Aparatur Negara

Usaha untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, dilakukan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN & RB) dengan penyempurnaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil (PNS), serta pengembangan pola karir dalam jabatan struktural (Renstra KEMENPAN & RB 2010-2014:8). Langkah memperbanyak tenaga fungsional dan pengembangan sistem penilaian prestasi kerja dapat membantu membangun budaya organisasi yang lebih sehat. Dibandingkan dengan jabatan struktural, jumlah fungsional lebih banyak. Sekalipun demikian, komposisi terbesar adalah jabatan fungsional umum. Berdasarkan jenis kelamin komposisi pegawai negeri sipil terdiri dari 52,84 persen laki-laki dan 47,16 persen perempuan. Proporsi jabatan struktural dan fungsional PNS Tahun 2011 ditampilkan pada Tabel 3.21.

Penataan dan distribusi sumber daya manusia aparatur negara juga mendapat perhatian yang besar. Pada 24 Agustus 2011 ditandatangani surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara untuk moratorium penerimaan PNS yang berlaku dari tanggal 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Rekrutmen PNS baru diproyeksikan melalui analisis kebutuhan jabatan yang ketat serta berbasis kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Beberapa kementerian juga mendorong pilihan pensiun dini untuk meningkatkan produktivitas. Pegawai Negeri terdiri dari tiga elemen, PNS, TNI, dan Polri. Distribusi usia PNS ditampilkan pada Tabel 3.22, dan distribusi pendidikan PNS ditampilkan pada Tabel 3.23.

Jumlah personel dan kepengkatan Polri ditampilkan pada Tabel 3.24. Pegawai Negeri identik dengan pegawai penyelenggara pemerintahan. Akan tetapi tidak semua penyelenggara fungsi pemerintahan merupakan pegawai negeri sebagaimana dijumpai pada jabatan kepala desa. Berbeda dengan lurah yang diangkat bupati/walikota, kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dengan jabatan periodik selama lima tahun. Kepala desa/kelurahan perempuan terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 1.144 orang, melonjak lebih dari dua kali lipat jika dibanding data survei Potensi Desa terakhir pada 2008 dengan jumlah 555 orang. Provinsi Sulawesi Utara merupakan wilayah dengan persentase kepala desa/kelurahan perempuan tertinggi yaitu 14,53 persen. Dewasa ini jabatan kepala desa/kelurahan bukan lagi menjadi dominasi laki-laki, tetapi juga perempuan. Jumlah kepala desa/kelurahan perempuan cenderung terus bertambah. Pada tahun 2011 persentase jumlah kepala desa/kelurahan

sebanyak 4,33%. Tabel 3.25 menyajikan jumlah kepala desa/kelurahan menurut jenis kelamin.

Tabel 3.26 – 3.28 menyajikan karakteristik kepala desa/kelurahan.

Tabel 3.21 Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Jenis Jabatan	Pria		Wanita		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktural	173.944	75,91	55.197	24,09	229.141
Fungsional Tertentu	886.556	44,45	1.108.003	55,55	1.994.559
Fungsional Umum	1.394.572	57,56	1.028.079	42,44	2.422.651
Jumlah	2.455.072	52,84	2.191.279	47,16	4.646.351

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (2011)

Tabel 3.22 Jumlah PNS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Kelompok Umur	Pria		Wanita		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18-20	2.787	62,90	1.644	37,10	4.431
21-25	67.477	38,69	106.923	61,31	174.400
26-30	223.273	43,58	289.036	56,42	512.309
31-35	276.093	47,56	304.483	52,44	580.576
36-40	302.674	50,83	292.738	49,17	595.412
41-45	446.888	52,82	399.139	47,18	846.027
46-50	533.999	56,19	416.293	43,81	950.292
51-55	462.724	62,84	273.632	37,16	736.356
56-50	131.112	55,92	104.141	44,08	236.253
61-65	6.665	67,95	3.143	32,05	9.808
65+	380	78,03	107	21,97	487
Jumlah	2.455.072	52,84	2.191.279	47,16	4.646.351

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (2011)

Tabel 3.23 Jumlah PNS Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Tingkat Pendidikan	Pria		Wanita		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sekolah Dasar	84.171	94,06	5.315	5,94	89.486
SLTP	114.649	88,00	15.636	12,00	130.285
SLTA	886.465	56,97	669.479	43,03	1.555.944
Diploma I	26.296	34,06	50.900	65,94	77.196
Diploma II	268.398	37,88	440.103	62,12	708.501
Diploma III	175.224	40,26	259.989	59,74	435.213
Diploma IV	12.343	65,56	6.485	34,44	18.828
Strata I (S1)	807.975	53,25	709.453	46,75	1.517.428
Strata II (S2)	73.111	69,38	32.246	30,62	105.38
Strata III (S3)	6.440	75,56	1.665	20,44	8.095
Jumlah	2.455.072	52,84	2.191.279	47,16	4.646.351

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (2011)

Tabel 3.24 Jumlah Personel Polri Menurut Kepangkatan Tahun 2010

Pangkat	Mabes		Luar Fungsi		Jumlah	Polda		Jumlah	Jumlah Keseluruhan
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jenderal	1	0	0	0	1	0	0	0	1
Komjen	4	0	1	0	5	0	0	0	5
Irjen	27	0	16	0	43	11	0	11	54
Brigjen	89	1	37	0	127	31	0	31	158
Jumlah Pati	121	1	54	0	176	42	0	42	218
Kombes	543	23	62	2	630	487	4	491	1.121
A K B P	639	238	39	10	926	2.186	234	2.420	3.346
Kompol	528	202	66	19	815	4.495	467	4.962	5.777
Jumlah Pamen	1.710	463	167	31	2.371	7.168	705	7.873	10.244
AKP	763	168	159	19	1.109	12.233	954	13.187	14.296
Iptu	347	56	45	4	452	5.071	390	5.461	5.913
Ipda	536	78	24	2	640	5.524	389	5.913	6.553
Akpol 2009	83	2	0	0	85	351	63	414	499
PPSS 2009	64	17	0	0	81	7	2	9	90
Jumlah Pama	1.793	321	228	25	2.367	23.186	1.798	24.984	27.351
Aiptu	222	10	111	5	348	41.576	1.390	42.966	43.314
Aipda	153	7	52	0	212	11.508	358	11.866	12.078
Bripka	1.153	97	141	12	1.403	49.163	1.170	50.333	51.736
Brigadir	982	89	128	10	1.209	44.172	1.356	45.528	46.737
Briptu	5.175	89	141	7	5.412	94.946	2.301	97.247	102.659
Bripda	1.791	49	127	8	1.975	85.138	2.913	88.051	90.026
Ba Ta. 2009	445	24	0	0	469	4.125	384	4509	4.978
Jumlah Bintara	9.921	365	700	42	11.028	330.628	9.872	340.500	351.528
Abrip	2	0	1	0	3	87	0	87	90
Abriptu	0	0	0	0	0	9	0	9	9
Abripda	0	0	0	0	0	5	0	5	5
Bharaka	2	0	3	0	5	8	0	8	13
Bharatu	1	0	1	0	2	13	0	13	15
Bharada	0	0	0	0	0	7	0	7	7
Jumlah Tamtama	5	0	5	0	10	129	0	129	139
Total	13.545	1.150	1.149	98	15.942	361.024	12.375	373.399	389.341

Sumber: Komisi Kepolisian Nasional (2011)

Tabel 3.25 Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011

Provinsi	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	12.737	99,59	53	0,41	12.790
Sumatera Utara	10.911	95,80	478	4,20	11.389
Sumatera Barat	1.819	93,71	122	6,29	1.941
Riau	3.150	97,55	79	2,45	3.229
Jambi	2.563	97,60	63	2,40	2.626
Sumatera Selatan	5.797	95,93	246	4,07	6.043
Bengkulu	2.724	96,12	110	3,88	2.834
Lampung	4.454	96,05	183	3,95	4.637
Bangka Belitung	654	95,61	30	4,39	684
Kepulauan Riau	607	90,46	64	9,54	671
DKI Jakarta	483	92,00	42	8,00	525
Jawa Barat	11.105	95,68	502	4,32	11.607
Jawa Tengah	15.815	93,25	1.144	6,75	16.959
DI Yogyakarta	817	94,45	48	5,55	865
Jawa Timur	15.484	93,33	1.106	6,67	16.590
Banten	2.920	96,27	113	3,73	3.033
Bali	1.403	98,73	18	1,27	1.421
Nusa Tenggara Barat	1.941	98,58	28	1,42	1.969
Nusa Tenggara Timur	5.417	96,46	199	3,54	5.616
Kalimantan Barat	3.597	97,16	105	2,84	3.702
Kalimantan Tengah	2.825	96,35	107	3,65	2.932
Kalimantan Selatan	3.826	97,90	82	2,10	3.908
Kalimantan Timur	2.769	97,33	76	2,67	2.845
Sulawesi Utara	2.710	85,46	461	14,54	3.171
Sulawesi Tengah	3.325	97,08	100	2,92	3.425
Sulawesi Selatan	5.297	92,60	423	7,40	5.720
Sulawesi Tenggara	3.901	95,57	181	4,43	4.082
Gorontalo	1.175	90,11	129	9,89	1.304
Sulawesi Barat	1.124	97,23	32	2,77	1.156
Maluku	1.671	96,20	66	3,80	1.737
Maluku Utara	2.032	97,46	53	2,54	2.085
Papua Barat	2.568	98,73	33	1,27	2.601
Papua	7.065	98,92	77	1,08	7.142
Indonesia	144.686	95,67	6.553	4,33	151.239

Sumber: Potensi Desa 2011, BPS (2011)

Tabel 3.26 Jumlah Desa Menurut Kelompok Umur Kepala Desa Tahun 2011

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)							
	≤ 24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	4	93	415	1.060	1.691	1.370	913	863
Sumatera Utara	11	195	505	1.129	1.561	1.149	753	418
Sumatera Barat	1	14	51	107	189	223	258	178
Riau	2	52	143	325	436	335	202	141
Jambi	2	29	101	287	403	290	151	85
Sumatera Selatan	3	118	342	688	883	641	306	172
Bengkulu	5	56	174	355	407	279	148	67
Lampung	-	41	166	447	686	514	272	224
Bangka Belitung	1	25	39	54	94	58	54	21
Kepulauan Riau	1	20	33	63	87	86	38	22
DKI Jakarta	-	-	12	58	35	57	82	17
Jawa Barat	1	74	267	715	1.344	1.293	907	1.225
Jawa Tengah	-	102	650	1.193	1.971	2.027	1.360	1.179
DI Yogyakarta	-	-	19	45	88	94	73	111
Jawa Timur	2	141	624	1.417	2.225	2.044	1.136	787
Banten	-	42	103	286	350	398	216	136
Bali	-	7	40	92	184	206	102	82
Nusa Tenggara Barat	2	17	70	175	296	286	145	76
Nusa Tenggara Timur	2	76	200	444	723	685	439	331
Kalimantan Barat	2	68	234	443	574	370	150	90
Kalimantan Tengah	6	60	153	310	432	318	155	76
Kalimantan Selatan	2	67	192	408	600	373	199	119
Kalimantan Timur	2	69	139	239	376	311	174	142
Sulawesi Utara	6	34	85	230	390	394	217	326
Sulawesi Tengah	-	46	128	281	494	365	216	244
Sulawesi Selatan	1	90	192	464	779	650	414	333
Sulawesi Tenggara	3	27	129	370	569	468	287	221
Gorontalo	6	30	45	108	170	147	88	133
Sulawesi Barat	1	25	44	107	192	117	66	70
Maluku	5	34	72	124	154	174	138	260
Maluku Utara	2	28	77	165	265	213	171	141
Papua Barat	11	41	148	226	257	297	199	230
Papua	20	146	394	807	863	806	453	379
Indonesia	104	1.867	5.986	13.222	19.768	17.038	10.482	8.899

Sumber: Potensi Desa 2011, BPS (2011)

Tabel. 3.27 Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Laki-Laki Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011

Provinsi	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMU dan Sederajat	Akademi	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	28	204	352	1.740	3.446	148	462
Sumatera Utara	4	35	87	1.036	3.405	146	736
Sumatera Barat	-	1	1	56	578	71	250
Riau	16	20	36	261	896	61	303
Jambi	-	6	15	210	860	44	179
Sumatera Selatan	8	13	13	603	1.896	76	403
Bengkulu	-	7	7	230	1.001	31	147
Lampung	-	3	13	360	1.507	84	279
Bangka Belitung	-	-	1	40	228	18	45
Kepulauan Riau	1	1	10	64	146	8	87
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	2	234
Jawa Barat	21	8	22	1.078	3.003	287	1.133
Jawa Tengah	11	4	27	1.376	4.192	491	1.792
DI Yogyakarta	-	-	1	31	184	36	150
Jawa Timur	23	14	27	918	4.222	242	2.333
Banten	2	3	9	301	763	26	366
Bali	-	-	-	33	338	33	301
Nusa Tenggara Barat	4	2	2	46	536	64	402
Nusa Tenggara Timur	2	47	60	550	1.644	129	352
Kalimantan Barat	5	20	52	351	1.247	54	142
Kalimantan Tengah	3	18	54	359	834	43	133
Kalimantan Selatan	8	14	42	503	1.111	49	182
Kalimantan Timur	11	65	90	305	642	44	254
Sulawesi Utara	-	10	17	237	820	61	264
Sulawesi Tengah	7	5	14	264	1.154	48	222
Sulawesi Selatan	1	-	10	126	1.258	127	1.154
Sulawesi Tenggara	3	7	7	164	1.291	75	419
Gorontalo	2	4	5	103	439	20	78
Sulawesi Barat	-	2	2	53	335	36	179
Maluku	4	17	51	186	482	53	121
Maluku Utara	3	40	45	226	604	21	86
Papua Barat	63	217	357	349	317	18	69
Papua	533	551	917	803	882	29	99
Indonesia	763	1.338	2.346	12.962	40.261	2.675	13.356

Sumber: Potensi Desa 2011, BPS (2011)

Tabel. 3.28 Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Perempuan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2011

Provinsi	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMU dan Sederajat	Akademi	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	-	-	-	1	24	2	2
Sumatera Utara	-	-	4	18	164	18	68
Sumatera Barat	-	-	-	2	40	5	17
Riau	-	-	-	2	16	1	24
Jambi	-	-	1	3	18	2	10
Sumatera Selatan	1	1	-	16	70	6	47
Bengkulu	1	-	-	5	51	1	10
Lampung	-	-	1	13	60	-	30
Bangka Belitung	-	-	-	2	8	-	4
Kepulauan Riau	-	-	-	-	6	4	23
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	2	23
Jawa Barat	1	1	-	32	157	19	64
Jawa Tengah	-	2	2	86	312	50	137
DI Yogyakarta	-	-	-	2	9	2	15
Jawa Timur	3	1	4	73	306	28	182
Banten	-	-	-	10	29	2	20
Bali	-	-	-	1	3	-	4
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	2	1	8
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	9	75	6	26
Kalimantan Barat	-	-	-	10	38	2	10
Kalimantan Tengah	-	-	-	8	45	1	12
Kalimantan Selatan	-	-	-	10	27	1	13
Kalimantan Timur	-	-	-	6	15	-	20
Sulawesi Utara	-	-	-	8	153	18	94
Sulawesi Tengah	-	-	-	3	39	2	16
Sulawesi Selatan	-	-	-	8	98	18	123
Sulawesi Tenggara	-	-	-	5	67	7	29
Gorontalo	-	-	-	3	58	5	10
Sulawesi Barat	-	-	-	1	10	-	4
Maluku	-	-	-	2	15	6	24
Maluku Utara	-	-	2	2	13	1	19
Papua Barat	1	2	-	1	2	-	13
Papua	7	3	6	4	18	1	15
Indonesia	14	10	20	346	1.948	211	1.116

Sumber: Potensi Desa 2011, BPS (2011)

3.5. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam konfigurasi politik yang demokratis, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kehendak-kehendak rakyat dengan cara merumuskan kebijakan yang demokratis dan bekerja secara proporsional (Ibrahim, 2009:8). Indonesia telah menempuh berbagai langkah untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Dari aspek regulasi didukung dengan pengesahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang berisi pengaturan agar struktur lembaga dapat efektif dan efisien. Demikian juga dengan disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hingga saat ini belum terdapat data yang dapat memberikan gambaran tentang kualitas tata kelola Pemerintah Provinsi yang dapat dibandingkan dalam skala nasional. Beberapa lembaga negara pernah melakukan, namun tidak mewakili semua provinsi, sebagian di antaranya bahkan hanya berfokus pada jenis layanan yang disediakan birokrasi. Untuk membantu memberikan gambaran, dapat dilihat dari sedikitnya kasus korupsi yang terjadi di sebuah provinsi. Di sisi lain tuntutan akan pelayanan birokrasi yang semakin baik terus menjadi tantangan bagi pemerintah. Gairah tersebut paling kurang bisa dilihat dari laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi kepada KPK yang hingga tujuh tahun terakhir sudah mencapai 51.592 laporan yang berasal dari seluruh provinsi Tabel 3.29. Laporan paling banyak berasal dari Provinsi DKI Jakarta dengan 9.507 laporan, Jawa Timur dengan 5003 laporan, dan Sumatera Utara dengan 4.648.

Laporan tentang potensi tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh pejabat negara, dengan melaporkan gratifikasi yang mereka terima. Mayoritas laporan berasal dari Provinsi DKI Jakarta dengan 1002 laporan, dan Provinsi Jawa Barat dengan 238 laporan. Di luar provinsi tersebut jumlah laporan gratifikasi jauh lebih kecil, tidak ada yang lebih dari 25 laporan. Bahkan di tujuh provinsi tidak pernah ada laporan gratifikasi diterima KPK (Tabel 3.30). Di antara angka tersebut pelapor paling banyak berasal dari sektor BUMN/BUMD dengan 1.057 laporan dan pemerintah daerah dengan 106 laporan (Tabel 3.31).

Berdasarkan jenis korupsi yang ditangani KPK tahun 2004 - 2011, jumlah paling banyak berupa korupsi pengadaan barang dan jasa dengan 96 kasus dan penyuaian sebanyak 82 kasus (Tabel 3.32). Berdasarkan jabatan pelaku, pada rentang tahun yang sama, korupsi paling banyak dilakukan oleh pejabat eselon I, II, dan III dengan 91 kasus dan pihak swasta dengan 55 kasus (Tabel 3.33).

Berdasarkan data Kejaksaan Agung, sepanjang tahun 2011 terdapat 1.169 kasus korupsi yang masuk tahap penuntutan di semua provinsi dengan jumlah penyelamatan kerugian negara sebesar Rp 198.211.013.791 dan US\$ 6.760, 69 (Tabel 3.35). Dari jumlah tersebut, jumlah penuntutan terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur dengan 102 kasus. Jumlah penyelamatan kerugian terbanyak di Provinsi Sumatera Utara dengan Rp. 65.653.171.299. Sekalipun demikian, besarnya kerugian negara tidak tercermin dalam putusan terpidana korupsi. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung (2012), pada tahun 2011 mayoritas koruptor dipidana dengan hukuman 1-2 tahun (59,01 persen), 3-5 tahun (19,54 persen), dan bebas (16,70 persen). Angka ini tidak jauh berbeda dengan putusan sepanjang 2010, dimana mayoritas koruptor (60,68 persen) dihukum pidana 1-2 tahun (Tabel 3.34).

Ukuran lain yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun oleh BPS. IPM diukur dari tiga indikator yaitu angka harapan hidup, persentase melek aksara orang dewasa dikombinasikan dengan angka partisipasi (kotor) sekolah bagi anak, serta *Gross Domestic Product* (GDP). Sejak tahun 2010, indikator IPM yang terdiri dari angka harapan hidup, lama harapan sekolah dikombinasikan dengan lama rata-rata sekolah, dan *Gross National Income* (GNI) per-kapita. Dalam konteks otonomi daerah, IPM dapat menjadi takaran keberhasilan pemerintahan daerah. Lebih lagi sejak kepala daerah dipilih secara langsung, komitmen-komitmen politik kepala daerah dapat diukur dengan membandingkan capaian IPM. Secara umum dampak otonomi daerah positif terhadap perkembangan IPM di tingkat provinsi. Hampir semua daerah mengalami kenaikan indeks setiap tahunnya (Tabel 3.36). Kondisi tersebut juga berkontribusi langsung terhadap IPM nasional yang juga mengalami kenaikan setiap tahun.

Selama enam tahun terakhir peringkat teratas IPM diraih oleh Provinsi DKI Jakarta (1), Provinsi Sulawesi Utara (2), Provinsi Riau (3), D.I Yogyakarta (4), dan Kalimantan Timur (5). Sebaliknya, Provinsi Papua (33), NTB (32), NTT (31), Maluku Utara (30) dan Papua Barat (29) adalah lima provinsi dengan IPM berada di peringkat paling bawah selama empat tahun terakhir (Tabel 3.37).

**Tabel 3.29 Jumlah Pengaduan Masyarakat tentang Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Provinsi Tahun 2004 - 2011**

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	57	147	202	127	99	140	100	90	962
Sumatera Utara	201	694	621	516	815	634	617	550	4648
Riau	86	234	195	209	277	254	181	173	1609
Kepulauan Riau	41	102	97	142	85	77	96	64	704
Sumatera Barat	34	133	100	113	178	136	135	102	931
Sumatera Selatan	140	413	389	259	323	344	262	262	2392
Bangka Belitung	10	35	32	46	54	29	37	46	289
Jambi	59	139	115	139	216	176	141	144	1129
Bengkulu	24	81	93	81	103	64	97	113	656
Lampung	35	183	130	161	189	145	121	143	1107
Jawa barat	139	485	626	581	718	545	477	570	4141
Banten	45	126	145	125	149	127	115	136	968
Kalimantan Selatan	50	148	133	145	137	131	110	69	923
Kalimantan Tengah	21	108	112	91	131	107	97	111	778
Kalimantan Barat	58	148	109	79	156	119	80	97	846
Kalimantan Timur	82	283	244	252	209	190	153	168	1581
DKI Jakarta	404	1311	1428	1181	1270	1422	1295	1196	9507
D.I. Yogyakarta	19	97	70	86	75	62	57	91	557
Jawa Tengah	132	542	407	483	555	496	444	361	3420
Jawa Timur	217	792	606	612	773	874	603	526	5003
Sulawesi Utara	39	93	64	89	124	116	69	83	677
Sulawesi Selatan	71	243	209	202	288	179	214	196	1602
Sulawesi Tengah	26	62	81	71	63	51	51	40	445
Sulawesi Tenggara	27	62	70	74	75	73	39	70	490
Gorontalo	10	25	27	45	41	55	41	42	285
Papua	50	114	80	74	100	101	77	85	681
Bali	27	99	81	76	107	82	77	88	637
Nusa Tenggara Barat	64	120	160	131	153	139	96	90	953
Nusa Tenggara Timur	36	144	81	67	136	110	115	112	801
Maluku Utara	14	48	41	43	41	39	46	68	340
Maluku	26	61	66	60	102	63	86	83	547
Papua Barat	6	36	29	52	26	28	54	56	287
Sulawesi Barat	18	32	21	47	54	37	45	24	278
Luar Negeri	13	21	47	17	4	8	6	4	120
Tidak Spesifik	-	-	28	34	873	93	31	239	1298
Jumlah	2281	7361	6939	6510	8699	7246	6265	6291	51592

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2011

Tabel 3.30 Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima KPK Tahun 2011

No	Provinsi	Laporan
(1)	(2)	(3)
1	Aceh	4
2	Sumatera Utara	11
3	Riau	3
4	Kepulauan Riau	1
5	Sumatera Barat	3
6	Sumatera Selatan	2
7	Kepulauan Bangka Belitung	2
8	Jambi	-
9	Bengkulu	4
10	Lampung	8
11	Jawa Barat	238
12	Banten	3
13	Kalimantan Selatan	-
14	Kalimantan Tengah	3
15	Kalimantan Barat	6
16	Kalimantan Timur	6
17	DKI Jakarta	1002
17	DKI Jakarta Pemda	4
18	D. I. Yogyakarta	5
19	Jawa Tengah	25
20	Jawa Timur	9
21	Sulawesi Utara	1
22	Sulawesi Selatan	22
23	Sulawesi Tengah	-
24	Sulawesi Tenggara	1
25	Gorontalo	2
26	Papua	2
27	Bali	3
28	Nusa Tenggara Barat	-
29	Nusa Tenggara Timur	2
30	Maluku Utara	1
31	Maluku	-
32	Irian Jaya Barat	-
33	Sulawesi Barat	-
Jumlah		1373

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2011

Tabel 3.31 Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima KPK Berdasarkan Lembaga Tahun 2011

No.	Bidang	Instansi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Legislatif	MPR / DPR	18
		DPRD	28
2.	Eksekutif	DPD	-
		Kepresidenan	2
		Kementerian	-
		Kementerian Koordinator	4
		Departemen	61
		Kementerian Negara	8
		Setingkat kementerian	16
		LPND	19
		Lembaga ekstra struktural	6
		Pemda	106
3.	Yudikatif		9
4.	Lembaga independen		39
5.	BUMN / BUMD		1057
Total			1373

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2011

Tabel 3.32 Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004 – 2011

Jenis Perkara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pengadaan Barang / Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	96
Perizinan	-	-	5	1	3	1	-	0	10
Penyuapan	-	7	2	4	13	12	19	25	82
Pungutan	-	-	7	2	3	-	-	0	12
Penyalahgunaan Anggaran	-	-	5	3	10	8	5	4	35
Jumlah	2	-	27	24	47	37	40	39	235

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2011

Tabel 3.33 Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2005-2011

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Anggota DPR dan DPRD	-	-	-	2	7	8	27	5	49
Kepala Lembaga / Kementerian	-	1	1	-	1	1	2	-	6
Duta Besar	-	-	-	2	1	-	1	-	4
Komisioner	-	3	2	1	1	-	-	-	7
Gubernur	1	-	2	-	2	2	1	-	8
Wali Kota/Bupati dan Wakil	-	-	3	7	5	5	4	5	29
Eselon I, II, III	2	9	15	10	22	14	12	7	91
Hakim	-	-	-	-	-	-	1	3	4
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	11	55
Lain-lain	-	6	1	2	4	4	9	5	31
Jumlah	4	23	29	27	55	45	65	36	284

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2011

Tabel 3.34 Jumlah Vonis Kasus Korupsi yang Diputus MA pada Tingkat Kasasi Menurut Masa Hukuman Tahun 2010 - 2011

Masa Hukuman	2010		2011	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 1 Tahun	28	6,33	9	1,71
1 - 2 Tahun	269	60,68	311	59,01
3 - 5 Tahun	87	19,68	103	19,54
6 - 10 Tahun	13	2,94	15	2,85
> 10 Tahun	2	0,45	1	0,19
Seumur Hidup	0	0	0	0,00
Mati	0	0	0	0,00
Bebas	43	9,73	88	16,70
Jumlah	442	100	527	100

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011

Tabel 3.35 Rekapitulasi Data Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Seluruh Indonesia Tahun 2011

Kejaksaan	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan	Penyelamatan Keuangan Negara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kejagung	111	105	68	Rp27.294.538.287 dan US\$ 6.760, 69
Aceh	6	29	25	Rp368.406.000
Sumatera Utara	73	55	44	Rp65.653.171.299
Sumatera Barat	10	22	28	Rp2.584.389.466
Riau	6	20	39	Rp8.479.222.647
Jambi	9	45	25	Rp928.875.981
Sumatera Selatan	35	22	24	Rp1.088.889.636
Bengkulu	9	25	31	Rp1.313.689.652
Lampung	31	27	36	Rp152.500.000
DKI Jakarta	12	13	17	Rp175.000.000
Jawa Barat	56	63	59	Rp4.304.612.958
Jawa Tengah	26	127	65	Rp3.024.317.039
DI Yogyakarta	9	20	13	-
Jawa Timur	79	162	102	Rp12.552.397.479
Bali	10	31	11	Rp950.000.000
Nusa Tenggara Barat	11	12	14	Rp773.499.039
Nusa Tenggara Timur	20	40	31	Rp1.095.605.376
Kalimantan Barat	9	70	24	Rp981.000.000
Kalimantan Tengah	9	32	34	Rp9.870.007.704
Kalimantan Selatan	8	40	47	Rp1.599.532.636
Kalimantan Timur	17	71	59	Rp3.936.355.352
Sulawesi Utara	19	31	18	Rp3.087.000.000
Sulawesi Tengah	28	58	41	Rp700.151.000
Sulawesi Tenggara	20	20	18	Rp5.179.000.000
Sulawesi Selatan	26	98	90	Rp3.939.938.986
Maluku	11	54	54	Rp3.707.464.037
Papua	8	116	39	Rp17.750.367.732
Banten	9	17	21	Rp3.704.568.175
Bangka Belitung	12	14	44	Rp385.164.000
Gorontalo	4	24	23	Rp1.015.000.000
Maluku Utara	7	13	16	Rp11.616.349.310
Kepulauan Riau	7	15	9	-
Jumlah	707	1491	1169	Rp198.211.013.791 dan US\$ 6.760, 69

Sumber: Laporan Tahunan Kejaksaan RI (2012)

Tabel 3.36 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional 1996 - 2010

Provinsi	1996	1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	69.4	65.3	66.0	68.7	69.05	69.41	70.35	70.76	71.31	71.70
Sumatera Utara	70.5	66.6	68.8	71.4	72.03	72.46	72.78	73.29	73.80	74.19
Sumatera Barat	69.2	65.8	67.5	70.5	71.19	71.65	72.23	72.96	73.44	73.78
Riau	70.6	67.3	69.1	72.2	73.63	73.81	74.63	75.09	75.60	76.07
Jambi	69.3	65.4	67.1	70.1	70.95	71.29	71.46	71.99	72.45	72.74
Sumatera Selatan	68.0	63.9	66.0	69.6	70.23	71.09	71.40	72.05	72.61	72.95
Bengkulu	68.4	64.8	66.2	69.9	71.09	71.28	71.57	72.14	72.55	72.92
Lampung	67.6	63.0	65.8	68.4	68.85	69.38	69.78	70.30	70.93	71.42
Bangka Belitung	-	-	65.4	69.6	70.68	71.18	71.62	72.19	72.55	72.86
Kepulauan Riau	-	-	-	70.8	72.23	72.79	73.68	74.18	74.54	75.07
DKI Jakarta	76.1	72.5	75.6	75.8	76.07	76.33	76.59	77.03	77.36	77.60
Jawa Barat	68.2	64.6	65.8	69.1	69.93	70.32	70.71	71.12	71.64	72.29
Jawa Tengah	67.0	64.6	66.3	68.9	69.78	70.25	70.92	71.60	72.10	72.49
DI Yogyakarta	71.8	68.7	70.8	72.9	73.50	73.70	74.15	74.88	75.23	75.77
Jawa Timur	65.5	61.8	64.1	66.8	68.42	69.18	69.78	70.38	71.06	71.62
Banten	-	-	66.6	67.9	68.80	69.11	69.29	69.70	70.06	70.48
Bali	70.1	65.7	67.5	69.1	69.78	70.07	70.53	70.98	71.52	72.28
NTB	56.7	54.2	57.8	60.6	62.42	63.04	63.71	64.12	64.66	65.20
NTT	60.9	60.4	60.3	62.7	63.59	64.83	65.36	66.15	66.60	67.26
Kalimantan Barat	63.6	60.6	62.9	65.4	66.20	67.08	67.53	68.17	68.79	69.15
Kalimantan Tengah	71.3	66.7	69.1	71.7	73.22	73.40	73.49	73.88	74.36	74.64
Kalimantan Selatan	66.3	62.2	64.3	66.7	67.44	67.75	68.01	68.72	69.30	69.92
Kalimantan Timur	71.4	67.8	70.0	72.2	72.94	73.26	73.77	74.52	75.11	75.56
Sulawesi Utara	71.8	67.1	71.3	73.4	74.21	74.37	74.68	75.16	75.68	76.09
Sulawesi Tengah	66.4	62.8	64.4	67.3	68.47	68.85	69.34	70.09	70.70	71.14
Sulawesi Selatan	66.0	63.6	65.3	67.8	68.06	68.81	69.62	70.22	70.94	71.62
Sulawesi Tenggara	66.2	62.9	64.1	66.7	67.52	67.80	68.32	69.00	69.52	70.00
Gorontalo	-	-	64.1	65.4	67.46	68.01	68.83	69.29	69.79	70.28
Sulawesi Barat	-	-	-	64.4	65.72	67.06	67.72	68.55	69.18	69.64
Maluku	68.2	67.2	66.5	69.0	69.24	69.69	69.96	70.38	70.96	71.42
Maluku Utara	-	-	65.8	66.4	66.95	67.51	67.82	68.18	68.63	69.03
Papua Barat	-	-	-	63.7	64.83	66.08	67.28	67.95	68.58	69.15
Papua	60.2	58.8	60.1	60.9	62.08	62.75	63.41	64.00	64.53	64.94
Indonesia (BPS)	67.7	64.3	65.8	68.7	69.57	70.10	70.59	71.17	71.76	72.27

Sumber: Badan Pusat Statistik (2011)

Tabel 3.37 Ranking Indeks Pembangunan Manusia Provinsi 1996 - 2010

Provinsi	1996	1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	9	12	15	18	18	18	17	17	17	17
Sumatera Utara	7	8	7	7	8	8	8	8	8	8
Sumatera Barat	11	9	8	9	9	9	9	9	9	9
Riau	6	4	5	5	3	3	3	3	3	3
Jambi	10	11	10	10	11	10	12	13	13	13
Sumatera Selatan	15	16	16	13	13	13	13	12	10	10
Bengkulu	12	13	14	11	10	11	11	11	12	11
Lampung	16	18	18	19	19	19	20	20	21	20
Bangka Belitung	-	-	20	12	12	12	10	10	11	12
Kepulauan Riau	-	-	-	8	7	7	6	6	6	6
DKI Jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jawa Barat	14	15	17	14	14	14	15	15	15	15
Jawa Tengah	17	14	13	17	16	15	14	14	14	14
DI Yogyakarta	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4
Jawa Timur	22	22	25	23	22	20	19	18	18	18
Banten	-	-	11	20	20	21	23	23	23	23
Bali	8	10	9	15	15	16	16	16	16	16
NTB	26	26	30	33	32	32	32	32	32	32
NTT	24	24	28	31	31	31	31	31	31	31
Kalimantan Barat	23	23	27	27	28	28	29	29	28	28
Kalimantan Tengah	5	7	6	6	5	5	7	7	7	7
Kalimantan Selatan	19	21	23	24	26	26	26	26	26	26
Kalimantan Timur	4	3	4	4	6	6	5	5	5	5
Sulawesi Utara	3	6	2	2	2	2	2	2	2	2
Sulawesi Tengah	8	20	22	22	21	22	22	22	22	22
Sulawesi Selatan	21	17	21	21	23	23	21	21	20	26
Sulawesi Tenggara	20	19	26	25	24	25	25	25	25	25
Gorontalo	-	-	24	28	25	24	24	24	24	24
Sulawesi Barat	-	-	-	29	29	29	28	27	27	27
Maluku	13	5	12	16	17	17	18	19	19	21
Maluku Utara	-	-	19	26	27	27	27	28	29	30
Papua Barat	-	-	-	30	30	30	30	30	30	29
Papua	25	25	29	32	33	33	33	33	33	33

Sumber: Badan Pusat Statistik (2011)

LEMBAGA DEMOKRASI

4

<http://www.pps.go.id>

4.1 Lembaga Demokrasi

Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu, kelompok, individu dengan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah. Dalam demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang relatif merata di antara kelompok sosial dan organisasi pemerintah. Situasi ini akan menimbulkan persaingan dan saling kontrol antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga pemerintah yang lain (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), dan antara kelompok sosial dan lembaga pemerintah (Surbakti, 2008:290-291).

Dalam konsepsi tersebut peran politis rakyat di luar pemerintah dijamin dan merupakan bagian penting dalam esensi demokrasi. Demokrasi bahkan disimpulkan dengan konsep "rakyat memerintah sendiri," artinya para warga negara tidak hanya menerima atau menolak hasil-hasil keputusan pemilihan umum, melainkan juga melakukan kontrol atas keputusan-keputusan pemerintahan yang terbentuk dari pemilihan umum tersebut. Penilaian terhadap proses demokrasi menjadi kebutuhan dan tidak bisa dilihat hanya sekedar dari keikutsertaan dalam pemilihan umum. Proses antar pemilihan umum yang satu dengan yang lain juga dilihat sebagai proses-proses demokratis, karena di antara kedua pemilihan umum dapat terjadi berbagai hal yang menghasilkan kesenjangan antara keputusan-keputusan pemilihan umum dengan keputusan konkret pemerintah. Pada proses tersebut warga negara memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada (Hardiman, 2009:127-133).

Pada titik ini peran lembaga-lembaga yang merepresentasi kepentingan politik beragam kelompok menjadi salah satu kunci keberhasilan demokrasi. Lembaga tersebut bisa merupakan lembaga yang berada di dalam pemerintahan melalui jalur-jalur politik formal. Pada kondisi jalur politik formal terhambat, aspirasi bisa disampaikan melalui perantara lembaga di luar pemerintahan. Warga akan menyampaikan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama (Almond, 1974 dalam Mas'ood & MacAndrews, 2008:65). Kelompok atau lembaga-lembaga itu yang akan berperan menjembatani kepentingan warga atau kelompoknya dengan pemerintah melalui berbagai mekanisme.

4.2. Partai Politik

Demokrasi berdiri berdasarkan logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Persetujuan memerlukan perwakilan yang hanya dapat diperoleh melalui pemilihan umum. Gagasan tersebut yang menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi. Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara (Dahl, 1999 dalam Safa'at, 2011:6-7). Organ-organ negara tersebut diperoleh melalui hasil-hasil pemilihan umum yang diikuti partai politik, sehingga peran partai politik sangat krusial. Partai politik menjadi pangkal dari sebuah pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan di masa depan. Menurut Carl Friedrich partai politik merupakan kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materiil dan diidil kepada para anggotanya (Surbakti, 2010:148).

Pada Pasal 1 UUU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang disebutkan Almond dan Powell sebagai; rekrutmen politik, sosialisasi politik, serta artikulasi dan agregasi kepentingan (Safa'at, 2011: 66). Terkait dengan itu jumlah partai politik dalam sebuah negara akan sangat berpengaruh pada peran parpol di sebuah negara.

Dilihat dari jumlahnya, sistem kepartaian dapat digolongkan dalam tiga bentuk, sistem partai tunggal, dua partai dan bersaing, dan sistem banyak partai. Indonesia sendiri memiliki sistem kepartaian banyak partai. Sistem ini dicirikan dengan sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Setiap golongan dalam masyarakat cenderung memelihara keterikatan dengan asal-usul budayanya dan memperjuangkan kepentingan melalui wadah politik tersendiri (Surbakti, 2010: 161). Sistem multipartai biasanya diperkuat dengan sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang memberikan kesempatan luas bagi partai-partai kecil (Safa'at, 2011: 62).

Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki jumlah partai yang beragam dalam setiap Pemilu. Pada Pemilu tahun 1955 jumlah partai politik sebanyak 49, tahun 1971 sebanyak 10, tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 masing-masing 3 partai politik, tahun 1999 sebanyak 48,

tahun 2004 sebanyak 24, dan tahun 2009 sebanyak 38 partai politik (Grafik 4.1). Dalam rentang itu juga terdapat sejumlah pembubaran, fusi, atau pembekuan partai politik (Tabel 4.1).

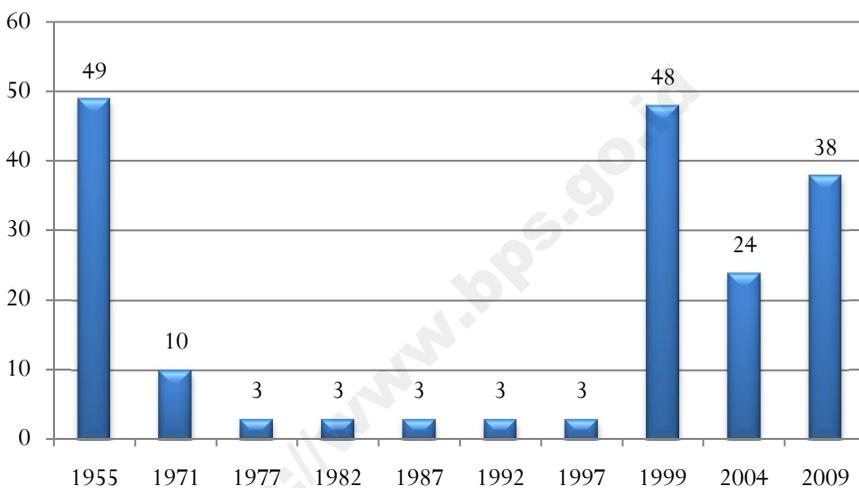
Pada Pemilu pertama di era reformasi tahun 1999, partai politik yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM sebanyak 148 partai akan tetapi hanya 48 di antaranya yang menjadi peserta Pemilu. Pada Tahun 2004, jumlah partai yang terdaftar meningkat menjadi 261 partai dan hanya 24 partai yang menjadi peserta Pemilu. Pada Pemilu 2009 Departemen Hukum dan HAM mendaftar sebanyak 64 partai politik namun demikian hanya 38 di antaranya yang dinyatakan lolos verifikasi KPU sehingga berhak menjadi peserta Pemilu (Tabel 4.2). Berbeda dengan masa Orde Baru dimana partai politik harus berasas tunggal Pancasila, saat ini partai politik diperbolehkan mempunyai asas dan ciri yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik. Hal tersebut diperbolehkan selama asas dan ciri partai politik tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan merupakan penjabaran dari keduanya. Pasca-Orde Baru asas partai politik sudah mulai beragam, namun demikian Pancasila masih mendominasi sebagai asas partai politik (Tabel 4.3).

Pemilu tahun 1999 diikuti sebanyak 48 partai politik, sedangkan pada Pemilu tahun 2004 sebanyak 24 partai politik. Tidak semua partai politik peserta Pemilu 1999 otomatis dapat menjadi peserta Pemilu, kecuali yang memenuhi *electoral threshold* dengan memperoleh kursi minimal 2 persen dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurangnya tiga persen jumlah kursi DPRD II yang tersebar sekurangnya di setengah jumlah provinsi di setengah jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasar hasil pemilu (pasal 3 & 4 UU No. 3/1999). Pada Pemilu tahun 1999 juga dikenal mekanisme penggabungan suara (*stembus accord*) untuk memenuhi harga suara yang ditentukan untuk setiap kursi di DPR. Bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak boleh ikut Pemilu 2004, atau bergabung dengan parpol lain sehingga memenuhi perolehan suara minimal. Hasil dari ketentuan tersebut hanya 6 partai politik peserta Pemilu 1999 yang lolos *electoral threshold*, sehingga secara otomatis menjadi partai politik peserta Pemilu 2004.

Pada Pemilu Tahun 2009, peserta Pemilu bertambah dari 24 pada Pemilu 2004 menjadi 38 partai politik. Ketentuan yang berlaku pada Pemilu ketiga di era reformasi adalah partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pada Pemilu berikutnya. Dengan ketentuan tersebut maka peserta Pemilu 2009 adalah partai politik peserta Pemilu 2004 ditambah dengan partai-partai baru yang memenuhi persyaratan. Pada Pemilu 2009 juga diatur tentang batas suara minimal untuk dapat masuk ke parlemen (*parliamentary threshold*) atau

yang biasa disingkat dengan PT. Besaran PT yang ditetapkan sebesar 2,5% dari perolehan suara nasional. Komposisi parlemen hasil pemilihan umum tahun 2004 dianggap memiliki partai politik terlalu banyak sehingga perlu disederhanakan dengan PT. Ketentuan ini hanya di tingkat nasional, namun tidak berlaku pada pemilihan parlemen tingkat provinsi, serta kabupaten/kota. Kebijakan ini membuat partai-partai yang pada Tahun 2009 memiliki kursi DPR kabupaten/kota atau DPR provinsi, tetapi suaranya kurang dari 2,5% tidak dapat masuk DPR (Tabel 4.4).

Grafik 4.1 Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu 1955 – 2009



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Tabel 4.1. Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Klasifikasi	Bentuk dan Praktek	Rujukan Hukum
(1)	(2)	(3)
Tidak diakuinya parpol yang telah ada	PSII Abikusno, PRN Bebas, PRI PRN Djody	Penpres No 7 1959 Keppres No. 129 Tahun 1961
Pembubaran sebagai konsekuensi kebijakan fusi parpol	Fusi PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik menjadi Partai Indonesia Perjuangan Fusi Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti menjadi Partai Persatuan Pembangunan	Tap MPRS No XXII/1966/ dan Tap MPR No IV/1973, diwujudkan dengan UU No 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Perintah membubarkan diri	Pembubaran Masyumi Pembubaran PSI	Keppres No.200/1960 Keppres No. 201 1960
Pembubaran oleh Pemerintah	Pembubaran PKI	Keppres No 1/3/1966.
Pembubaran berdasarkan putusan pengadilan	Gugatan pembubaran Partai Golkar di MA	Perkara 01.G/WPP/2000 dan 02.G/WPP/2001 ditolak
Pembekuan Partai Politik	Partai Murba Partindo Partai Golkar	Keppres No 21/1965 Keppres No 57/1968 Maklumat Presiden 23 Juli 2001

Sumber: Diolah dari Safa'at (2011:323-324)

Tabel 4.2 Jumlah Partai Politik yang Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan Status Partai Pada Pemilu Tahun 1999-2009

Status Partai	1999	2004	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peserta Pemilu	48	24	38
2. Tidak Lolos Verifikasi KPU	93	26	13
3. Dibatalkan sebagai Badan Hukum	-	153	-
4. Tidak Memenuhi Persyaratan	7	58	13
Jumlah	148	261	64

Sumber: Diolah dari Kemenkumham (2010)

**Tabel 4.3. Banyaknya Partai Politik Peserta Pemilu
Berdasarkan Asas Partai**

Asas Partai	Tahun Pemilu		
	1999	2004	2009 ^{a)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pancasila	34	12	24
2. Pembukaan UUD 1945	-	1	-
3. Pancasila dan UUD 1945	-	2	3
4. Keadilan, Demokrasi, dan Kemajemukan serta Pancasila	-	1	1
5. Kekeluargaan dan Gotong Royong	-	1	1
6. Islam	9	5	7
7. Al Qur'an dan Hadits	1	-	-
8. Marhaenisme	-	2	1
9. Pancasila dan Aqidah Islam	1	-	-
10. Sosial Demokrasi Kerakyatan	2	-	-
11. Demokrasi Religius	1	-	-
12. Nasionalisme	-	-	1
Jumlah	48	24	38

^{a)} Tidak termasuk 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (2010)

Tabel 4.4 Persentase Perolehan Suara Nasional Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2009 (1/6)

Provinsi	Partai Politik						
	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Karya Peduli Bangsa	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	Partai Peduli Rakyat Nasional	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Barisan Nasional	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	2,4	1,2	0,9	1,3	2,0	0,9	1,7
Sumatera Utara	3,6	1,0	0,7	3,3	3,2	0,8	1,0
Sumatera Barat	3,8	1,4	0,7	0,8	4,3	0,4	1,2
Riau	3,2	1,1	0,6	2,2	3,7	0,7	0,6
Jambi	6,7	2,5	0,7	1,5	4,0	1,0	0,7
Sumatera Selatan	4,5	1,7	0,7	1,3	6,0	1,7	1,2
Bengkulu	5,0	2,2	1,0	2,6	4,3	1,1	2,9
Lampung	4,5	2,7	0,8	1,1	5,5	0,6	1,3
Kepulauan Bangka Belitung	3,4	1,1	0,6	1,0	4,1	0,6	0,6
Kepulauan Riau	3,4	0,9	0,5	4,3	2,9	0,6	1,1
DKI Jakarta	2,3	0,4	0,2	0,4	5,7	0,3	0,4
Jawa Barat	3,3	1,8	0,6	0,9	4,8	0,6	0,8
Jawa Tengah	3,4	1,4	0,7	1,1	5,0	0,6	0,6
DI Yogyakarta	2,4	1,7	0,8	0,9	4,5	0,5	0,4
Jawa Timur	3,5	0,6	0,6	0,9	5,1	0,6	0,7
Banten	4,2	1,8	0,7	1,1	4,7	0,8	0,9
Bali	2,1	1,5	1,5	0,9	2,8	0,4	0,8
Nusa Tenggara Barat	4,7	2,4	1,3	2,0	3,8	0,9	1,1
Nusa Tenggara Timur	4,8	1,7	1,3	1,9	5,2	1,0	1,8
Kalimantan Barat	3,6	1,9	0,8	0,8	2,9	1,4	1,2
Kalimantan Tengah	4,7	1,2	0,9	1,2	4,2	0,8	1,4
Kalimantan Selatan	4,0	1,7	0,7	1,5	4,5	0,6	0,8
Kalimantan Timur	3,1	1,0	0,9	0,9	4,8	0,6	0,8
Sulawesi Utara	2,3	1,0	0,5	0,8	2,9	2,2	1,6
Sulawesi Tengah	6,4	2,4	0,8	2,6	4,2	0,7	2,0
Sulawesi Selatan	4,7	1,3	0,7	1,2	3,5	0,8	1,2
Sulawesi Tenggara	4,7	2,8	1,0	3,2	1,9	1,2	1,1
Gorontalo	11,9	1,0	0,5	1,3	2,1	0,0	0,4
Sulawesi Barat	2,7	1,6	3,0	1,4	2,3	0,7	0,8
Maluku	5,8	1,0	0,5	0,6	2,7	0,9	2,6
Maluku Utara	6,8	1,2	0,9	1,3	4,2	1,3	0,6
Papua Barat	2,9	1,1	1,1	1,8	2,2	1,6	0,4
Papua	7,4	0,9	0,6	0,3	2,6	0,5	1,0
Luar Negeri	1,7	0,4	0,4	0,5	1,9	0,2	0,4
Total	3,8	1,4	0,7	1,2	4,5	0,7	0,9

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 4.4 Persentase Perolehan Suara Nasional Partai Politik Pada Pemilu
Tahun 2009 (2/6)**

Provinsi	Partai Politik						
	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Amanat Nasional	Partai Perjuangan Indonesia Baru	Partai Kedaulatan	Partai Persatuan Daerah	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Pemuda Indonesia
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	7,1	5,9	0,0	0,2	0,9	2,6	0,3
Sumatera Utara	7,3	5,2	0,6	0,5	0,7	1,3	0,6
Sumatera Barat	8,9	9,9	0,3	0,2	0,7	2,1	0,3
Riau	7,4	6,6	0,0	0,3	0,6	4,6	0,3
Jambi	5,1	18,8	0,0	0,4	0,3	2,8	0,4
Sumatera Selatan	6,3	5,0	0,3	0,7	0,3	2,0	0,7
Bengkulu	8,6	9,8	0,0	1,9	1,0	3,0	0,8
Lampung	8,7	8,1	0,3	0,6	0,1	4,6	0,4
Kepulauan Bangka Belitung	7,3	4,9	0,5	0,5	0,5	1,3	0,3
Kepulauan Riau	11,8	5,6	2,7	0,3	0,5	2,9	0,2
DKI Jakarta	18,4	3,8	0,1	0,1	0,2	1,5	0,1
Jawa Barat	10,9	4,9	0,0	0,2	0,2	3,2	0,2
Jawa Tengah	7,1	7,0	0,1	0,2	0,2	7,9	0,2
DI Yogyakarta	9,1	13,9	0,1	0,1	0,2	4,6	0,6
Jawa Timur	5,3	5,6	0,0	0,5	0,3	11,8	0,2
Banten	11,1	3,3	0,0	0,3	0,9	2,6	0,4
Bali	1,7	0,4	0,4	0,2	0,5	1,1	0,2
Nusa Tenggara Barat	8,0	4,8	0,5	0,7	1,1	2,1	1,3
Nusa Tenggara Timur	1,8	3,1	0,6	1,0	1,1	2,7	1,0
Kalimantan Barat	4,0	5,2	1,1	0,6	3,4	1,8	0,8
Kalimantan Tengah	4,1	5,0	0,3	0,4	0,9	3,2	0,6
Kalimantan Selatan	10,7	5,0	0,0	0,6	0,5	5,2	0,4
Kalimantan Timur	9,3	4,6	0,0	0,7	1,1	1,6	0,4
Sulawesi Utara	2,5	5,4	0,2	0,5	1,0	0,7	0,4
Sulawesi Tengah	9,5	4,6	0,0	0,5	0,5	2,4	0,5
Sulawesi Selatan	8,0	8,0	0,3	0,7	0,8	1,8	0,7
Sulawesi Tenggara	5,6	9,0	0,0	1,4	1,1	2,3	0,4
Gorontalo	5,4	6,9	0,0	0,2	0,0	1,2	0,0
Sulawesi Barat	6,5	13,8	1,0	0,6	1,5	1,3	0,5
Maluku	5,5	6,8	0,2	0,4	0,6	12,8	0,6
Maluku Utara	6,4	5,8	0,5	1,1	5,7	1,4	1,1
Papua Barat	3,1	5,5	0,7	1,0	0,6	1,5	0,9
Papua	2,4	8,4	0,6	1,3	0,7	5,2	1,2
Luar Negeri	9,8	2,2	0,1	0,1	0,7	3,3	0,1
Total	7,9	6,0	0,2	0,4	0,5	4,9	0,4

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 4.4 Persentase Perolehan Suara Nasional Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2009 (3/6)

Provinsi	Partai Politik						
	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Partai Demokrasi Pembaruan	Partai Karya Perjuangan	Partai Matahari Bangsa	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Partai Demokrasi Kebangsaan	Partai Republika Nusantara
(1)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	0,1	0,6	0,2	0,4	0,1	0,8	0,4
Sumatera Utara	0,3	1,1	0,4	0,5	0,2	0,6	0,8
Sumatera Barat	0,2	0,7	0,3	1,2	0,0	0,6	0,4
Riau	0,2	0,7	0,5	0,8	0,0	0,9	0,6
Jambi	0,3	0,7	0,3	1,1	0,0	1,6	0,7
Sumatera Selatan	0,3	0,8	0,5	0,4	0,3	0,9	0,5
Bengkulu	2,1	0,8	0,4	1,2	0,0	1,0	1,2
Lampung	0,7	0,6	0,3	0,3	0,1	0,9	0,3
Kepulauan Bangka Belitung	0,3	0,8	0,1	0,3	0,0	0,8	0,4
Kepulauan Riau	0,7	0,6	0,2	0,6	0,4	0,7	0,3
DKI Jakarta	0,1	0,4	0,2	0,2	0,0	0,2	0,3
Jawa Barat	0,2	0,6	0,3	0,3	0,0	0,2	0,4
Jawa Tengah	0,2	1,1	0,1	0,4	0,0	0,4	0,4
DI Yogyakarta	0,2	1,0	0,0	0,2	0,0	0,6	0,6
Jawa Timur	0,3	0,8	0,2	0,2	0,1	0,3	0,5
Banten	0,3	0,7	0,2	0,4	0,0	0,3	1,1
Bali	2,4	0,9	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4
Nusa Tenggara Barat	0,6	0,6	0,3	0,8	0,5	1,6	0,7
Nusa Tenggara Timur	0,6	2,8	2,1	0,6	1,0	1,5	2,8
Kalimantan Barat	0,3	1,0	0,8	0,3	0,0	1,0	0,7
Kalimantan Tengah	0,4	1,1	0,5	0,5	0,3	0,8	0,5
Kalimantan Selatan	0,0	0,3	0,4	0,6	0,0	0,2	0,6
Kalimantan Timur	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3	1,9	0,4
Sulawesi Utara	0,2	1,1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,6
Sulawesi Tengah	0,4	1,2	0,8	0,7	0,3	0,4	0,9
Sulawesi Selatan	0,2	0,9	0,5	0,4	0,4	2,8	1,7
Sulawesi Tenggara	0,0	2,3	0,4	0,6	0,8	1,1	1,3
Gorontalo	0,1	0,4	0,3	0,2	0,0	1,9	0,2
Sulawesi Barat	0,0	0,5	0,3	0,4	0,6	3,0	0,7
Maluku	0,5	0,7	0,6	0,4	0,5	0,6	0,3
Maluku Utara	0,5	0,5	0,4	1,1	0,0	1,4	3,4
Papua Barat	1,0	2,2	0,7	1,3	0,0	1,8	0,8
Papua	0,3	1,2	1,2	0,2	0,4	1,7	0,6
Luar Negeri	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1
Total	0,3	0,9	0,3	0,4	0,1	0,6	0,6

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 4.4 Persentase Perolehan Suara Nasional Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2009 (4/6)

Provinsi	Partai Politik						
	Partai Pelopor	Partai Golongan Karya	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Damai Sejahtera	Partai Nasionalis Kerakyatan Indonesia	Partai Bulan Bintang	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(1)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
Aceh	0,3	10,5	6,2	0,5	0,4	2,4	2,3
Sumatera Utara	0,6	12,5	4,2	4,4	0,6	1,5	10,6
Sumatera Barat	0,6	17,1	6,8	0,4	0,2	3,0	4,0
Riau	0,3	23,4	7,2	2,2	0,2	2,7	7,2
Jambi	0,4	13,1	3,6	0,6	0,3	2,5	9,0
Sumatera Selatan	0,6	21,3	4,0	0,5	0,7	2,7	13,0
Bengkulu	0,8	12,1	3,9	0,7	0,0	2,1	4,7
Lampung	0,5	12,1	3,0	0,9	0,9	1,7	12,9
Kepulauan Bangka Belitung	0,0	20,4	5,0	0,3	0,6	10,1	21,1
Kepulauan Riau	0,5	17,2	4,0	2,1	0,3	1,3	11,1
DKI Jakarta	0,1	6,2	4,6	3,5	0,1	0,9	11,2
Jawa Barat	0,1	14,3	6,4	0,8	0,1	2,2	14,7
Jawa Tengah	0,3	12,8	6,1	0,6	0,3	0,9	21,9
DI Yogyakarta	0,0	14,8	3,5	0,8	0,1	0,9	15,7
Jawa Timur	0,2	9,7	5,3	0,7	0,3	1,1	16,2
Banten	0,3	14,4	8,7	1,1	0,4	2,1	10,1
Bali	0,5	19,2	0,9	0,4	1,1	0,1	40,1
Nusa Tenggara Barat	0,7	14,9	5,2	0,2	0,7	6,4	4,7
Nusa Tenggara Timur	1,1	17,6	1,3	4,2	1,3	0,8	11,5
Kalimantan Barat	0,7	14,1	5,9	2,8	2,1	1,6	22,9
Kalimantan Tengah	0,6	14,3	6,1	2,0	0,4	1,9	24,9
Kalimantan Selatan	0,1	16,8	10,4	0,5	0,6	3,8	7,0
Kalimantan Timur	0,7	18,1	5,7	3,4	0,6	2,3	11,6
Sulawesi Utara	0,3	24,5	1,7	6,5	0,3	0,6	23,4
Sulawesi Tengah	0,4	18,5	3,2	4,3	0,2	1,9	5,9
Sulawesi Selatan	0,3	25,1	4,1	2,1	0,5	2,6	3,2
Sulawesi Tenggara	0,4	14,9	4,0	0,7	3,3	4,2	4,2
Gorontalo	0,0	30,0	14,5	0,2	0,0	2,7	3,1
Sulawesi Barat	0,6	20,5	3,1	1,4	0,2	2,2	9,2
Maluku	0,4	17,1	1,7	2,0	1,5	1,1	9,4
Maluku Utara	0,6	19,6	2,1	4,9	0,2	2,6	7,5
Papua Barat	0,7	31,6	5,3	5,2	1,6	1,7	5,8
Papua	0,3	19,6	1,9	6,5	1,5	0,5	3,1
Luar Negeri	0,1	18,4	7,2	2,9	0,1	0,8	13,0
Total	0,3	14,4	5,3	1,5	0,5	1,8	14,0

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 4.4 Persentase Perolehan Suara Nasional Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2009 (5/6)

Provinsi	Partai Politik						
	Partai Bintang Reformasi	Partai Patriot	Partai Demokrat	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	Partai Indonesia Sejahtera	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	Partai Merdeka
(1)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
Aceh	2,2	1,3	40,9	0,1	0,3	1,3	0,5
Sumatera Utara	1,4	0,5	27,3	0,7	0,4	0,3	0,1
Sumatera Barat	1,9	0,4	26,6	0,2	0,1	0,1	0,1
Riau	2,5	0,7	15,0	0,3	0,4	1,1	0,1
Jambi	2,0	0,2	17,0	0,1	0,4	0,4	0,1
Sumatera Selatan	4,0	0,2	14,3	0,2	0,5	1,1	0,2
Bengkulu	1,3	0,8	20,0	0,2	0,7	0,6	0,3
Lampung	1,9	0,3	20,5	0,3	0,4	1,5	0,1
Kep. Bangka Belitung	1,1	0,2	10,3	0,2	0,3	0,6	0,0
Kepulauan Riau	1,1	0,7	16,7	0,5	0,2	1,3	0,2
DKI Jakarta	0,9	0,4	35,0	0,4	0,1	0,6	0,1
Jawa Barat	0,5	0,3	24,8	0,2	0,2	0,6	0,0
Jawa Tengah	0,4	0,1	15,9	0,1	0,2	1,8	0,0
DI Yogyakarta	0,3	0,6	18,7	0,4	0,1	1,3	0,1
Jawa Timur	0,6	0,5	22,0	0,1	0,2	4,6	0,1
Banten	1,8	0,3	22,6	0,3	0,3	0,8	0,2
Bali	0,1	0,2	17,6	0,1	0,5	0,2	0,0
Nusa Tenggara Barat	4,3	1,0	18,0	0,1	0,6	1,7	0,4
Nusa Tenggara Timur	1,0	0,3	15,1	3,1	0,8	0,3	0,2
Kalimantan Barat	1,6	0,4	11,3	0,5	0,5	0,8	0,4
Kalimantan Tengah	1,0	0,3	13,0	0,4	0,3	0,4	0,0
Kalimantan Selatan	5,0	0,0	15,6	0,1	0,2	0,8	0,0
Kalimantan Timur	0,9	2,8	17,8	0,5	0,4	0,5	0,3
Sulawesi Utara	1,1	0,1	15,5	0,5	0,2	0,0	0,1
Sulawesi Tengah	2,2	1,5	17,8	0,8	0,3	0,8	0,1
Sulawesi Selatan	2,0	1,1	15,7	0,5	0,3	0,8	0,2
Sulawesi Tenggara	2,3	1,2	20,9	0,0	0,3	0,5	0,0
Gorontalo	1,0	0,2	12,8	0,1	0,0	1,0	0,0
Sulawesi Barat	1,8	0,9	14,7	0,8	0,3	0,4	0,0
Maluku	2,0	0,2	16,4	0,5	1,2	1,2	0,0
Maluku Utara	2,1	2,9	10,8	0,4	0,7	0,0	0,0
Papua Barat	2,1	0,0	10,5	1,0	0,8	0,2	0,1
Papua	0,9	4,6	19,6	0,9	1,3	0,1	0,1
Luar Negeri	0,3	0,2	30,6	0,4	0,1	1,4	0,1
Total	1,2	0,5	20,8	0,3	0,3	1,5	0,1

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 4.4 Persentase Perolehan Suara Nasional Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2009 (6/6)

Provinsi	Partai Politik			Total Suara Sah
	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	Partai Sarikat Indonesia	Partai Buruh	
(1)	(37)	(38)	(39)	(40)
Aceh	0,3	0,4	0,2	100,0
Sumatera Utara	0,1	0,1	1,0	100,0
Sumatera Barat	0,0	0,1	0,2	100,0
Riau	0,2	0,1	0,9	100,0
Jambi	0,1	0,2	0,5	100,0
Sumatera Selatan	0,3	0,2	0,2	100,0
Bengkulu	0,2	0,3	0,5	100,0
Lampung	0,2	0,2	0,1	100,0
Kepulauan Bangka Belitung	0,1	0,1	0,2	100,0
Kepulauan Riau	0,0	0,9	0,7	100,0
DKI Jakarta	0,1	0,0	0,2	100,0
Jawa Barat	0,1	0,1	0,1	100,0
Jawa Tengah	0,1	0,0	0,1	100,0
DI Yogyakarta	0,1	0,1	0,1	100,0
Jawa Timur	0,2	0,1	0,2	100,0
Banten	0,5	0,3	0,2	100,0
Bali	0,0	0,0	0,1	100,0
Nusa Tenggara Barat	0,4	0,5	0,4	100,0
Nusa Tenggara Timur	0,0	0,6	0,4	100,0
Kalimantan Barat	0,2	0,3	0,3	100,0
Kalimantan Tengah	0,2	0,6	0,6	100,0
Kalimantan Selatan	0,4	0,0	0,2	100,0
Kalimantan Timur	0,1	0,0	0,6	100,0
Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,2	100,0
Sulawesi Tengah	0,0	0,2	0,2	100,0
Sulawesi Selatan	0,1	0,4	0,3	100,0
Sulawesi Tenggara	0,1	0,3	0,9	100,0
Gorontalo	0,0	0,0	0,0	100,0
Sulawesi Barat	0,2	0,0	0,2	100,0
Maluku	0,1	0,1	0,2	100,0
Maluku Utara	0,0	0,0	0,1	100,0
Papua Barat	0,0	0,4	0,8	100,0
Papua	0,1	0,1	0,3	100,0
Luar Negeri	0,3	0,1	0,7	100,0
Total	0,1	0,1	0,3	100,0

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

4.3. DPR dan DPD

Sejak perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu. Lembaga ini berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jumlah anggota MPR periode 2004-2009 sebanyak 678 orang yang terdiri atas 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Jumlah MPR Periode 2009-2014 sebanyak 692 orang yang terdiri atas 560 anggota berasal dari unsur DPR dan 132 anggota dari unsur DPD yang berasal dari 33 provinsi.

4.3.1 Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada era Orde Baru keanggotaan DPR terdapat dua kategori. Pertama adalah anggota DPR hasil Pemilu yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu, dan kedua adalah anggota DPR yang diangkat, berasal dari TNI/Polri dan utusan golongan. Jumlah anggota DPR hasil Pemilu 1971, 1977 dan 1982 adalah 460 orang dengan komposisi 360 dipilih dalam Pemilu dan 100 diangkat. Mulai Pemilu 1987 jumlah anggota DPR meningkat menjadi 500 orang dengan komposisi 400 dipilih dalam Pemilu dan 100 orang diangkat. Komposisi jumlah DPR yang diangkat pada era reformasi berangsur dikurangi. Jumlah DPR periode 1999-2004 adalah 500 orang dengan komposisi 462 dipilih dan 38 anggota lainnya berasal dari anggota TNI/Polri. DPR hasil Pemilu 2004 berbeda dengan sebelumnya, jumlah anggota DPR menjadi 550 dan keseluruhannya hasil Pemilu. Pada periode 2009-2014 jumlah DPR sebanyak 560 anggota DPR yang seluruhnya dipilih dalam Pemilu 2009 (Grafik 4.2).

Pada Pemilu 2004 alokasi jumlah kursi DPR-RI sebanyak 550 kursi, dengan alokasi 3-12 kursi setiap Dapil. Jumlah kursi untuk setiap provinsi menurut pasal 48 (1) UUU No.12 tahun 2003 ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Alokasi kursi provinsi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan kuota setiap kursi maksimal 425.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan kuota setiap kursi minimum 325.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah. Ketentuan lain adalah jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai Pemilu 1999. Provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 ditetapkan sekurang-kurangnya memperoleh 3 kursi.

Jumlah kursi yang diperebutkan pada setiap daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2009 paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi, dengan total sebanyak 560 kursi untuk DPR RI.

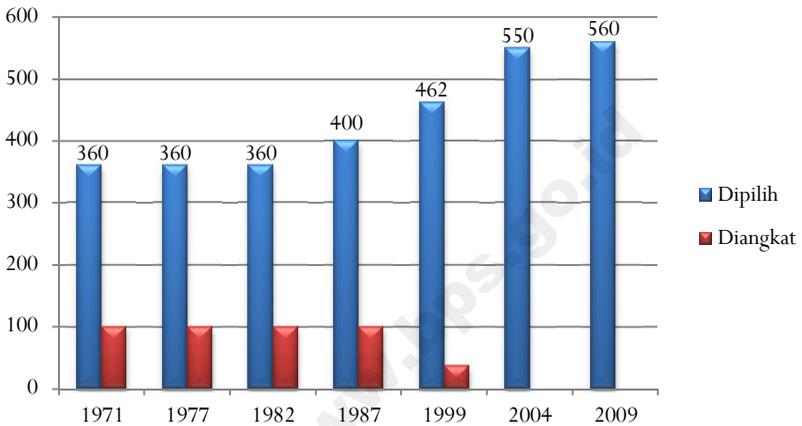
Terdapat beberapa perbedaan mendasar pada Pemilu 2009 terkait mekanisme penentuan Caleg terpilih. Pertama, calon anggota DPR RI terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut pada daftar calon tetap (DCT), melainkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh Caleg. Sistem ini dipakai berdasar pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pembatalan sebagian pasal pada UU No. 10/2008, bahkan diputuskan pada saat DCT sudah disahkan oleh KPU. Mekanisme ini membuat semua kandidat dalam DCT memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Kedua, ditetapkannya *parliamentary threshold*, yaitu ketentuan batas perolehan suara minimal partai politik untuk dapat masuk ke parlemen. Batas minimal yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif sebesar 2,5 persen dari total jumlah suara sah secara nasional. Metode ambang batas minimal tersebut membuat hanya 9 partai politik (dari 38 partai politik) yang memiliki representasi di DPR RI.

Latar belakang pekerjaan anggota DPR disajikan pada Grafik 4.3. Komposisi perempuan setiap fraksi di DPR dan jumlah perempuan pada setiap periode DPR disajikan pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6. DPR memiliki susunan organisasi yang terdiri atas Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran; dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Selain itu, dalam alat kelengkapan DPR juga terdapat Panitia khusus yang bersifat sementara untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pimpinan DPR-RI periode 2004-2009 terdiri atas 4 orang, sedangkan pada periode 2009-2014 meningkat menjadi 5 orang. Pada dua periode tersebut DPR mempunyai 11 komisi yang merupakan unit kerja utama di DPR. Hampir semua fungsi-fungsi di DPR substansinya dikerjakan di dalam komisi. Profil anggota DPR RI periode 2009 – 2014 menurut kelompok umur, tingkat pendidikan dan pembagian bidang kerja di DPR disajikan pada Tabel 4.7 dan 4.9. Jumlah anggota DPR dirinci menurut alat kelengkapan DPR selain komisi disajikan pada Tabel 4.8.

Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 69 ayat 1, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi merupakan wujud dari kekuasaan pembentuk undang-undang, anggaran untuk membahas dan memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap RUU APBN yang diajukan Presiden, serta fungsi pengawasan dilakukan melalui pengawasan dari pelaksanaan undang-undang dan APBN (pasal 70). Tabel 4.11 menampilkan Undang Undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 hingga 24 November 2012. Pasal 77

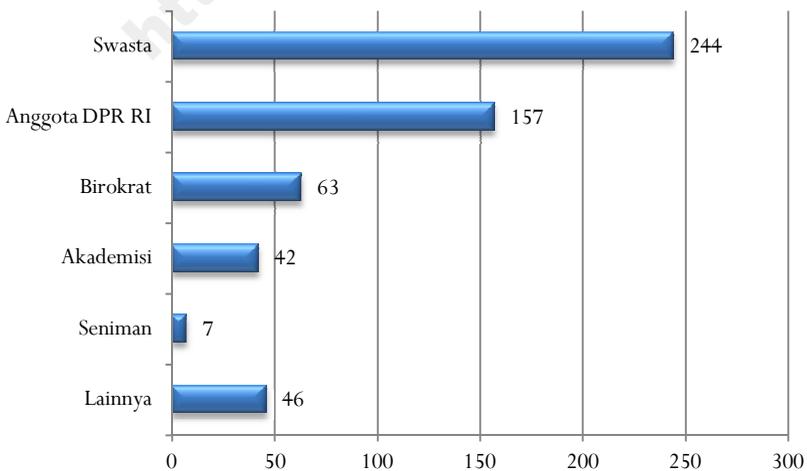
Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 menyatakan DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Pada Tabel 4.10 ditampilkan jumlah Undang-Undang, PERPPU, PERPRES/PENPRES yang ditetapkan maupun dicabut pada periode 1945-2011. Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR dapat diuji di Mahkamah Konstitusi jika ada warga negara yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Rekapitulasi penggunaan hak angket dan interpelasi dalam periode 1999 – 2011 ditampilkan pada Tabel 4.12 dan 4.13.

Grafik 4.2 Komposisi Anggota DPR Berdasarkan Status Keanggotaan



Sumber: 30 tahun Indonesia Merdeka

Grafik 4.3 Latar Belakang Pekerjaan Anggota DPR-RI 2009-2014



Sumber: Pemilu 2009 dalam angka - KPU

Tabel 4.5 Anggota DPR Terpilih Pada Setiap Fraksi Periode 2009-2014 Berdasarkan Jenis Kelamin

Partai	Jumlah Kursi	Jenis Kelamin			
		Laki-Laki	%	Perempuan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Partai Demokrat	148	113	76,35	35	23,65
Partai Golkar	106	88	83,02	18	16,98
PDIP	94	77	81,91	17	18,09
PKS	57	54	94,74	3	5,26
PAN	46	39	84,78	7	15,22
PPP	38	33	86,84	5	13,16
PKB	28	21	75,00	7	25,00
Partai Gerindra	26	22	84,62	4	15,38
Partai Hanura	17	14	82,35	3	17,65
Jumlah	560	461	82,32	99	17,68

Sumber: Pemilu 2009 dalam angka – KPU

Tabel 4.6 Jumlah Anggota DPR Perempuan Pada Setiap Pemilu

Periode	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
1950-1955 (DPR Sementara)	8	3,8
1955-1960	17	6,3
1956-1959 (Konstituante)	25	5,1
1971-1977	36	7,8
1977-1982	29	6,3
1982-1987	39	8,5
1987-1992	65	13
1992-1997	62	12,5
1997-1999	54	10,8
1999-2004	46	9
2004-2009	65	11,6
2009-2014	99	17,7

Sumber: Miriam Budiharjo (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi Revisi; Pemilu 2009 Dalam Angka - KPU.*

**Tabel 4.7 Jumlah Anggota Komisi DPR RI Periode 2009 - 2014
Menurut Bidang Kerja**

Komisi	Bidang Kerja	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)
I	Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi.	45
II	Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reformasi Agraria.	50
III	Hukum, HAM, dan Keamanan	60
IV	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.	49
V	Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan, dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	52
VI	Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, dan BUMN, Standarisasi Nasional.	51
VII	Energi, Sumberdaya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup.	53
VIII	Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan.	47
IX	Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Kesehatan.	45
X	Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan.	49
XI	Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.	52

Sumber: DPR RI

Tabel 4.8. Jumlah Anggota Alat Kelengkapan DPR RI Periode 2009 - 2014

Alat Kelengkapan	Jumlah Anggota
(1)	(2)
Pimpinan	5
Badan Musyawarah	60
Badan Legislasi	51
Badan Anggaran	84
Badan Urusan Rumah Tangga	51
Badan Kerjasama Antar-Parlemen	50
Badan Kehormatan	11
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	9

Sumber: DPR RI

**Tabel 4.9 Banyaknya Anggota DPR RI Periode 2009 – 2014
Menurut Provinsi dan Pendidikan**

Daerah Pemilihan Provinsi	Pendidikan				Total
	SLTA	Strata I	Strata II	Strata III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6	4	3	0	13
Sumatera Utara	7	11	10	2	30
Sumatera Barat	4	5	3	2	14
Riau	3	2	6	0	11
Jambi	1	4	2	0	7
Sumatera Selatan	1	4	11	1	17
Bengkulu	0	2	2	0	4
Lampung	6	4	7	1	18
Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	0	3
Kepulauan Riau	1	0	1	1	3
DKI Jakarta	5	12	3	1	21
Jawa Barat	17	38	29	7	91
Jawa Tengah	18	27	27	5	77
DI Yogyakarta	2	3	3	0	8
Jawa Timur	21	32	31	3	87
Banten	6	8	8	0	22
Bali	2	3	3	1	9
Nusa Tenggara Barat	4	4	1	1	10
Nusa Tenggara Timur	5	4	4	0	13
Kalimantan Barat	3	5	2	0	10
Kalimantan Tengah	3	0	3	0	6
Kalimantan Selatan	1	6	3	1	11
Kalimantan Timur	3	1	4	0	8
Sulawesi Utara	1	5	0	0	6
Sulawesi Tengah	0	3	3	0	6
Sulawesi Selatan	5	11	7	1	24
Sulawesi Tenggara	0	4	1	0	5
Gorontalo	0	1	1	1	3
Sulawesi Barat	1	2	0	0	3
Maluku	2	1	1	0	4
Maluku Utara	2	1	0	0	3
Papua Barat	1	1	1	0	3
Papua	5	2	3	0	10
Jumlah	137	211	184	28	560

Sumber: Pemilu 2009 dalam angka – Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 4.10 Jumlah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Penetapan Presiden/Peraturan Presiden 1945-2012**

Tahun	Jumlah			Jumlah yang diubah/dicabut		
	UU	Perpu	Penpres/Perpres	UU	Perpu	Penpres/Perpres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1945	1	-	-	1	-	-
1946	24	10	-	15	9	-
1947	41	-	-	17	-	-
1948	35	-	-	14	-	-
1949	12	4	-	2	-	-
1950	71	6	-	65	5	-
1951	49	-	-	36	-	-
1952	39	-	-	18	-	-
1953	46	-	-	28	-	-
1954	88	-	-	49	-	-
1955	32	-	-	21	-	-
1956	44	-	-	19	-	-
1957	107	-	-	36	-	-
1958	95	-	-	27	-	-
1959	41	29	9	17	29	9
1960	9	56	16	5	56	16
1961	22	1	15	14	1	15
1962	19	17	5	8	17	5
1963	14	9	26	13	8	26
1964	36	6	24	17	6	24
1965	22	2	25	9	2	25
1966	14	-	7	8	-	7
1967	14	-	-	10	-	-
1968	25	1	-	12	1	-
1969	16	1	-	5	1	-
1970	14	-	-	9	-	-
1971	13	2	-	5	2	-
1972	6	-	-	1	-	-
1973	7	-	-	1	-	-
1974	11	-	-	5	-	-
1975	5	-	-	3	-	-
1976	11	-	-	3	-	-
1977	2	-	-	-	-	-
1978	8	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah dari Kemendagri (Oktober 2012)

Tabel 4.10 Jumlah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Penetapan Presiden/Peraturan Presiden 1945-2012 (Lanjutan)

Tahun	Jumlah			Jumlah yang diubah/dicabut		
	UU	Perpu	Penpres/Perpres	UU	Perpu	Penpres/Perpres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1979	5	-	-	1	-	-
1980	13	-	-	1	-	-
1981	8	-	-	-	-	-
1982	21	-	-	4	-	-
1983	8	-	-	4	-	-
1984	8	1	-	1	-	-
1985	17	-	-	8	-	-
1986	5	-	-	2	-	-
1987	8	-	-	2	-	-
1988	6	-	-	2	-	-
1989	7	-	-	4	-	-
1990	11	-	-	1	-	-
1991	7	-	-	2	-	-
1992	25	1	-	10	1	-
1993	7	-	-	-	-	-
1994	12	-	-	4	-	-
1995	13	-	-	3	-	-
1996	9	-	-	1	-	-
1997	32	1	-	12	1	-
1998	13	3	-	3	1	-
1999	56	1	-	25	1	-
2000	38	3	-	5	3	-
2001	22	-	-	3	-	-
2002	32	2	-	6	2	-
2003	41	-	-	5	-	-
2004	41	2	-	9	2	-
2005	14	3	-	-	1	-
2006	23	2	-	4	1	-
2007	48	2	-	2	1	-
2008	56	5	-	1	3	-
2009	52	4	-	2	3	-
2010	13	-	-	-	-	-
2011	24	-	-	1	-	-
2012	8	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah dari Kemendagri (Oktober 2012)

Tabel 4.11 Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang

Tahun	Sisa Yang lalu	Terima	Jumlah	Putus				Jumlah Putusan	Sisa Tahun Ini	Jumlah UU yang Diuji
				Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2003	0	24	24	0	0	3	1	4	20	16
2004	20	27	47	11	8	12	4	35	12	14
2005	12	25	37	10	14	4	0	28	9	12
2006	9	27	36	8	8	11	2	29	7	9
2007	7	30	37	4	11	7	5	27	10	12
2008	10	36	46	10	12	7	5	34	12	18
2009	12	78	90	15	17	12	7	51	39	27
2010	39	81	120	17	23	16	5	61	59	58
2011	59	86	145	21	29	35	9	94	51	0
2012	51	111	162	29	25	29	6	89	73	0
Jumlah	219	525	744	125	147	136	44	452	-	166

Sumber: Mahkamah Konstitusi (hingga 22 November 2012)

Tabel 4.12 Penggunaan Hak Angket DPR 1999 - 2011

Presiden	Waktu	Materi	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
Abdurrahman Wahid	Agustus 2000	Dana Yanatera Bulog dan Sultan Brunei	Diterima
	Agustus 2000	Dana Nonbujeter Bulog	Ditolak Paripurna
Megawati Soekarnoputri	Januari 2002	Dana Nonbujeter Bulog	Ditolak Paripurna
	Januari 2003	Divestasi PT.Indosat	Berhenti
Susilo Bambang Yudhoyono	Maret 2005	Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (I)	Ditolak Paripurna
	Maret 2005	Penjualan Tanker Pertamina	Diterima
	Mei 2005	Kredit Macet Bank Mandiri	Ditolak Paripurna
	Mei 2005	lelang gula ilegal	Ditolak Paripurna
	Januari 2006	Impor Beras	Ditolak Paripurna
	Maret 2006	Penunjukan Exxon-Mobil Ltd sebagai pimpinan operator lapangan minyak blok Cepu.	Ditolak Paripurna
	Desember 2007	Penyelenggaraan Ibadah Haji	Diterima
	Maret 2008	Penyelesaian Kasus Kredit Likuiditas BLBI	Berhenti
	Juni 2008	Transfer pricing PT Adaro Indonesia	Ditolak Paripurna
	Juni 2008	Hak angket atas Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (II)	Diterima
	Oktober 2008	Keppres mengenai pelantikan pasangan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara	Berhenti
	April 2009	Pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu legislatif	Diterima
	Desember 2009	Bail Out Bank Century	Diterima
	Februari 2011	Mafia Pajak	Ditolak Paripurna

Sumber: diolah dari Syamsuddin Haris, "Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca-Amandemen, Konstitusi (2004-2008)," disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008 dan Laporan Lima Tahun DPR-RI 2004-2009

Tabel 4.13 Penggunaan Hak Interpelasi DPR 1999 - 2011

Presiden	Waktu	Materi	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
Abdurrahman Wahid	November 1999	Pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan	Diterima
	Juli 2000	Pencopotan Jusuf Kala dan Laksamana Sukardi	Diterima
Megawati Soekarnoputri	Mei 2002	Bantuan Presiden untuk pembangunan asrama	Diterima
	Juni 2002	Kunjungan Presiden Megawati ke Timor Leste menghadiri undangan Presiden Xanana Gusmao	Berhenti
	Juni 2003	Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan	Diterima
Susilo Bambang Yudhoyono	November 2005	Penarikan surat Presiden Megawati soal Pemberhentian dan Penggantian Panglima TNI	Ditolak Paripurna
	Januari 2005	SK Wapres No.1/2004 tentang Pembentukan Timnas Penanganan Bencana Aceh.	Berhenti
	Februari 2005	Surat arahan Wapres untuk para menteri tentang himbauan untuk tidak menganggap penting rapat kerja dengan DPR.	Berhenti
	Agustus 2005	MoU Helsinki tentang Penyelesaian Kasus Aceh	Berhenti
	Juni 2005	Masalah busung lapar dan wabah polio	Diterima
	September 2005	Tentang Rapat kabinet melalui video conference	Berhenti
	Oktober 2005	Kenaikan harga BBM	Ditolak Paripurna
	Januari 2006	Impor beras (I)	Ditolak Paripurna
	Oktober 2006	Impor beras (II)	Ditolak Paripurna
	Maret 2007	Persetujuan Pemerintah atas resolusi Dewan Keamanan PBB No.1747	Diterima
	Juni 2007	Penyelesaian kasus lumpur Lapindo Brantas.	Berhenti
	Desember 2007	Penyelesaian kasus KLBI/BLBI	Diterima
	Mei 2008	Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok	Diterima
Juni 2008	Kenaikan harga BBM	Ditolak Paripurna	

Sumber: P3DI DPR; dan Syamsuddin Haris, "Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca-Amandemen Konstitusi (2004-2008)", Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 10, diolah.

4.3.2 Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga bagian dari MPR yang berasal dari wakil-wakil daerah yang berasal dari semua provinsi. Keberadaan lembaga ini sejak diundangkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 22 C dan 22 D. Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 orang dan dipilih melalui Pemilu legislatif. Untuk provinsi baru yang dibentuk setelah pelaksanaan Pemilu, ditetapkan tidak ada penambahan jumlah anggota DPD dari provinsi yang bersangkutan. Dengan demikian jumlah anggota DPD hasil Pemilu 2004 adalah sebanyak 128 orang. Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki anggota DPD karena provinsi tersebut terbentuk setelah pelaksanaan Pemilu yaitu berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2004.

Pada Pemilu Tahun 2009 jumlah anggota DPD dari setiap daerah pemilihan tetap sebanyak 4 orang. Dengan masuknya wakil dari Provinsi Sulawesi Barat, maka jumlah anggota DPD pada periode tahun 2009 – 2014 sebanyak 132 orang. Di antara jumlah tersebut jumlah perempuan sebanyak 35 orang (26,5%). Berdasarkan latar belakang profesi mayoritas adalah anggota DPR RI tahun 2004-2009 dengan jumlah 50 orang (38%), urutan kedua dengan profesi swasta sebanyak 38 Orang (28,7%). Dari segi pendidikan, mayoritas anggota DPD lulusan S1 dengan 58 orang (44%), disusul S2 dengan 40 orang (30%). Berdasarkan umur, terdapat 3 orang yang memiliki usia di atas 70 tahun dan 5 orang di bawah 30 tahun.

Secara lengkap karakteristik anggota DPD ditampilkan dalam Tabel 4.14 - 4.16 serta Grafik 4.4. Tabel 4.14 menyajikan banyaknya anggota DPD menurut kelompok umur, sedangkan Tabel 4.15 menyajikan profil anggota DPD menurut pendidikan. Grafik 4.4 menampilkan profil anggota DPD berdasarkan latar belakang pekerjaan. Rincian jumlah anggota DPD menurut daerah pemilihan dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.14 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009-2014 menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
< 30	4	1	5
31 - 40	19	9	28
41 - 50	28	10	38
51 - 60	31	10	41
61 - 70	13	4	17
> 70	2	1	3
Total	97	35	132

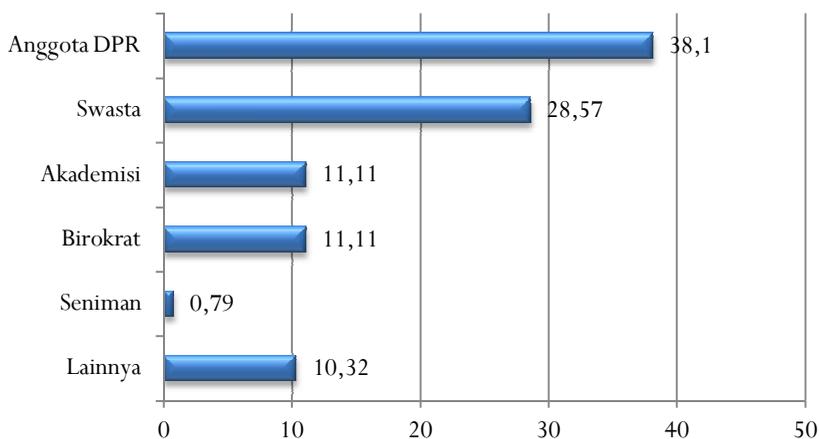
Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2010)

Tabel 4.15 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2009-2014 Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
SLTA	13	8	21
Diploma III	2	2	4
Strata I	47	11	58
Strata II	29	11	40
Strata III	6	3	9
Total	97	35	132

Sumber: Pemilu 2009 dalam angka - Komisi Pemilihan Umum (2010)

Grafik 4.4 Latar Belakang Profesi Anggota DPD 2009–2014 (%)



Sumber: Pemilu 2009 dalam angka - Komisi Pemilihan Umum (2010)

**Tabel 4.16 Jumlah Anggota DPD Periode 2009-2014
Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin**

Daerah Pemilihan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Aceh	4	0
Sumatera Utara	3	1
Sumatera Barat	3	1
Riau	2	2
Jambi	2	2
Sumatera Selatan	2	2
Bengkulu	3	1
Lampung	4	0
Kep. Bangka Belitung	3	1
Kepulauan Riau	3	1
DKI Jakarta	4	0
Jawa Barat	3	1
Jawa Tengah	1	3
DI Yogyakarta	3	1
Jawa Timur	3	1
Banten	4	0
Bali	4	0
Nusa Tenggara Barat	3	1
Nusa Tenggara Timur	2	2
Kalimantan Barat	0	4
Kalimantan Tengah	3	1
Kalimantan Selatan	4	0
Kalimantan Timur	4	0
Sulawesi Utara	3	1
Sulawesi Tengah	3	1
Sulawesi Selatan	4	0
Sulawesi Tenggara	4	0
Gorontalo	2	2
Sulawesi Barat	3	1
Maluku	2	2
Maluku Utara	3	1
Papua Barat	3	1
Papua	3	1
Indonesia	97	35

Sumber: Dewan Perwakilan Daerah RI (2010)

4.4 Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan terhadap Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman yang akan menjamin amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Selain Mahkamah Agung (MA), dalam Pasal 24 hasil perubahan ketiga UUD RI 1945, dimasukkan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman baru yang kedudukannya sederajat dengan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. MK memiliki wewenang dan kewajiban; Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kepastian dan kesetaraan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar merupakan prasyarat penting dari terwujudnya demokrasi. Hukum akan menjamin penguasa tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, karena penguasa juga tunduk terhadap aturan hukum. Dengan kekuasaan hukum yang profesional, seluruh rakyat memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Selama ini akses terhadap keadilan merupakan masalah bagi banyak pengadilan di seluruh dunia, khususnya bagi kelompok miskin dan marginal (Lapth MA 2010: 39). Demikian juga yang terdapat di Indonesia, sehingga dibentuk Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan terhadap integritas hakim dalam memutus perkara.

Dari sisi lingkungan peradilan, peradilan umum memiliki perkara paling banyak dibanding dengan lingkungan peradilan lain seperti peradilan agama, militer dan tata usaha negara (Tabel 4.17). Dilihat dari jumlah perkara yang masuk, tahun 2011 MA menerima 12.990 perkara, mengalami penurunan 3,64% dibanding tahun 2010 sebanyak 13.480 perkara. Mahkamah Agung (MA) juga memiliki kewenangan melakukan uji materiil peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Pada tahun 2011, terdapat 50 permohonan uji materiil dan semuanya telah diputus oleh MA (Tabel 4.19). Produktivitas MA dalam memutus perkara ditampilkan pada Tabel 4.20, sedangkan rekapitulasi perkara tindak pidana khusus yang diterima MA sepanjang 2009-2010 ditampilkan pada Tabel 4.21. Berdasarkan lama hukuman

tindak pidana khusus selama tahun 2010-2011 paling banyak mendapat vonis 1-2 tahun (38,54%), disusul 3-5 tahun (22,85%) sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.22.

Semenjak terbentuk pada Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 940 Perkara. Perkara paling banyak diterima pada Tahun 2010 dengan 312 perkara. Pada Tahun 2011 berdasarkan jenis perkara di MK, paling banyak diterima adalah sengketa pemilihan kepala daerah dengan jumlah 132 perkara, selanjutnya pengujian undang-undang sebanyak 86 perkara, dan sengketa antar lembaga 6 perkara (Tabel 4.23). Rincian penanganan perkara sengketa antar lembaga tahun 2003 – 2011 ditampilkan dalam Tabel 4.24. Rincian perkara sengketa pemilihan kepala daerah 2008 – 2011 ditampilkan dalam Tabel 4.25.

Tabel 4.17 Jumlah Perkara yang Diterima Mahkamah Agung 2010-2011

Jenis	2010					2011					% Perubahan
	Kasasi	PK	Grasi	HUM	Jmlh	Kasasi	PK	Grasi	HUM	Jmlh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Perdata	3353	791	0	0	4144	3165	824	0	0	3989	-3,74
Perdata Khusus	1062	193	0	0	1255	853	174	0	0	1027	-18,17
Pidana	2227	189	72	0	2488	2310	145	23	0	2478	-0,40
Pidana Khusus	2855	217	219	0	3291	2658	281	41	0	2980	-9,45
Perdata Agama	688	89	0	0	777	670	77	0	0	747	-3,86
Militer	225	5	1	0	231	258	19	0	0	277	19,91
TUN	434	799	0	61	1294	422	1020	0	50	1492	15,30
Jumlah	10844	2283	292	61	13480	10336	2540	64	50	12990	-3,64

Sumber: Laporan Tahunan MA 2011 (2012)

Tabel 4.18 Rincian Keadaan Perkara Masing-Masing Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2010-2011

Lingkungan Peradilan	Sisa Tahun Lalu		Masuk		Jumlah		Putus		Sisa Tahun ini	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Umum	2217	2217	11271	11360	13488	13577	10795	10911	2693	2666
Agama	182	192	2259	2199	2441	2391	2252	2189	189	202
Militer	128	36	332	361	460	397	374	368	86	29
TUN	116	188	819	820	935	1008	751	832	184	176
Jumlah	2643	2633	14681	14740	17324	17373	14172	14300	3152	3073

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011 (2012)

Tabel 4.19 Klasifikasi Peraturan dan Jumlah Permohonan Uji Materiil ke MA Tahun 2010

Jenis Peraturan	2010	%	2011	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peraturan Pemerintah	9	14,75	8	16
Keputusan Presiden	3	4,92	1	2
Peraturan Daerah	12	19,67	6	12
Peraturan Menteri	14	22,95	17	34
Keputusan Menteri	6	9,84	4	8
Keputusan KPU	2	3,28	2	4
Peraturan KPU	9	14,75	1	2
Peraturan Bawaslu	1	1,64	-	0
Peraturan Dirjen	1	1,64	-	0
Peraturan Gubernur	-	0,00	4	8
Peraturan Bupati/Walikota	1	1,64	2	4
Keputusan Gubernur	1	1,64	1	2
Keputusan Direksi	1	1,64	-	0
Keputusan Bersama KMA dan KY	-	0,00	1	2
Peraturan Mahkamah Agung RI	-	0,00	1	2
Surat Edaran	1	1,64	2	4
Total	61	100	50	100

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011 (2012)

Tabel 4.20 Produktivitas MA dalam Memutus Perkara 2010-2011

Jenis Perkara	Diterima / Jumlah Beban		Putus		Sisa		% Putus	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perdata	7915	7392	4602	4321	3313	2981	58,14	59,18
Perdata Khusus	1655	1529	1153	1188	502	341	69,67	77,70
Pidana	3965	3978	2465	2505	1500	1473	62,17	62,97
Pidana Khusus	5025	4879	3126	3319	1899	1560	62,21	68,03
Perdata Agama	902	767	882	603	20	164	97,78	78,62
Militer	373	354	296	259	77	95	79,36	73,16
Tata Usaha Negara	2480	2605	1367	1524	1113	1081	55,12	58,50
Jumlah	22315	21414	13891	13719	8424	7695	62,25	64,07

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011 (2012)

Tabel 4.21 Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus yang Ditangani Mahkamah Agung Tahun 2009-2011

No	Klasifikasi	Kasasi / PK			Jumlah
		2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Korupsi	953	1035	1127	3115
2	Narkotika & Psikotropika	391	512	715	1618
3	Perlindungan Anak	448	617	499	1564
4	Kehutanan	357	191	123	671
5	KDRT	92	95	89	276
6	Migas	98	110	54	262
7	Perikanan	111	142	54	307
8	Kepabeanan	38	58	33	129
9	HAKI	52	35	27	114
10	Perbankan	40	29	29	98
11	Perdagangan Orang	34	34	22	90
12	Pencucian Uang	0	0	19	19
13	Ketenagakerjaan	21	18	16	55
14	Kesehatan	43	45	15	103
15	Perumahan	21	17	9	47
16	Lingkungan Hidup	0	0	13	13
17	Terorisme	19	24	8	51
18	Lain-lain	242	110	87	439
19	Grasi	230	219	41	490
Total		3190	3291	2980	9461

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011 (2012)

**Tabel 4.22 Jumlah Tindak Pidana Khusus yang Diputus
Di Tingkat Kasasi menurut Jenis/Lamanya Hukuman Tahun 2010-2011**

Masa Hukuman	Klasifikasi Perkara												Jumlah	%
	Korupsi		Perlindungan Anak		Narkotika / Psikotropika		Perikanan		Kehutanan		Lain-lain			
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
< 1 Tahun	28	9	61	56	33	25	43	10	16	12	101	104	498	15,11
1 - 2 Tahun	269	311	98	61	115	186	48	18	36	18	55	55	1270	38,54
3 - 5 Tahun	87	103	123	86	93	170	15	0	8	6	38	24	753	22,85
6 - 10 Tahun	13	15	99	58	45	67	0	0	0	0	10	15	322	9,77
> 10 Tahun	2	1	14	3	25	57	0	0	0	0	3	4	109	3,31
Seumur Hidup	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	14	0,42
Mati	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0,06
Bebas	43	88	18	31	22	43	1	4	6	6	18	47	327	9,92
Jumlah	442	527	413	295	337	560	107	32	66	42	225	249	3295	100

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2011 (2012)

Tabel 4.23 Rekapitulasi Perkara Masuk Mahkamah Konstitusi

Tahun	Perkara				Jumlah Perkara
	Sengketa Antar Lembaga	Pengujian Undang-Undang	Sengketa Pemilu Legislatif	Sengketa Pilkada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2003	0	24	-	-	24
2004	1	27	45	-	73
2005	1	25	-	-	26
2006	4	27	-	-	31
2007	2	30	-	-	32
2008	3	36	-	27	66
2009	0	78	71	3	152
2010	1	81	-	230	312
2011	6	86	-	132	224
Jumlah	12	328	116	260	940

Sumber: Mahkamah Konstitusi (2012)

Tabel 4.24 Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga

Tahun	Sisa Yang lalu	Terima	Jumlah	Putus				Jumlah Putusan	Sisa Tahun Ini
				Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	1	1	0	1	0	0	1	0
2005	0	1	1	0	0	0	0	0	1
2006	1	4	5	0	0	2	1	3	2
2007	2	2	4	0	1	1	0	2	2
2008	2	3	5	0	0	2	2	4	1
2009	1	0	1	0	0	1	0	1	0
2010	0	1	1	0	0	0	0	0	1
2011	1	6	7	0	0	4	0	4	3
2012	3	3	6	1	1	3	1	6	0
Jumlah	7	16	23	0	2	9	3	14	9

Sumber: Mahkamah Konstitusi (hingga 22 November 2012)

Tabel 4.25 Rekapitulasi Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Tahun	Sisa Yang lalu	Terima	Jumlah	Putus					Jumlah Putusan	Sisa Tahun Ini
				Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali	Gugur		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2008	0	27	27	3	12	3	0	0	18	9
2009	9	3	12	1	10	1	0	0	12	0
2010	0	230	230	26	149	45	4	0	224	6
2011	6	132	138	13	87	29	2	0	131	7
2012	7	85	92	8	49	23	8	1	89	3
Jumlah	22	477	499	51	307	101	14	1	474	-

Sumber: Mahkamah Konstitusi (hingga 22 November 2012)

4.5 Organisasi Masyarakat

Kecenderungan berorganisasi menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya (Safaat, 2011:4). Organisasi masyarakat merupakan kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasi kepentingan tertentu. Suara satu orang sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah (Budiardjo, 2008:383).

Sekalipun tidak mudah membedakan antara kelompok kepentingan yang terorganisir dengan partai politik, ada satu perbedaan yang secara umum dapat diterima. Setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah (pada waktu yang sama) tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Sekalipun demikian, kadang-kadang kelompok kepentingan itu berkembang menjadi partai politik, misalnya Partai Buruh Inggris berasal dari gerakan serikat buruh (Almond, 1974 dalam Mas'ood & MacAndrews, 2008:65-66).

Untuk mempermudah melakukan kontrol, pada masa Orde Baru dibentuk wadah khusus untuk perkumpulan, serikat, asosiasi yang berskala nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat. Sentralisasi tersebut berlaku juga untuk organisasi yang telah ada sebelumnya, harus melebur dengan organisasi dengan bentukan pemerintah. Organisasi induk yang dibuat seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) untuk guru, Kadin (Kamar Dagang dan Industri) untuk pengusaha, Kowani (Komite Wanita Indonesia) untuk wanita, HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) untuk petani, HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) untuk nelayan, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk buruh, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk Wartawan, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) untuk pemuda.

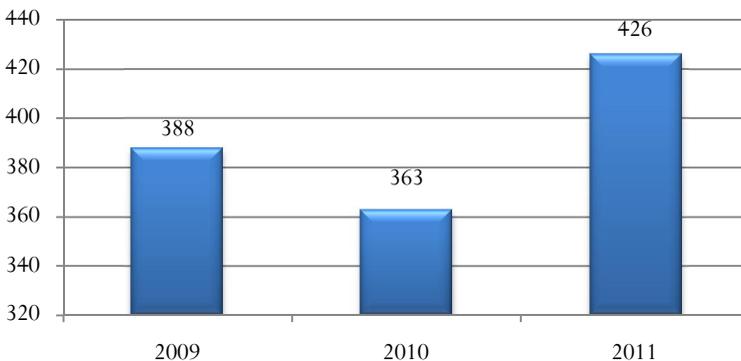
Pasca Orde Baru, kebebasan organisasi terbuka lebar. Setiap warga berhak berserikat atau mendirikan organisasi kemasyarakatan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Organisasi kemasyarakatan bahkan banyak yang beraktivitas dan eksis walaupun secara legalitas tidak terdaftar di pemerintah pusat maupun daerah. Sekalipun demikian, kementerian dalam negeri mengesahkan 426 organisasi kemasyarakatan pada tahun 2011, lebih banyak 63 organisasi dibanding tahun 2010 sebanyak 363, sebagaimana ditampilkan pada Grafik 4.5. Organisasi

masyarakat tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Dalam Tabel 4.26 disajikan jumlah desa yang di dalamnya terdapat organisasi non-profit pada Tahun 2011.

Organisasi masyarakat di Indonesia memiliki berbagai bentuk dan orientasi. Tidak semua organisasi memiliki anggota dan basis massa. Sebagian organisasi hanya beranggotakan beberapa orang namun memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Masyarakat umumnya tidak terasosiasi secara langsung dengan organisasi seperti ini, namun kepentingan-kepentingan mereka terhadap pemerintah kerap diperjuangkan oleh organisasi. Bentuk lain dalam artikulasi kepentingan dapat dilihat dari organisasi masyarakat yang berbasis massa. Di Indonesia, organisasi masyarakat identik dengan dua organisasi bercorak keagamaan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dua organisasi ini dapat dikatakan terbesar di Indonesia, memiliki anggota dan jaringan yang mengakar hingga di tingkat desa (Tabel 4.27 dan Tabel 4.28).

Di Indonesia juga terdapat berbagai organisasi internasional non-pemerintahan yang bergerak di berbagai bidang kerja. Dalam satu dekade terakhir terdapat 109 organisasi yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri (Tabel 4.29). Organisasi internasional non-pemerintahan paling banyak tercatat pada tahun 2009 dengan 33 organisasi dimana paling banyak bergerak di bidang kesehatan (29 organisasi). Sebanyak 49 dari keseluruhan organisasi tersebut berasal dari negara-negara Eropa, dan 45 organisasi berasal dari Amerika (Tabel 4.30). Lebih dari setengah (59) dari organisasi tersebut memiliki kantor pusat di Jakarta, sebagian kecil tersebar di berbagai provinsi. Di luar Jakarta, paling banyak terdapat di Aceh dengan 9 organisasi (Tabel 4.31).

Grafik 4.5 Jumlah Pengesahan Organisasi Masyarakat 2009-2011



Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2011)

Tabel 4.26 Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Kegiatan Lembaga Non Profit Tahun 2011

Provinsi	Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Sosial	Organisasi Profesi	Lembaga Keagamaan	LSM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	295	119	38	408	152
Sumatera Utara	813	179	87	925	452
Sumatera Barat	281	97	73	278	147
Riau	272	64	38	171	174
Jambi	132	43	28	199	127
Sumatera Selatan	358	84	44	251	224
Bengkulu	181	198	45	300	111
Lampung	802	143	145	608	202
Bangka Belitung	55	19	13	104	47
Kepulauan Riau	69	38	20	67	82
DKI Jakarta	118	80	34	65	55
Jawa Barat	1.423	478	209	1.525	870
Jawa Tengah	5.916	569	1.521	1.878	656
DI Yogyakarta	363	115	44	236	77
Jawa Timur	4.309	753	177	925	776
Banten	243	138	73	208	185
Bali	385	58	85	183	72
Nusa Tenggara Barat	265	177	24	154	177
Nusa Tenggara Timur	178	71	51	609	327
Kalimantan Barat	110	55	27	217	141
Kalimantan Tengah	102	34	23	345	88
Kalimantan Selatan	155	64	10	261	93
Kalimantan Timur	166	75	35	201	151
Sulawesi Utara	228	228	20	586	164
Sulawesi Tengah	563	89	56	908	134
Sulawesi Selatan	817	196	205	682	358
Sulawesi Tenggara	295	36	25	640	109
Gorontalo	74	33	6	178	43
Sulawesi Barat	105	37	26	261	49
Maluku	190	74	76	383	58
Maluku Utara	109	11	11	232	60
Papua Barat	63	17	10	172	22
Papua	114	31	16	300	57
Indonesia	19.549	4.403	3.295	14.460	6.440

Sumber: Potensi Desa, BPS (2011)

Tabel 4.27 Organisasi Masyarakat - Nahdlatul Ulama

Jaringan Nahdlatul Ulama	Jumlah
(1)	(2)
Pengurus Wilayah (Provinsi)	31
Pengurus Cabang (Kabupaten/Kota)	339
Pengurus Cabang Istimewa	12
Majelis Wakil Cabang (Kecamatan)	2.63
Pengurus Ranting (Desa/Kelurahan)	37.125
TK/TPQ	8.522
SD	197
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	3.861
SLTP	378
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	733
SLTA	211
Madrasah Aliyah (MA)	212
Pesantren	6.830
Rumah Sakit, Poliklinik dan Rumah Bersalin	49
Koperasi (Koperasi An Nisa)	247
Basis GBLP (Gerakan Buruh Lapangan Pekerjaan)	135

Sumber: *www.nu.or.id* (2011)

Tabel 4.28 Organisasi Masyarakat - Muhammadiyah

Jaringan Muhammadiyah	Jumlah
(1)	(2)
Wilayah (Provinsi)	33
Daerah (Kabupaten/Kota)	417
Cabang (Kecamatan)	3.221
Ranting (Desa/Kelurahan)	8.107
TK/TPQ	4.623
Sekolah Dasar (SD)/MI	2.604
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs	1.772
Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA	1.143
Pondok Pesantren	67
Jumlah total Perguruan tinggi Muhammadiyah	172
Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dll	457
Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga, dll.	318
Panti jompo	54
Rehabilitasi Cacat	82
Sekolah Luar Biasa (SLB)	71
Masjid	6.118
Musholla	5.080
Tanah	20.945.504 M ²

Sumber: *www.muhammadiyah.or.id* (2011)

Tabel 4.29 Jumlah Organisasi Internasional Non-Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan Tahun Terdaftar dan Bidang Kerja

Bidang	Tahun								Jumlah
	< 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lingkungan dan Konservasi	1	0	1	1	4	6	2	1	16
Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	2	6	4	1	13
Kesehatan	0	0	4	1	11	6	6	1	29
Pemberdayaan Masyarakat	3	1	3	0	4	7	4	0	22
Pendidikan	0	1	0	1	2	4	1	0	9
Bantuan Kemanusiaan	0	2	2	2	2	2	3	0	13
Penyediaan Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Pelestarian Arsip Kuno	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Demokrasi	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Pertanian	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Hukum dan HAM	0	0	0	1	0	1	0	0	2
Jumlah	4	4	10	6	26	33	23	3	109

Sumber: Diolah Dari Kementerian Luar Negeri (2011)

Tabel 4.30 Jumlah Organisasi Internasional Non-Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan Tahun Terdaftar dan Benua Asal

Benua	Tahun								Jumlah
	< 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Amerika	0	2	4	1	14	14	10	0	45
Eropa	4	2	5	3	10	12	12	1	49
Australia	0	0	1	0	1	3	0	1	6
Asia	0	1	1	2	0	3	0	1	8
Afrika	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Jumlah	4	5	11	6	26	32	22	3	109

Sumber: Diolah Dari Kementerian Luar Negeri (2011)

Tabel 4.31 Jumlah Organisasi Internasional Non-Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan Tahun Terdaftar dan Kantor Pusat

Kantor Pusat	Tahun								Jumlah
	< 2005	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jakarta	3	3	6	5	13	16	11	2	59
Nias	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Aceh	0	0	2	1	3	1	2	0	9
DIY	0	0	1	0	0	4	1	1	7
Bali	0	0	0	0	0	5	1	0	6
Sumbar	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Jambi	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medan	0	0	1	0	3	1	1	0	6
Depok	0	5	0	0	0	0	0	0	5
Salatiga	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Bandung	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Bogor	0	0	1	0	1	1	1	0	4
Belum Ada	1	0	0	1	1	1	2	0	6
Jumlah	3	8	11	6	22	30	20	3	109

Sumber: Diolah Dari Kementerian Luar Negeri (2011)

4.6 Media Massa

Dalam teori demokrasi, media massa, baik cetak maupun elektronik, yang meliputi harian, mingguan, majalah, *newsletter*, televisi dan radio merupakan "wilayah demokrasi" keempat, di samping 3 "wilayah demokrasi" lainnya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bisa dikatakan media massa telah menjadi pilar demokrasi keempat di samping tiga pilar demokrasi lainnya (Rais, 2008: 115). Bahkan, dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya *Universal Declaration of Human Rights*, Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 59 (I) tertanggal 14 Desember 1946 menyatakan bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan "suci" oleh PBB (Hendrayana, 2010:69). Istilah kebebasan pers sebenarnya nama generik untuk seluruh hak bersifat asasi warga masyarakat, berupa hak untuk memperoleh informasi (*right to know*) yang diperlukan dalam membentuk dan membangun secara bebas pemikiran dan pendapatnya di satu pihak, dan hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat di pihak lain (*right to speech*). Makna ini berkaitan dengan tersedianya informasi secara bebas, baik informasi sosial maupun estetis di tengah masyarakat (Siregar, 2006:1).

Sejumlah ahli, melihat kebebasan pers dari dua dimensi, yakni kebebasan di level struktur dan penampilan (*performance*). Pertama, kebebasan di level struktur. Di level ini, kebebasan pers dilihat dari apakah ada jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan pers (McQuail, 2005:193-194). Ada sejumlah kondisi struktural yang penting dan harus ada sebagai jaminan atas kebebasan pers, misalnya: tidak ada sensor dan pembredelan. Adanya kebebasan untuk mempublikasikan berita, dan tidak ada kewajiban memberitakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh redaksi media. Keputusan mengenai peristiwa apa yang diliput dan berita apa yang dipublikasikan didasarkan pada pertimbangan redaksi media. Kondisi struktural lain yang penting adalah bebas dari kontrol pemilik dan kekuatan ekonomi lainnya. Selain dari penguasa, pers bebas juga ditandai oleh bebas dari tekanan atau kontrol dari pemilik. Kedua, kebebasan di level penampilan/pelaksanaan (*performance*). Ini berkaitan dengan bagaimana pers atau media menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk kepentingan publik. Kebebasan yang dimiliki oleh media seharusnya bisa dimanfaatkan oleh media sebagai alat kontrol (*watchdog*) terhadap kekuasaan. Kebebasan pers itu juga seharusnya bisa dipakai untuk menyajikan berita yang berguna dan relevan bagi publik (Luwarso *et al*, 2008:7-8).

Terbitnya Undang-Undang No. 40/1999 tentang pers, menjadi pondasi penting yang memberikan jaminan pada kebebasan pers di Indonesia. Sekalipun demikian, jika dibandingkan dengan negara lain, menurut indeks kebebasan pers dari *Freedom House* pada tahun 2012

kebebasan pers Indonesia masih dikategorikan *partly free* dengan skor 49 (Tabel 4.39). Skor indeks kebebasan pers *Freedom House*, memberikan kategori *free* jika berada pada angka 0-30, *partly free* pada rentang 31-60, dan *not free* pada rentang 61-100. Jika dicermati melalui perbandingan skor Indonesia Tahun 1994 – 2012, nampak dinamika kebebasan pers Indonesia dengan pasang-surut yang sangat tajam. Peningkatan pengekangan pers yang sangat drastis, terlihat pada tahun 1995 (Tabel 4.38). Beranjak dari skor 58 yang masih tergolong *partly free* pada 1994 menjadi 71 pada tahun 1995, dan terus memburuk hingga mencapai skor 77 pada tahun 1998 (Grafik 4.6). Setelah itu kebebasan pers Indonesia memiliki trend yang semakin membaik, naik drastis menjadi 58 pada Tahun 1999 hingga mencapai skor 49 pada Tahun 2012, yang merupakan skor terbaik kedua yang pernah dicapai setelah skor Tahun 2001 (47).

Jumlah media massa baik yang harian, mingguan, tabloid, majalah, atau buletin dinamis setiap tahun (Tabel 4.32). Selain itu, sejak 2004 mulai muncul banyak kelompok-kelompok penerbitan surat kabar sebagaimana ditampilkan Tabel 4.33 (Sudibyo *et al*, 2010:11). Tiras media cetak, serta jumlah media cetak setiap provinsi ditampilkan pada Tabel 4.34 - 4.35. Perkembangan media massa dalam format elektronik juga semakin banyak. Disamping televisi nasional, jumlah televisi lokal terus bertambah di berbagai tempat. Tabel 4.30 menampilkan jumlah televisi dan radio yang terdapat di setiap provinsi. Kebebasan pers sekalipun dilindungi, namun juga dibatasi oleh undang-undang dan kode etik jurnalistik. Pelanggaran terhadap kaidah tersebut dapat dilaporkan pada Dewan Pers. Sepanjang 2007 – 2009, jumlah dan jenis pengaduan yang masuk pada Dewan Pers juga terus bertambah tiap tahun (Tabel 4.37). Sementara Tabel 4.40 menampilkan jumlah desa/kelurahan yang dapat dijangkau siaran televisi. Jumlah desa/kelurahan yang dapat dijangkau oleh sinyal handphone ditampilkan pada Tabel 4.41.

Tabel 4.32 Perkembangan Jumlah Surat Kabar Tahun 2006-2010

Tahun	Harian	%	Mingguan	%	Tabloid	%	Majalah	%	Buletin	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2006	251	-	235	-	142	-	258	-	3	-
2007	269	7,17	147	37,45	167	17,61	297	15,12	3	0
2008	290	7,81	224	52,38	173	3,59	318	7,07	3	0
2009	302	4,14	232	3,57	177	2,31	322	1,26	3	0
2010	349	15,56	240	3,45	188	6,21	294	8,70	5	66,67

Sumber : Asmono Wikan, dalam Jurnal Pers Edisi No 5 Mei 2011

Tabel 4.33 Kelompok Surat Kabar

Kelompok Penerbit	Jumlah Surat Kabar
(1)	(2)
Kompas Gramedia (KKG)	81
Jawa Pos	122
Femina	11
Bali Pos	7
Mugi Rekso Abadi (MRA)	8
PinPoint	14
Pikiran Rakyat	8
Sari	4
Bisnis Indonesia	7
Pos Kota	3
Media Indonesia	2
Subentra Cipta Media	4
Info Kelapa Gading	3
Gatra	3
Tempo Inti Media	3
Mahaka Media	4
Media Nusantara Cipta (MNC)	3
Jumlah	291

Sumber: Sudibyo et al dalam Jurnal Dewan Pers Edisi No 3 Desember 2010

Tabel 4.34 Tiras Media Cetak 2006-2010

Jenis	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Harian	6.058.486	7.217.600	7.490.252	8.080.694	8.744.483
Mingguan	1.081.953	1.353.953	1.039.853	1.063.353	1.084.075
Tabloid	4.732.055	4.782.555	4.621.055	5.427.955	5.400.803
Majalah	5.525.857	5.735.857	5.925.857	6.234.357	6.235.243
Buletin	7.809	7.809	7.809	7.809	33.809
Jumlah	17.406.160	19.097.774	19.084.826	20.814.168	21.498.413

Sumber: Asmoro Wikan, dalam Jurnal Pers Edisi No 5 Mei 2011

Tabel 4.35 Rekapitulasi Media Cetak berdasarkan Provinsi Tahun 2010

Propinsi	Harian	Mingguan	Bulan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4	3	-	7
Sumatera Utara	29	35	4	68
Sumatera Barat	4	17	-	21
Riau	20	-	2	22
Kepulauan Riau	5	1	-	6
Jambi	9	3	-	12
Bengkulu	6	-	-	6
Sumatera Selatan	10	4	-	14
Bangka Belitung	4	-	-	4
Lampung	10	5	-	15
Banten	6	4	8	18
DKI Jakarta	46	133	43	222
Jawa Barat	10	10	15	35
Jawa Tengah	9	5	6	20
D I Yogyakarta	5	3	6	14
Jawa Timur	13	18	37	68
Bali	8	9	8	25
Nusa Tenggara Barat	6	1	1	8
Nusa Tenggara Timur	4	3	1	8
Kalimantan Barat	7	3	3	13
Kalimantan Selatan	8	10	-	18
Kalimantan Tengah	4	6	1	11
Kalimantan Timur	10	1	5	16
Sulawesi Selatan	7	17	8	32
Sulawesi Tenggara	7	-	-	7
Sulawesi Tengah	9	2	1	12
Gorontalo	3	1	-	4
Sulawesi Utara	10	2	2	14
Sulawesi Barat	1	-	-	1
Maluku	4	2	-	6
Maluku Utara	5	4	-	9
Papua	6	3	-	9
Papua Barat	2	-	-	2
Total	306	389	257	952

Sumber: diolah dari Dewan Pers (2011)

Tabel 4.36 Rekapitulasi Media Elektronik Berdasarkan Provinsi Tahun 2010

Provinsi	Radio	Televisi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10	10	20
Sumatera Utara	5	2	7
Sumatera Barat	18	-	18
Riau	9	5	14
Kepulauan Riau	-	2	2
Jambi	3	1	4
Bengkulu	6	-	6
Sumatera Selatan	22	3	25
Bangka Belitung	8	-	8
Lampung	3	3	6
Banten	4	1	5
DKI Jakarta	26	14	40
Jawa Barat	3	2	5
Jawa Tengah	16	4	20
D.I.Yogyakarta	20	1	21
Jawa Timur	86	13	99
Bali	6	1	7
Nusa Tenggara Barat	5	1	6
Nusa Tenggara Timur	24	-	24
Kalimantan Barat	11	-	11
Kalimantan Selatan	24	-	24
Kalimantan Tengah	10	1	11
Kalimantan Timur	3	2	5
Sulawesi Selatan	28	-	28
Sulawesi Tenggara	12	1	13
Sulawesi Tengah	4	-	4
Gorontalo	1	-	1
Sulawesi Utara	4	-	4
Sulawesi Barat	-	-	0
Maluku	6	1	7
Maluku Utara	-	-	0
Papua	1	-	1
Papua Barat	-	-	0
Total	378	118	496

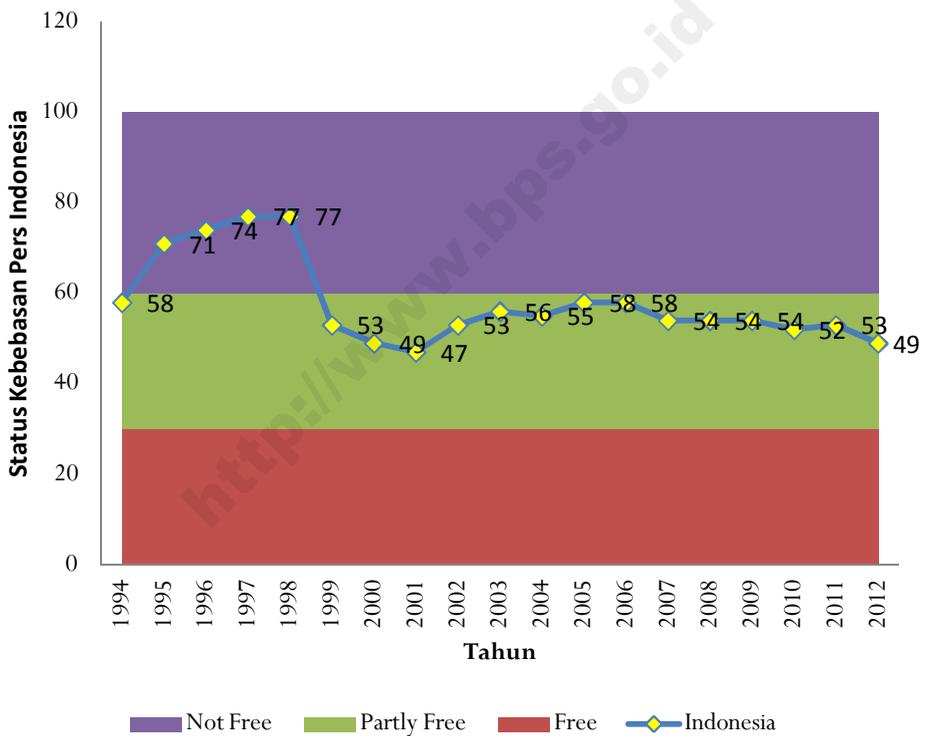
Sumber: diolah dari Dewan Pers

Tabel 4.37 Pengaduan Pada Dewan Pers

Pihak Yang Terlibat	2007	%	2008	%	2009	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemerintah mengadukan media	141	44,34	144	33,96	222	50,23
Media mengadukan pemerintah	24	7,55	20	4,72	21	4,75
Masyarakat mengadukan media	117	36,79	145	34,20	147	33,26
Media mengadukan masyarakat	14	4,40	17	4,01	11	2,49
Wartawan mengadukan media	11	3,46	7	1,65	17	3,85
lain-lain	11	3,46	91	21,46	24	5,43
Jumlah	318	100,00	424	100,00	442	100,00

Sumber: Dewan Pers

Grafik 4.6 Status Kebebasan Pers Indonesia Tahun 1994 – 2012



Sumber: Diolah dari Freedom House (2012)

Tabel 4.38 Kebebasan Pers Asia-Pasifik 1994 - 2003

Kebebasan Pers	1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003	
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
Afghanistan	N/A	NF	90	NF	90	NF	100	NF	100	NF	100	NF	90	NF	95	NF	N/A	N/A	74	NF
Australia	9	F	7	F	8	F	10	F	14	F										
Bangladesh	52	PF	49	PF	49	PF	57	PF	57	PF	59	PF	60	PF	60	PF	63	NF	65	NF
Bhutan	66	NF	62	NF	62	NF	65	NF	65	NF	80	NF	76	NF	76	NF	72	NF	70	NF
Brunei	66	NF	73	NF	74	NF	78	NF	76	NF										
Myanmar	90	NF	99	NF	99	NF	99	NF	99	NF	97	NF	100	NF	100	NF	96	NF	94	NF
Kamboja	50	PF	60	PF	65	NF	65	NF	65	NF	62	NF	61	NF	61	NF	68	NF	64	NF
China	89	NF	83	NF	83	NF	83	NF	81	NF	81	NF	80	NF	80	NF	80	NF	80	NF
Timorleste	N/A	N/A	21	F	21	F	22	F												
Fiji	55	PF	56	PF	57	PF	60	PF	60	PF	59	PF	58	PF	44	PF	33	PF	29	F
Hong Kong	30	F	30	F	30	F	41	PF	N/A	N/A										
India	38	PF	49	PF	48	PF	40	PF	37	PF	37	PF	42	PF	42	PF	42	PF	45	PF
Indonesia	58	PF	71	NF	74	NF	77	NF	77	NF	53	PF	49	PF	47	PF	53	PF	56	PF
Japan	21	F	20	F	21	F	20	F	19	F	19	F	19	F	23	F	17	F	17	F
Kiribati	26	F	24	F	18	F	18	F	17	F	17	F	17	F	22	F	21	F	26	F
Laos	70	NF	68	NF	62	NF	62	NF	66	NF	66	NF	66	NF	69	NF	82	NF	80	NF
Malaysia	58	PF	64	NF	61	NF	61	NF	61	NF	66	NF	70	NF	70	NF	71	NF	71	NF
Maldives	68	NF	62	NF	68	NF	65	NF	66	NF	66	NF	65	NF	65	NF	61	NF	64	NF
Kep. Marshall	18	F	19	F	8	F	8	F	8	F	8	F	8	F	8	F	10	F	10	F
Micronesia	25	F	23	F	23	F	23	F	26	F	26	F	24	F	22	F	20	F	17	F
Mongolia	40	PF	41	PF	34	PF	34	PF	34	PF	30	F	29	F	28	F	31	PF	36	PF
Nauru	20	F	18	F	6	F	6	F	6	F	6	F	6	F	13	F	27	F	26	F
Nepal	53	PF	54	PF	52	PF	56	PF	59	PF	59	PF	59	PF	57	PF	60	PF	65	NF
New Zealand	8	F	8	F	6	F	6	F	6	F	8	F	8	F	8	F	8	F	8	F
North Korea	90	NF	92	NF	100	NF	96	NF	96	NF										
Pakistan	58	PF	59	PF	60	PF	54	PF	58	PF	60	PF	64	NF	57	PF	57	PF	58	PF
Palau	N/A	N/A	9	F																
Papua Nugini	25	F	23	F	30	F	30	F	28	F	28	F	28	F	29	F	26	F	25	F
Philippines	55	PF	46	PF	46	PF	46	PF	30	F										
Samoa	30	F	29	F	28	F	28	F	28	F	31	PF	34	PF	21	F	23	F	24	F
Singapore	60	PF	65	NF	61	NF	66	NF	66	NF	66	NF	66	NF	68	NF	68	NF	66	NF
Kep. Solomon	22	F	18	F	13	F	14	F	14	F	16	F	18	F	22	F	24	F	25	F
South Korea	29	F	28	F	22	F	25	F	28	F	28	F	27	F	27	F	30	F	29	F
Sri Lanka	43	PF	41	PF	46	PF	54	PF	50	PF	58	PF	70	NF	74	NF	63	NF	52	PF
Taiwan	29	F	30	F	30	F	28	F	25	F	25	F	21	F	22	F	21	F	24	F
Thailand	54	PF	49	PF	31	PF	34	PF	31	PF	30	F	30	F	29	F	30	F	36	PF
Tonga	35	PF	37	PF	35	PF	41	PF	39	PF	39	PF	36	PF	36	PF	36	PF	32	PF
Tuvalu	N/A	N/A	16	F																
Vanuatu	45	PF	54	PF	42	PF	42	PF	42	PF	42	PF	44	PF	37	PF	24	F	21	F
Vietnam	71	NF	68	NF	68	NF	69	NF	71	NF	71	NF	75	NF	80	NF	82	NF	82	NF

Sumber: Freedom Of The Press, Freedom House (2012)

Ket : N = Nilai
 S = Status
 F = Free
 PF = Partly Free
 NF = Not Free
 N/A = Not Available

Tabel 4.39 Kebebasan Pers Asia Pasifik 2004 - 2012

Kebebasan Pers	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
Afghanistan	72	NF	68	NF	69	NF	69	NF	71	NF	74	NF	76	NF	75	NF	74	NF
Australia	14	F	18	F	19	F	21	F	21	F	22	F	22	F	21	F	21	F
Bangladesh	68	NF	68	NF	68	NF	66	NF	68	NF	63	NF	56	PF	54	PF	52	PF
Bhutan	68	NF	66	NF	65	NF	62	NF	61	NF	61	NF	57	PF	57	PF	58	PF
Brunei	74	NF	75	NF	77	NF	76	NF	75	NF								
Myanmar	95	NF	96	NF	96	NF	96	NF	97	NF	96	NF	95	NF	94	NF	85	NF
Kamboja	63	NF	62	NF	61	NF	58	PF	60	PF	61	NF	61	NF	63	NF	63	NF
China	80	NF	82	NF	83	NF	84	NF	84	NF	85	NF	84	NF	85	NF	85	NF
Timorleste	29	F	30	F	39	PF	42	PF	38	PF	37	PF	35	PF	35	PF	35	PF
Fiji	29	F	30	F	28	F	39	PF	37	PF	40	PF	54	PF	57	PF	58	PF
Hong Kong	N/A	N/A	28	F	29	F	30	F	30	F	33	PF	33	PF	32	PF	33	PF
India	41	PF	38	PF	37	PF	35	PF	35	PF	36	PF	33	PF	35	PF	37	PF
Indonesia	55	PF	58	PF	58	PF	54	PF	54	PF	54	PF	52	PF	53	PF	49	PF
Japan	18	F	20	F	20	F	21	F	22	F								
Kiribati	27	F	26	F	28	F	26	F	26	F	27	F	27	F	27	F	27	F
Laos	82	NF	83	NF	81	NF	81	NF	83	NF	86	NF	84	NF	85	NF	84	NF
Malaysia	69	NF	69	NF	65	NF	68	NF	65	NF	65	NF	64	NF	64	NF	63	NF
Maldives	64	NF	68	NF	70	NF	68	NF	66	NF	56	PF	50	PF	50	PF	51	PF
Kep. Marshall	12	F	13	F	15	F	17	F										
Micronesia	19	F	18	F	20	F	20	F	21	F								
Mongolia	36	PF	35	PF	34	PF	36	PF	38	PF	41	PF	39	PF	39	PF	37	PF
Nauru	25	F	29	F	30	F	28	F										
Nepal	65	NF	69	NF	77	NF	58	PF	57	PF	57	PF	59	PF	59	PF	55	PF
New Zealand	10	F	12	F	13	F	13	F	13	F	14	F	14	F	15	F	17	F
North Korea	98	NF	97	NF	97	NF	97	NF	98	NF	98	NF	99	NF	97	NF	97	NF
Pakistan	59	NF	61	NF	61	NF	63	NF	66	NF	62	NF	61	NF	61	NF	63	NF
Palau	11	F	13	F	14	F	16	F										
Papua Nugini	25	F	29	F	29	F	30	F	28	F	26	F	24	F	25	F	27	F
Philippines	34	PF	35	PF	40	PF	46	PF	45	PF	45	PF	48	PF	46	PF	42	PF
Samoa	24	F	25	F	29	F	30	F	29	F	29	F	29	F	30	F	29	F
Singapore	64	NF	66	NF	66	NF	69	NF	69	NF	68	NF	68	NF	68	NF	67	NF
Kep. Solomon	30	F	30	F	30	F	30	F	30	F	30	F	29	F	29	F	28	F
South Korea	29	F	29	F	30	F	32	PF	32	PF								
Sri Lanka	53	PF	56	PF	58	PF	63	NF	67	NF	70	NF	72	NF	71	NF	72	NF
Taiwan	23	F	21	F	20	F	20	F	20	F	23	F	24	F	25	F	25	F
Thailand	39	PF	42	PF	50	PF	59	PF	56	PF	57	PF	58	PF	62	NF	60	PF
Tonga	44	PF	37	PF	32	PF	31	PF	31	PF	32	PF	32	PF	31	PF	29	F
Tuvalu	19	F	20	F	26	F												
Vanuatu	23	F	24	F	25	F	24	F	23	F	23	F	23	F	25	F	26	F
Vietnam	82	NF	82	NF	79	NF	77	NF	82	NF	83	NF	82	NF	83	NF	84	NF

Sumber: Freedom Of The Press, Freedom House (2012)

Ket : N = Nilai
 S = Status
 F = Free
 PF = Partly Free
 NF = Not Free
 N/A = Not Available

Tabel 4.40 Banyaknya Desa Menurut Ketersediaan Program TV yang Dapat Diterima Tahun 2011

Provinsi	Program TV			
	TVRI	Swasta Nasional	Luar Negeri	Lokal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2.211	1.614	-	1.111
Sumatera Utara	2.006	1.417	309	1.247
Sumatera Barat	589	436	75	457
Riau	548	370	284	346
Jambi	633	326	-	314
Sumatera Selatan	1.600	1.235	-	926
Bengkulu	586	346	-	419
Lampung	1.712	1.807	-	1.287
Bangka Belitung	96	230	-	45
Kepulauan Riau	173	175	175	155
DKI Jakarta	267	267	-	267
Jawa Barat	4.743	5.187	281	3.650
Jawa Tengah	7.964	8.194	-	6.150
DI Yogyakarta	429	435	-	408
Jawa Timur	7.771	8.007	-	6.900
Banten	1.340	1.363	42	1.176
Bali	615	582	7	586
Nusa Tenggara Barat	540	351	17	406
Nusa Tenggara Timur	849	212	31	248
Kalimantan Barat	434	218	262	175
Kalimantan Tengah	326	225	-	129
Kalimantan Selatan	1.329	1.023	36	844
Kalimantan Timur	352	302	117	150
Sulawesi Utara	660	617	92	584
Sulawesi Tengah	212	188	5	151
Sulawesi Selatan	1.065	828	78	629
Sulawesi Tenggara	443	288	25	188
Gorontalo	260	120	3	173
Sulawesi Barat	133	-	-	10
Maluku	143	85	-	74
Maluku Utara	65	-	-	-
Papua Barat	55	22	9	11
Papua	201	153	36	106
Indonesia	40.350	36.623	1.884	29.322

Sumber: Potensi Desa 2011 – BPS

**Tabel 4.41 Banyaknya Desa Menurut Ketersediaan Sinyal Telepon Genggam
Tahun 2011**

Provinsi	Sinyal Kuat	Sinyal Lemah	Tidak Ada Sinyal	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4.803	1.486	194	6.483
Sumatera Utara	3.891	1.520	386	5.797
Sumatera Barat	751	236	46	1.033
Riau	1.172	430	53	1.655
Jambi	918	397	57	1.372
Sumatera Selatan	2.119	994	73	3.186
Bengkulu	1.097	376	36	1.509
Lampung	1.762	645	57	2.464
Bangka Belitung	318	41	2	361
Kepulauan Riau	260	72	21	353
DKI Jakarta	267	-	-	267
Jawa Barat	5.282	579	44	5.905
Jawa Tengah	7.356	1.193	28	8.577
DI Yogyakarta	398	39	1	438
Jawa Timur	7.041	1.406	55	8.502
Banten	1.285	244	6	1.535
Bali	662	51	3	716
Nusa Tenggara Barat	926	115	43	1.084
Nusa Tenggara Timur	1.456	1.225	285	2.966
Kalimantan Barat	928	673	366	1.967
Kalimantan Tengah	625	625	278	1.528
Kalimantan Selatan	1.513	423	64	2.000
Kalimantan Timur	830	449	186	1.465
Sulawesi Utara	1.149	415	129	1.693
Sulawesi Tengah	938	484	393	1.815
Sulawesi Selatan	1.934	891	157	2.982
Sulawesi Tenggara	1.130	683	308	2.121
Gorontalo	445	229	57	731
Sulawesi Barat	283	236	119	638
Maluku	387	245	392	1.024
Maluku Utara	406	322	351	1.079
Papua Barat	301	206	932	1.439
Papua	705	342	2.877	3.924
Indonesia	53.338	17.272	7.999	78.609

Sumber: Potensi Desa 2011 – BPS

**PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA
DAERAH**

5

<http://www.psn.go.id>

5.1. Pemilihan Umum

Keberadaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting. Dikatakan demikian karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti *et al*, 2008:12). Mengacu pendapat tersebut, terdapat dua hal penting dalam esensi Pemilu, transfer kekuasaan secara damai serta arah kebijakan publik, atau disebut juga sebagai pelembagaan konflik dan kepentingan (M. Asfar, dalam Aribowo *et al*, 2002:8).

Dalam banyak peristiwa, pergantian kekuasaan diluar mekanisme Pemilu seringkali menyebabkan kekacauan dan pertumpahan darah. Pemilu memungkinkan sebuah mekanisme pemilihan yang memahfumkan hasil-hasil pemilihan pejabat publik dapat lebih mudah diterima dan *legitimate*. Selain itu, Pemilu juga memungkinkan terjaminnya hak-hak politik setiap warga negara untuk memiliki peluang menduduki jabatan-jabatan publik dengan mekanisme dan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Dengan mekanisme ini dimungkinkan muncul wakil-wakil atau pemimpin-pemimpin terbaik atau yang paling dikehendaki oleh publik.

Pada negara yang plural seperti Indonesia, aspirasi dan kepentingan publik sangat heterogen. Kondisi geografis yang berbentuk kepulauan juga meniscayakan realitas berupa kesenjangan kualitas hidup pada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses serta jauh dari pusat kekuasaan. Kondisi tersebut secara normatif menempatkan Pemilu sebagai mekanisme yang memberikan peluang-peluang bagi konstituen untuk mengalami percepatan perbaikan kualitas hidup. Agregasi kepentingan konstituen akan diperoleh melalui proses dan mekanisme pembuatan kebijakan publik yang diwakili oleh wakil-wakil atau pemimpin hasil dari Pemilu.

Pemilihan umum memiliki tiga variabel pokok yaitu penyuaaran (*balloting*), distrik pemilihan (*electoral distric*), dan formula pemilihan (Rae, 1967 dalam Surbakti, 2010:226). Sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia, ketiga variabel telah mengalami berbagai perubahan, termasuk pada Pemilu terakhir yang dilakukan pada tahun 2009. Secara filosofis, perubahan sistem Pemilu di Indonesia bergerak pada semangat yang semakin terbuka dan memberikan peran yang lebih besar bagi konstituen sebagai penentu kandidat terpilih. Mekanisme ini berdampak pada keniscayaan adanya orientasi akuntabilitas politik kandidat terpilih yang lebih besar kepada publik.

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu Pemilu, yaitu Pemilu legislatif yang diselenggarakan lima tahunan. Pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sejak

tahun 2004 Indonesia mengenal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun yang sama ditetapkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian sejak tahun 2004, di Indonesia dikenal tiga pemilihan; Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

5.2 Pemilu Legislatif 2009

Hasil Pemilu legislatif 2009 memiliki legitimitas politik yang lebih besar dari pemilihan karena untuk pertama kalinya Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka murni. Pemilu yang diselenggarakan tanggal 9 April tersebut menghasilkan 560 anggota DPR yang terbagi atas 9 fraksi. Pada Pemilu tahun 2009 ditetapkan *parliamentary threshold* sebesar 2,5% dari suara nasional, sehingga hasilnya hanya 9 partai yang bisa melampaui angka tersebut dan masuk di DPR. Pada Pemilu ini Partai Demokrat menjadi pemenang dengan total pemilih sebanyak 21.655.295 pemilih atau 20,81% dari keseluruhan pemilih.

5.2.1 Hak Pilih

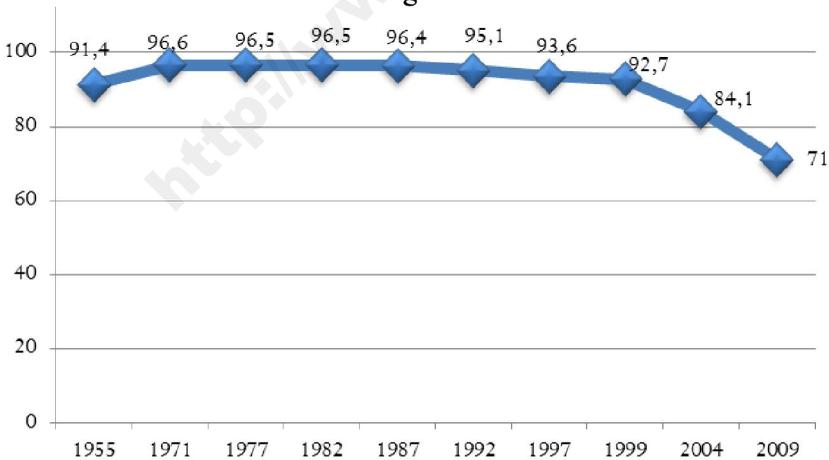
Selain proses pemilihan yang adil (*fairness of voting*) serta hak partai politik untuk mengorganisasi dan mengajukan kandidat, adanya hak pilih universal bagi pemilih (*universal adult suffrage*) merupakan tiga komponen penting untuk membangun sebuah sistem Pemilu yang kompetitif (Ozbudun, 1997:393-422 dalam Asfar, 2002:12). Hak pilih yang universal maknanya setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, status sosial, kecuali mereka yang kehilangan haknya atas perintah undang-undang. Hak memilih merupakan salah satu hak sipil politik yang dijamin oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu. Sekalipun terdapat regulasi yang menjamin hak pilih warga negara, bagian terpenting adalah bagaimana hak-hak politik tersebut dijamin dan dihormati pada pelaksanaan Pemilu. Jaminan hak pilih universal dalam regulasi maupun pelaksanaan merupakan tahapan paling awal dari terwujudnya integritas Pemilu (*electoral integrity*).

Pada tiga periode Pemilu terakhir jumlah pemilih terus mengalami peningkatan dari 116,3 juta (1999), 124,5 juta (2004), 176,4 juta (2009). Berdasarkan komposisi jenis kelamin, jumlah pemilih perempuan terus menurun dalam tiga Pemilu terakhir. Pada Pemilu tahun 1999 jumlah pemilih perempuan sebanyak 66,3 juta (57%) dan laki-laki 50,0 juta (43%), tahun

2004 pemilih perempuan sebanyak 66,0 juta (53%) dan laki-laki 58,5 juta (47%), sedangkan tahun 2009 pemilih perempuan 87,9 juta (48,8%) dan laki-laki 88,6 juta (50,2%). Berdasarkan sebaran pemilih, pada Pemilu 2009 mayoritas berada di Pulau Jawa 102,5 juta (59,8%) dengan alokasi 360 kursi (64,28%).

Pemilu bukan satu-satunya cara untuk menyalurkan partisipasi politik. Namun demikian, bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam Pemilu, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilih. Pada negara-negara demokrasi, tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan bersedia melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa pemerintahan terpilih memiliki legitimasi tinggi. Pada umumnya partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi pemerintahan yang rendah pula. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu legislatif tahun 1955 hingga Pemilu 2009 dapat dilihat pada Grafik 5.1.

Grafik 5.1. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif 1955 – 2009



Sumber: Diolah dari KPU

Tabel 5.1. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009

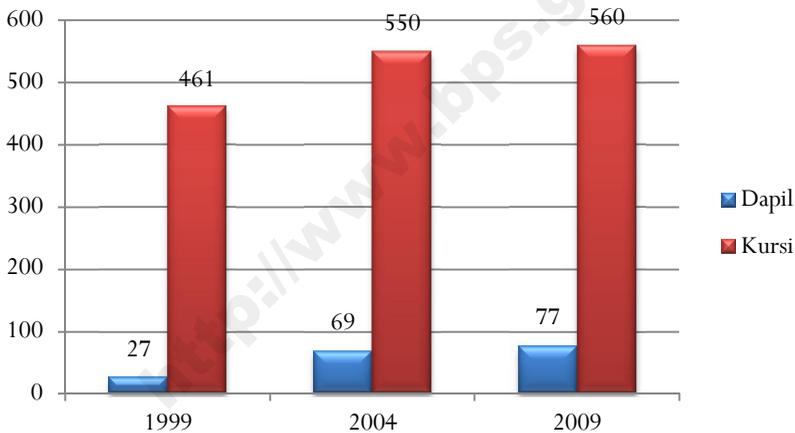
Provinsi	Jumlah DPT	Menggunakan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3.009.965	2.266.713	75,31
Sumatera Utara	9.180.973	5.999.956	65,35
Sumatera Barat	3.155.148	2.223.239	70,46
Riau	3.366.383	2.292.893	68,11
Jambi	2.086.780	1.556.080	74,57
Sumatera Selatan	5.192.693	3.982.645	76,70
Bengkulu	1.214.171	907.816	74,77
Lampung	5.351.733	3.978.504	74,34
Kep. Bangka Belitung	782.255	545.812	69,77
Kepulauan Riau	1.131.676	673.412	59,51
DKI Jakarta	7.026.772	3.998.435	56,90
Jawa Barat	29.002.479	21.204.505	73,11
Jawa Tengah	26.190.629	18.663.295	71,26
D.I. Yogyakarta	2.751.761	2.007.359	72,95
Jawa Timur	29.514.290	20.201.770	68,45
Banten	6.581.587	4.716.108	71,66
Bali	2.667.065	2.045.675	76,70
Nusa Tenggara Barat	3.135.420	2.354.271	75,09
Nusa Tenggara Timur	2.760.518	2.247.057	81,40
Kalimantan Barat	3.154.887	2.314.404	73,36
Kalimantan Tengah	1.506.244	1.044.569	69,35
Kalimantan Selatan	2.478.976	1.769.528	71,38
Kalimantan Timur	2.349.862	1.578.755	67,19
Sulawesi Utara	1.679.814	1.323.131	78,77
Sulawesi Tengah	1.658.693	1.296.819	78,18
Sulawesi Selatan	5.630.977	4.132.962	73,40
Sulawesi Tenggara	1.487.818	1.120.277	75,30
Gorontalo	688.272	572.519	83,18
Sulawesi Barat	753.203	587.334	77,98
Maluku	1.020.421	827.591	81,10
Maluku Utara	691.863	550.236	79,53
Papua Barat	521.735	423.752	81,22
Papua	2.064.532	1.851.783	89,70
Luar Negeri	1.475.847	329.161	22,30
Nasional		121.588.366	70,99

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

5.2.2 Sistem dan Peserta Pemilu

Secara umum dikenal tiga model sistem Pemilu yaitu; *pertama*, sistem mayoritas-pluralitas atau yang dikenal dengan sistem distrik; *kedua*, sistem Pemilu perwakilan berimbang; *ketiga*, sistem Pemilu campuran yang terdiri dari banyak model, dan salah satu diantaranya yang menonjol adalah sistem Pemilu semi-proporsional (Surbakti, 2008:28). Pada Pemilu 2004, Indonesia menggunakan sistem Pemilu semi-proporsional, sedangkan pada 2009 menggunakan proporsional terbuka murni. Dari segi alokasi kursi, sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009 terus mengalami peningkatan (Grafik 5.2). Demikian juga dengan Daerah Pemilihan (Dapil) juga semakin bertambah banyak. Hal tersebut disebabkan 2 faktor, karena pemekaran daerah dan pengurangan alokasi pada tiap Dapil. Pada Pemilu 2004 alokasi kursi sebanyak 3-12 kursi per Dapil, sedangkan pada 2009 sebanyak 3-10 kursi per Dapil.

Grafik 5.2 Jumlah Dapil dan Alokasi Kursi Pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009



Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Daftar calon tetap (DCT) yang mengikuti Pemilu 2009 sebanyak 11.218 calon yang terdiri dari 7.317 (65,22%) laki-laki dan 3.901 (34,78%) perempuan (Tabel 5.2). Dari sisi partai politik, tiga partai dengan caleg terbanyak yaitu Partai Demokrat 666 Caleg (5,93%), Partai Golkar 638 Caleg (5,68%) dan disusul oleh PDI-Perjuangan dengan 628 Caleg (5,59%) (Tabel 5.3). Dari DCT laki-laki terpilih sebanyak 461 orang (6,3%), dan perempuan sebanyak 99 orang (2,53%).

Tabel 5.2. Jumlah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Daerah Pemilihan Provinsi dan Jenis Kelamin

Daerah Pemilihan Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	189	86	275
Sumatera Utara	429	213	642
Sumatera Barat	175	101	276
Riau	154	74	228
Jambi	88	49	137
Sumatera Selatan	218	122	340
Bengkulu	64	38	102
Lampung	212	118	330
Bangka Belitung	49	29	78
Kepulauan Riau	58	27	85
DKI Jakarta	370	236	606
Jawa Barat	1.173	631	1.804
Jawa Tengah	894	469	1.363
DI Yogyakarta	107	58	165
Jawa Timur	974	509	1.483
Banten	326	171	497
Bali	106	49	155
Nusa Tenggara Barat	119	64	183
Nusa Tenggara Timur	210	97	307
Kalimantan Barat	138	75	213
Kalimantan Tengah	82	34	116
Kalimantan Selatan	127	78	205
Kalimantan Timur	96	53	149
Sulawesi Utara	82	60	142
Sulawesi Tengah	71	52	123
Sulawesi Selatan	311	155	466
Sulawesi Tenggara	80	39	119
Gorontalo	35	31	66
Sulawesi Barat	46	27	73
Maluku	80	41	121
Maluku Utara	55	27	82
Papua Barat	58	28	86
Papua	141	60	201
Nasional	7.317	3.901	11.218

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.3. Jumlah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Hati Nurani Rakyat	413	186	599
Partai Karya Peduli Bangsa	86	55	141
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	139	135	274
Partai Peduli Rakyat Nasional	212	76	288
Partai Gerakan Indonesia Raya	275	111	386
Partai Barisan Nasional	171	104	275
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	172	143	315
Partai Keadilan Sejahtera	363	216	579
Partai Amanat Nasional	413	179	592
Partai Perjuangan Indonesia Baru	35	20	55
Partai Kedaulatan	152	91	243
Partai Persatuan Daerah	93	66	159
Partai Kebangkitan Bangsa	259	133	392
Partai Pemuda Indonesia	181	95	276
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	76	36	112
Partai Demokrasi Pembaruan	235	165	400
Partai Karya Perjuangan	134	65	199
Partai Matahari Bangsa	180	123	303
Partai Penegak Demokrasi Indonesia	34	16	50
Partai Demokrasi Kebangsaan	144	106	250
Partai Republika Nusantara	161	68	229
Partai Pelopor	65	41	106
Partai Golongan Karya	446	192	638
Partai Persatuan Pembangunan	345	125	470
Partai Damai Sejahtera	207	115	322
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	114	57	171
Partai Bulan Bintang	266	129	395
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	406	222	628
Partai Bintang Reformasi	185	129	314
Partai Patriot	94	21	115
Partai Demokrat	445	221	666
Partai Kasih Demokrasi Indonesia	98	46	144
Partai Indonesia Sejahtera	191	122	313
Partai Kebangkitan Nasional Ulama	194	98	292
Partai Merdeka	58	31	89
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	51	41	92
Partai Sarikat Indonesia	81	46	127
Partai Buruh	143	76	219
Total	7.317	3.901	11.218

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Penentuan Caleg pemenang Pemilu pasca putusan MK praktis menegasikan usaha untuk meningkatkan representasi perempuan yang telah diadvokasi melalui *zipper* sistem pada Undang-Undang No.10/2008 tentang Pemilu. Ketentuan UU Pemilu dimana dalam tiga Caleg minimal terdapat satu perempuan dalam DCT praktis tidak bermakna karena dengan sistem

suara terbanyak semua Caleg dalam daftar memiliki peluang yang sama. Sekalipun demikian, Caleg perempuan ternyata memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Jumlah perempuan terpilih naik signifikan dari 65 orang (11,6%) pada 2004 menjadi 99 orang (18%) pada 2009. Jumlah perempuan di masing-masing fraksi relatif proporsional dengan perolehan kursi masing-masing fraksi (lihat Tabel 5.4). Jumlah perempuan terbanyak ada pada Fraksi Partai Demokrat dengan 35 orang, disusul Partai Golkar dengan 18 orang, kemudian PDI-Perjuangan dengan 17 orang. Rentang persentase perempuan terpilih jika dibandingkan dengan jumlah anggota fraksi berkisar antara 5,30% - 25%, dimana persentase tertinggi dimiliki PKB sementara terendah adalah PKS. Pemilu 2009 menghasilkan jumlah anggota DPR perempuan terbanyak (18%) jika dibandingkan dengan periode pemilu sebelumnya (Tabel 5.9).

Tabel 5.4 Nomor Urut Terpilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009

Partai	Nomor urut dalam DCT												Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Partai Demokrat	70	38	21	9	1	1	3	2	2	0	0	1	148
Partai Golkar	62	23	4	8	6	0	2	0	0	0	1	0	106
PDIP	53	27	7	3	1	0	2	1	0	0	0	0	94
PKS	51	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	57
PAN	32	6	4	2	0	1	1	0	0	0	0	0	46
PPP	28	7	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	38
PKB	18	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Partai Gerindra	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
Partai Hanura	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Jumlah	356	111	40	25	9	3	9	3	2	0	1	1	560
Persentase	63,6	19,8	7,1	4,5	1,6	0,5	1,6	0,5	0,4	0,0	0,2	0,2	100,0

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.5 Nomor Urut Caleg terpilih Perempuan dan laki-laki

No urut Caleg	Perempuan		Laki-Laki	
	Jumlah Terpilih	Persentase	Jumlah Terpilih	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	46	46,46	310	67,25
2	24	24,24	87	18,87
3	22	22,22	18	3,90
4	2	2,02	23	4,99
5	2	2,02	7	1,52
6	1	1,01	2	0,43
7	1	1,01	8	1,74
8	0	0,00	3	0,65
9	1	1,01	1	0,22
10	0	0,00	0	0,00
11	0	0,00	1	0,22
12	0	0,00	1	0,22
Jumlah	99	100,00	461	100,00

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum

5.2.3 Hasil Pemilu Legislatif 2009

Dari 171.256.442 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), hanya 121.588.366 (71%) yang menggunakan hak pilih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.488.581 (14,39%) suara tidak sah. Jika dihitung persentase suara sah terhadap jumlah DPT, maka Pemilu 2009 diperoleh dari 60,78% pemilih yang terdaftar di DPT (Tabel 5.6). Pemilu Legislatif dimenangkan oleh Partai Demokrat dengan 21 juta suara secara nasional (20,81%). Urutan kedua diraih oleh Partai Golkar, pemenang pada Pemilu tahun 2004 dengan 15 juta suara (14,45%) dan disusul oleh PDI Perjuangan di posisi ketiga dengan 14 juta suara (14,01%) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.7. Kemenangan Partai Demokrat terdistribusi merata semua pulau, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, Serta Maluku dan Papua. Demikian juga dengan urutan kedua dan ketiga, komposisi urutan pemenang tidak berubah di pulau-pulau tersebut. Pada level Provinsi, PDI-Perjuangan unggul di Provinsi Bangka Belitung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sedangkan Golkar masih tetap unggul di wilayah Indonesia Timur dan beberapa Provinsi di Sumatera seperti Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan. Partai Demokrat unggul mutlak di Pulau Jawa di 5 dari 6 Provinsi di Jawa. Kemenangan ini sangat signifikan karena pemilih yang tinggal di Jawa mencapai 64,28% dengan alokasi sebanyak 360 kursi.

Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah di masing-masing propinsi memilih empat orang untuk menjadi wakil setiap provinsi. Daftar calon DPD terbanyak terdapat pada Provinsi Banten dengan 69 kandidat, Sulawesi Tenggara dengan 62 calon, serta Lampung dengan 58 calon. Provinsi dengan kandidat paling sedikit adalah DI Yogyakarta dengan 12 calon, Papua dan Papua Barat masing-masing 15 calon. Jumlah calon perempuan di semua provinsi sebesar 121 calon, atau setara dengan 10,84%. Jumlah kandidat perempuan paling banyak berjumlah 9 orang, masing-masing di Provinsi Riau dan Lampung. Sementara jumlah calon perempuan paling sedikit terdapat di Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara, masing-masing hanya memiliki satu calon DPD perempuan (Tabel 5.8).

Tabel 5.6 Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Pada Pemilu Legislatif DPR RI Tahun 2009 Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Suara		Total Suara
	Sah	Tidak Sah	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1.838.915	427.798	2.266.713
Sumatera Utara	5.281.066	718.890	5.999.956
Sumatera Barat	2.022.541	200.698	2.223.239
Riau	2.034.649	258.244	2.292.893
Jambi	1.292.650	263.430	1.556.080
Sumatera Selatan	3.458.250	524.395	3.982.645
Bengkulu	758.696	149.120	907.816
Lampung	3.491.266	487.238	3.978.504
Kepulauan Bangka Belitung	459.227	86.585	545.812
Kepulauan Riau	593.568	79.844	673.412
DKI Jakarta	3.788.069	210.366	3.998.435
Jawa Barat	18.651.604	2.552.901	21.204.505
Jawa Tengah	15.072.888	3.590.407	18.663.295
DI Yogyakarta	1.752.775	254.584	2.007.359
Jawa Timur	16.289.604	3.912.166	20.201.770
Banten	3.990.958	725.150	4.716.108
Bali	1.699.468	346.207	2.045.675
Nusa Tenggara Barat	1.962.300	391.971	2.354.271
Nusa Tenggara Timur	2.051.582	195.475	2.247.057
Kalimantan Barat	2.036.704	277.700	2.314.404
Kalimantan Tengah	872.362	172.207	1.044.569
Kalimantan Selatan	1.463.490	306.038	1.769.528
Kalimantan Timur	1.355.072	223.683	1.578.755
Sulawesi Utara	1.239.392	83.739	1.323.131
Sulawesi Tengah	1.199.830	96.989	1.296.819
Sulawesi Selatan	3.688.770	444.192	4.132.962
Sulawesi Tenggara	993.592	126.685	1.120.277
Gorontalo	532.055	40.464	572.519
Sulawesi Barat	531.544	55.790	587.334
Maluku	772.579	55.012	827.591
Maluku Utara	519.735	30.501	550.236
Papua Barat	381.121	42.631	423.752
Papua	1.719.581	132.202	1.851.783
Luar Negeri	303.882	25.279	329.161
Nasional	104.099.785	17.488.581	121.588.366

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 5.7 Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif
DPR RI Tahun 2009**

No Urut	Nama Partai	Sebelum Keputusan MK		Setelah Keputusan MK	
		Perolehan Suara	%	Perolehan Suara	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	3,77	3.925.620	3,77
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.182	1,40	1.461.375	1,40
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625	0,72	745.965	0,72
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21	1.260.950	1,21
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	4,46	4.642.795	4,46
6	Partai Barisan Nasional	761.086	0,73	760.712	0,73
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0,90	936.133	0,90
8	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	7,88	8.204.946	7,89
9	Partai Amanat Nasional	6.254.580	6,01	6.273.462	6,03
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19	198.803	0,19
11	Partai Kedaulatan	437.121	0,42	438.030	0,42
12	Partai Persatua Daerah	550.581	0,53	553.299	0,53
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94	5.146.302	4,95
14	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40	415.563	0,40
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	316.752	0,30	317.433	0,31
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	896.660	0,86	896.959	0,86
17	Partai Karya Perjuangan	351.440	0,34	351.571	0,34
18	Partai Matahari Bangsa	414.750	0,40	415.294	0,40
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	139.554	0,13	139.988	0,13
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	669.417	0,64	671.356	0,65
21	Partai Republika Nusantara	630.780	0,61	631.814	0,61
22	Partai pelopor	342.914	0,33	345.092	0,33
23	Partai golongan Karya	15.037.757	14,45	15.031.497	14,45
24	Partai persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32	5.544.332	5,33
25	Partai Damai Sejahtera	1.541.592	1,48	1.522.032	1,46
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.696	0,45	468.856	0,45
27	Partai bulan bintang	1.864.752	1,79	1.864.642	1,79
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091	14,03	14.576.388	14,01
29	Partai bintang Reformasi	1.264.333	1,21	1.264.150	1,21
30	Partai Patriot	547.351	0,53	547.798	0,53
31	Partai Demokrat	21.703.137	20,85	21.655.295	20,81
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.553	0,31	325.771	0,31
33	Partai Indonesia Sejahtera	320.665	0,31	321.019	0,31
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.593	1,47	1.527.509	1,47
41	Partai Merdeka	111.623	0,11	111.609	0,11
42	Partai Nahdlatul Ummah indonesia	146.779	0,14	146.831	0,14
43	Partai Sarikat Indonesia	140.551	0,14	141.558	0,14
44	Partai buruh	265.203	0,25	265.369	0,26
Total Suara		104.099.785	100,00	104.048.118	100,00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.8 Jumlah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Menurut Provinsi Perwakilan dan Jenis Kelamin

Provinsi Perwakilan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	28	1	29
Sumatera Utara	36	2	38
Sumatera Barat	40	2	42
Riau	33	9	42
Jambi	48	8	56
Sumatera Selatan	33	8	41
Bengkulu	18	2	20
Lampung	49	9	58
Bangka Belitung	31	1	32
Kepulauan Riau	25	3	28
DKI Jakarta	36	5	41
Jawa Barat	25	1	26
Jawa Tengah	26	4	30
DI Yogyakarta	11	1	12
Jawa Timur	29	2	31
Banten	62	7	69
Bali	26	4	30
Nusa Tenggara Barat	39	3	42
Nusa Tenggara Timur	36	4	40
Kalimantan Barat	22	4	26
Kalimantan Tengah	26	2	28
Kalimantan Selatan	32	3	35
Kalimantan Timur	28	3	31
Sulawesi Utara	14	4	18
Sulawesi Tengah	33	8	41
Sulawesi Selatan	34	1	35
Sulawesi Tenggara	59	3	62
Gorontalo	13	6	19
Sulawesi Barat	29	2	31
Maluku	22	4	26
Maluku Utara	26	1	27
Papua Barat	13	2	15
Papua	13	2	15
Nasional	995	121	1.116

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

5.3. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang Dasar juga menyatakan bahwa calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebesar 72,22%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif tahun 2009 dengan angka partisipasi 70,99%. Jumlah hak pilih dan tingkat partisipasi berdasarkan provinsi ditampilkan pada Tabel 5.9, sedangkan persentase perolehan suara sah setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditampilkan pada Tabel 5.10.

Apabila tidak ada pasangan calon memperoleh suara lebih dari 50%, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali pada putaran kedua. Jika terdapat perolehan suara yang sama dari 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, maka penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, hanya dilakukan satu putaran karena pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono memperoleh suara di atas 50% pada putaran pertama. Perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.9. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

Provinsi	Jumlah DPT	Pemilih Tambahan (A7 dan KTP)	Total Pemilih	Menggunakan Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	3.008.235	8.778	3.017.013	2.318.034	76,83
Sumatra Utara	9.472.577	44.477	9.517.054	6.103.313	64,13
Sumatra Barat	3.320.356	19.811	3.340.167	2.361.608	70,70
Riau	3.647.420	26.587	3.674.007	2.441.556	66,45
Jambi	2.198.902	7.065	2.205.967	1.628.923	73,84
Sumatra Selatan	5.321.694	17.626	5.339.320	3.987.014	74,67
Bengkulu	1.273.544	3.178	1.276.722	885.100	69,33
Lampung	5.504.512	10.504	5.515.016	4.138.497	75,04
Bangka Belitung	833.096	3.222	836.318	575.959	68,87
Kepulauan Riau	1.245.850	12.963	1.258.813	773.592	61,45
DKI Jakarta	7.668.058	81.599	7.749.657	5.260.174	67,88
Jawa Barat	30.124.261	163.883	30.288.144	23.243.310	76,74
Jawa Tengah	26.323.595	60.702	26.384.297	18.691.146	70,84
D.I Yogyakarta	2.780.987	11.473	2.792.460	2.112.830	75,66
Jawa Timur	29.772.141	94.074	29.866.215	21.016.398	70,37
Banten	7.152.428	51.271	7.203.699	5.359.934	74,41
Bali	2.696.817	13.022	2.709.839	2.003.923	73,95
NTB	3.241.948	12.421	3.254.369	2.454.230	75,41
NTT	2.812.073	15.600	2.827.673	2.246.281	79,44
Kalimantan Barat	3.217.953	11.274	3.229.227	2.375.522	73,56
Kalimantan Tengah	1.607.969	8.601	1.616.570	1.061.158	65,64
Kalimantan Selatan	2.593.992	8.358	2.602.350	1.825.480	70,15
Kalimantan Timur	2.474.351	20.021	2.494.372	1.672.285	67,04
Sulawesi Utara	1.743.009	9.076	1.752.085	1.312.165	74,89
Sulawesi Tengah	1.761.130	13.567	1.774.697	1.388.325	78,23
Sulawesi Selatan	5.846.826	42.060	5.888.886	4.366.904	74,16
Sulawesi Tenggara	1.558.008	7.619	1.565.627	1.138.981	72,75
Gorontalo	710.097	4.201	714.298	582.060	81,49
Sulawesi Barat	786.556	3.316	789.872	598.376	75,76
Maluku	1.064.733	2.186	1.066.919	810.177	75,94
Maluku Utara	739.218	2.791	742.009	570.089	76,83
Papua Barat	573.356	2.397	575.753	431.684	74,98
Papua	2.188.082	10.527	2.198.609	1.880.617	85,54
Luar Negeri	1.147.660	0	1.147.660	367.980	32,06
Jumlah	176.411.434	804.250	177.215.684	127.983.625	72,22

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.10 Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Suara		Total Suara
	Sah	Tidak Sah	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2.245.119	72.915	2.318.034
Sumatera Utara	4.539.195	1.564.118	6.103.313
Sumatera Barat	2.287.153	74.455	2.361.608
Riau	2.345.315	96.241	2,441,556
Jambi	1.560.500	68.423	1.628.923
Sumatera Selatan	3.838.344	148.670	3.987.014
Bengkulu	850.231	34.869	885.100
Lampung	3.992.345	146.152	4.138.497
Kepulauan Bangka Belitung	549.694	26.265	575.959
Kepulauan Riau	748.576	25.016	773.592
DKI Jakarta	5.035.956	224.218	5.260.174
Jawa Barat	22.104.722	1.138.588	23.243.310
Jawa Tengah	17.490.429	1.200.717	18.691.146
DI Yogyakarta	1.975.647	137.183	2.112.830
Jawa Timur	19.450.762	1.565.636	21.016.398
Banten	5.149.798	210.136	5.359.934
Bali	1.912.337	91.586	2.003.923
Nusa Tenggara Barat	2.269.826	184.404	2.454.230
Nusa Tenggara Timur	2.134.794	111.487	2.246.281
Kalimantan Barat	2.286.206	89.316	2.375.522
Kalimantan Tengah	1.016.711	44.447	1.061.158
Kalimantan Selatan	1.728.858	96.622	1.825.480
Kalimantan Timur	1.605.372	66.913	1.672.285
Sulawesi Utara	1.262.275	49.890	1.312.165
Sulawesi Tengah	1.324.798	63.527	1.388.325
Sulawesi Selatan	4.222.786	144.118	4.366.904
Sulawesi Tenggara	1.094.115	44.866	1.138.981
Gorontalo	545.504	36.556	582.060
Sulawesi Barat	578.929	19.447	598.376
Maluku	787.985	22.192	810.177
Maluku Utara	551.513	18.576	570.089
Papua Barat	424.043	7.641	431.684
Papua	1.860.096	20.521	1.880.617
Luar Negeri	340.410	27.570	367.980
Nasional	121.504.481	6.479.144	127.983.625

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 5.11. Persentase Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2009 Menurut Provinsi

Provinsi	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		
	Megawati Soekarno Putri - Prabowo Subianto	Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono	Muhammad Jusuf Kalla - Wiranto
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2,40	93,25	4,35
Sumatera Utara	0,03	93,28	6,69
Sumatera Barat	5,89	79,93	14,18
Riau	23,69	64,07	12,24
Jambi	29,17	59,41	11,42
Sumatera Selatan	39,57	54,07	6,36
Bengkulu	23,24	64,14	12,62
Lampung	24,13	70,23	5,65
Kepulauan Bangka Belitung	38,56	48,74	12,70
Kepulauan Riau	26,50	64,36	9,14
DKI Jakarta	20,42	70,36	9,22
Jawa Barat	26,21	65,08	8,71
Jawa Tengah	38,28	53,06	8,66
DI Yogyakarta	28,10	61,71	10,19
Jawa Timur	30,42	60,32	9,26
Banten	26,98	65,06	7,97
Bali	51,92	43,03	5,05
Nusa Tenggara Barat	8,31	74,63	17,06
Nusa Tenggara Timur	41,30	52,73	5,97
Kalimantan Barat	37,12	54,03	8,86
Kalimantan Tengah	42,30	48,32	9,37
Kalimantan Selatan	21,80	64,02	14,18
Kalimantan Timur	27,61	51,89	20,49
Sulawesi Utara	31,15	54,82	14,04
Sulawesi Tengah	8,35	50,53	41,12
Sulawesi Selatan	3,98	31,62	64,41
Sulawesi Tenggara	8,00	45,61	46,38
Gorontalo	6,46	44,22	49,32
Sulawesi Barat	4,63	50,75	44,62
Maluku	24,49	53,70	21,81
Maluku Utara	20,34	38,94	40,72
Papua Barat	10,49	73,95	15,56
Papua	5,62	74,05	20,33
Luar Negeri	13,96	69,08	16,96
Total Perolehan Suara	26,79	60,80	12,41

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

5.4. Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Undang-Undang No 32/2004 menyebutkan bahwa DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah. Pada Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak dikenal *parliamentary threshold* sehingga banyak partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI tetapi memiliki kursi di DPRD. Khusus di Provinsi Aceh, jumlah kontestan sebanyak 44 Parpol, 38 Parpol nasional ditambah 6 Parpol lokal. Provinsi DKI Jakarta hanya menyelenggarakan Pemilu Legislatif tingkat Provinsi. Pemerintahan Kota di Jakarta hanya bersifat administratif sehingga tidak memiliki DPRD. Pasal 24 Undang-undang nomor 10 tahun 2008 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Sedangkan pasal 27 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Alokasi jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam pasal 23 dan pasal 26.

Jumlah Dapil DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Dengan demikian, jumlah Dapil paling banyak di pulau Jawa karena memiliki jumlah penduduknya paling banyak. Hanya Sumatera Utara daerah di luar Jawa yang memiliki 11 Dapil, sama dengan jumlah yang dimiliki Jawa barat dan Jawa Timur. Provinsi dengan jumlah Dapil paling sedikit terdapat di Sulawesi barat dengan hanya 3 Dapil. Demikian juga dengan Dapil DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Barat adalah yang paling sedikit, dengan jumlah 16 Dapil. Jumlah Dapil DPRD Kabupaten/Kota paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan 139 Dapil, karena memiliki 38 Kabupaten/Kota, terbanyak di Indonesia. Rata-rata jumlah Dapil di seluruh provinsi sebanyak 6,58 Dapil, sementara rata-rata jumlah Caleg di 33 provinsi sebanyak 978 orang. Banyaknya daerah pemilihan dan jumlah caleg pada Pemilu DPRD provinsi disajikan pada Tabel 5.12, sedangkan banyaknya daerah pemilihan pada Pemilu DPRD kabupaten/kota ditampilkan pada Tabel 5.13.

Tabel 5.12. Jumlah Daerah Pemilihan dan Jumlah Caleg DPRD Pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Tahun 2009

Provinsi	Jumlah Daerah Pemilihan	Jumlah Caleg DPRD
(1)	(2)	(3)
Aceh	8	1.060
Sumatera Utara	11	1.990
Sumatera Barat	5	748
Riau	7	939
Jambi	5	641
Sumatera Selatan	6	1.244
Bengkulu	7	812
Lampung	7	98
Kepulauan Bangka Belitung	7	585
Kepulauan Riau	6	561
DKI Jakarta	5	2.268
Jawa Barat	11	1.535
Jawa Tengah	10	1.343
DI Yogyakarta	5	604
Jawa Timur	11	1.698
Banten	6	814
Bali	9	801
Nusa Tenggara Barat	6	927
Nusa Tenggara Timur	7	1.081
Kalimantan Barat	8	1.179
Kalimantan Tengah	5	763
Kalimantan Selatan	6	819
Kalimantan Timur	5	1.047
Sulawesi Utara	6	859
Sulawesi Tengah	6	897
Sulawesi Selatan	7	1.507
Sulawesi Tenggara	5	771
Gorontalo	5	498
Sulawesi Barat	3	638
Maluku	7	1.021
Maluku Utara	5	711
Papua Barat	4	1.102
Papua	6	702
Total	217	32.263

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 5.13 Jumlah Daerah Pemilihan Pada Pemilu Legislatif
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009**

Provinsi	Jumlah Daerah Pemilihan
(1)	(2)
Aceh	87
Sumatera Utara	115
Sumatera Barat	66
Riau	48
Jambi	19
Sumatera Selatan	38
Bengkulu	64
Lampung	28
Kepulauan Bangka Belitung	55
Kepulauan Riau	23
DKI Jakarta	-
Jawa Barat	139
Jawa Tengah	181
DI Yogyakarta	26
Jawa Timur	191
Banten	37
Bali	37
Nusa Tenggara Barat	37
Nusa Tenggara Timur	77
Kalimantan Barat	55
Kalimantan Tengah	41
Kalimantan Selatan	46
Kalimantan Timur	47
Sulawesi Utara	46
Sulawesi Tengah	33
Sulawesi Selatan	95
Sulawesi Tenggara	16
Gorontalo	37
Sulawesi Barat	23
Maluku	26
Maluku Utara	24
Papua Barat	25
Papua	69
Total	1.851

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

5.5. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan capaian baru dalam demokrasi Indonesia. Melalui mekanisme tersebut paling kurang secara prosedural kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui Pilkada secara langsung, aspirasi rakyat dalam menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tersampaikan secara utuh tanpa distorsi sebagaimana jika dipilih oleh DPRD. Format pilkada secara langsung didasarkan pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perpu) menyusul keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *judicial review* sejumlah KPUD atas UU tersebut. Sebagai operasionalisasi dari UU No.32/2004 dan Perpu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi PP No. 17 tahun 2005.

Berkaitan dengan pencalonan, berbagai regulasi tentang pilkada tersebut mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen lokal tersebut. Mengenai mekanisme pencalonan, ayat 1, 3, dan 5 Pasal 37 PP No. 6/2005 secara berturut-turut mengatur bahwa:

1. Parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
2. Parpol atau gabungan parpol sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;
3. Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik.

Tabel 5.14 menampilkan waktu pelaksanaan dan banyaknya calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jumlah DPT dan suara sah ditampilkan pada Tabel 5.15, sementara perolehan suara ditampilkan pada Tabel 5.16. Pada Tabel 5.17 ditampilkan jenis kelamin serta latar belakang gubernur terpilih hingga tahun 2012.

Tabel 5.14. Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi	Pelaksanaan Pemilihan	Jumlah Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)
Aceh	9 April 2012	5
Sumatera Utara	16 April 2008	5
Sumatera Barat	30 Juni 2010	4
Riau	22 September 2008	3
Jambi	19 Juni 2010	4
Sumatera Selatan	07 Oktober 2008	2
Bengkulu	3 Juli 2010	5
Lampung	Oktober 2008	6
Kepulauan Bangka Belitung	23 Februari 2012	4
Kepulauan Riau	26 Mei 2010	3
DKI Jakarta	20 September 2012	5
Jawa Barat	13 April 2008	3
Jawa Tengah	22 Juni 2008	5
DI Yogyakarta	Gubernur Diangkat	-
Jawa Timur	23 Juli 2008	5
Banten	22 Oktober 2011	3
Bali	9 Juli 2008	3
Nusa Tenggara Barat	7 Juli 2008	4
Nusa Tenggara Timur	14 Juni 2008	3
Kalimantan Barat	20 September 2012	4
Kalimantan Tengah	5 Juni 2010	4
Kalimantan Selatan	2 Juni 2010	5
Kalimantan Timur	26 Mei 2008	2
Sulawesi Utara	3 Agustus 2010	4
Sulawesi Tengah	6 April 2011	5
Sulawesi Selatan	5 November 2007	3
Sulawesi Tenggara	16 Desember 2007	4
Gorontalo	16 November 2011	3
Sulawesi Barat	10 Oktober 2011	3
Maluku	9 Juli 2008	4
Maluku Utara	3 November 2007	2
Papua Barat	9 November 2011	4
Papua	10 Maret 2006	5

Sumber: Komisi Pemilihan Umum.

Tabel 5.15. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi

Provinsi	Terdaftar di DPT	Suara Sah	% suara sah terhadap DPT
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3.244.729	2.381.183	73,39
Sumatera Utara	8.475.026	4.933.697	58,21
Sumatera Barat	3.262.656	2.027.780	62,15
Riau	3.205.849	1.859.997	58,02
Jambi	2.231.632	1.537.303	68,89
Sumatera Selatan	5.089.536	3.630.763	71,34
Bengkulu	1.282.356	851.965	66,44
Lampung	5.384.498	3.498.599	64,98
Kepulauan Bangka Belitung	872.102	510.360	58,52
Kepulauan Riau	1.217.361	621.847	51,08
DKI Jakarta	6.996.951	4.952.945	70,79
Jawa Barat	27.972.924	17.996.105	64,33
Jawa Tengah	25.855.542	14.007.042	54,17
DI Yogyakarta ¹⁾	-	-	-
Jawa Timur	29.280.470	15.399.665	52,59
Banten	7.118.587	4.302.424	60,44
Bali	2.638.161	1.976.496	74,92
Nusa Tenggara Barat	3.012.665	2.182.893	72,46
Nusa Tenggara Timur	2.644.245	2.067.228	78,18
Kalimantan Barat	3.377.997	2.350.026	70,70
Kalimantan Tengah	1.626.067	1.024.429	63,00
Kalimantan Selatan	2.623.296	1.661.223	63,32
Kalimantan Timur	2.309.989	1.278.404	55,34
Sulawesi Utara	1.745.477	1.233.981	70,70
Sulawesi Tengah	1.785.763	1.275.507	75,87
Sulawesi Selatan	2.045.331	362.474	17,72
Sulawesi Tenggara	1.380.447	984.851	55,15
Gorontalo	756.758	600.323	79,33
Sulawesi Barat	819.848	612.087	74,66
Maluku	963.519	728.521	75,61
Maluku Utara ²⁾	-	-	-
Papua Barat	629.032	425.076	67,58
Papua	1.429.649	1.108.886	77,56

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Catatan: 1) Gubernur diangkat

2) Caretaker

Tabel 5.16. Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Terpilih

Provinsi	Perolehan Suara		Partai Pendukung
	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1.327.695	55,75	Partai Aceh
Sumatera Utara	1.672.923	28,31	PKS, PPP, Patriot
Sumatera Barat	657.763	32,44	PKS, PBR, Hanura
Riau	1.069.196	57,48	Golkar, PPP
Jambi	607.03	40,6	Demokrat, Golkar, PKS
Sumatera Selatan	1.866.390	51,40	Golkar
Bengkulu	269.812	32,67	PKS, PBR
Lampung	1.513.666	43,27	PDI-P
Kep. Bangka Belitung	169.790	33,20	Golkar, PKS
Kepulauan Riau	231.951	37,30	Golkar, PDIP
DKI Jakarta	2.472.130	53,82	PDI-P, Gerindra
Jawa Barat	7.287.647	40,50	PKS, PAN
Jawa Tengah	6.084.261	43,44	PDI-P
DI Yogyakarta	-	-	Gubernur Diangkat
Jawa Timur	7.729.944	50,11	Partai Demokrat, PKS, PAN
Banten	2.136.035	49,65	Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PBB, PKB, PAN, PPNUI, PKPB, PPD, PDS
Bali	1.014.733	51,34	PDI-P
Nusa Tenggara Barat	847.976	38,85	PKS, PBB
Nusa Tenggara Timur	772.03	37,35	PDI-P
Kalimantan Barat	1.225.185	52,13	PDI-P, Demokrat
Kalimantan Tengah	433.087	42,27	PDI-P
Kalimantan Selatan	777.554	46,81	PPP
Kalimantan Timur	740.724	57,94	PPP, PAN, Partai Demokrat, PBB, PDS
Sulawesi Utara	395.096	32,02	Demokrat, PAN, Gerindra, PPP
Sulawesi Tengah	411.113	36,15	PBB, PAN, PKB, PKPI
Sulawesi Selatan	1.432.572	39,53	PDI-P, PDK, PAN, PDS
Sulawesi Tenggara	694.299	54,43	Patriot, Gerindra, Hanura, PKPB, PPP, Patriot, PDP, PKS
Gorontalo	264.011	43,98	Golkar, PPP
Sulawesi Barat	296.633	48,46	Golkar, PDI-P, Demokrat, Hanura, PKS, PKPB.
Maluku	452.117	62,14	PDI-P, PBB, PBR, Partai Demokrat, PKB
Maluku Utara	-	-	Caretaker
Papua Barat	186.04	43,77	Golkar, Demokrat, Hanura, Gerindra, PPP, PBB, PPI, PKPB, Patriot.
Papua	992.972	30,23	PDI-P, Partai Pelopor

Sumber: BPS Provinsi

Tabel 5.17. Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Sebelumnya

Provinsi	Jenis Kelamin	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)
Aceh	Laki-laki	Dokter
Sumatera Utara	Laki-laki	Bupati Langkat
Sumatera Barat	Laki-laki	Anggota DPR RI
Riau	Laki-laki	Bupati Indragiri Hilir
Jambi	Laki-laki	Bupati Sarolangun
Sumatera Selatan	Laki-laki	Bupati Musi Banyuasin
Bengkulu	Laki-laki	Gubernur Bengkulu
Lampung	Laki-laki	Purnawirawan Polisi
Kepulauan Bangka Belitung	Laki-laki	Gubernur Kep. Bangka Belitung
Kepulauan Riau	Laki-laki	Wakil Gubernur Kepri
DKI Jakarta	Laki-laki	Walikota Solo
Jawa Barat	Laki-laki	Anggota DPRD DKI Jakarta
Jawa Tengah	Laki-laki	Mantan Pangkostrad
DI Yogyakarta	Laki-laki	Gubernur DIY
Jawa Timur	Laki-laki	Sekretaris Daerah Jawa Timur
Banten	Perempuan	Gubernur Banten
Bali	Laki-laki	Kapolda Bali
Nusa Tenggara Barat	Laki-laki	Anggota DPR RI 2004 - 2009
Nusa Tenggara Timur	Laki-laki	Wakil Gubernur NTT 2003 - 2008
Kalimantan Barat	Laki-laki	Gubernur Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah	Laki-laki	Gubernur Kalteng
Kalimantan Selatan	Laki-laki	Gubernur Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur	Laki-laki	Bupati Kutai Timur 2000 - 2003
Sulawesi Utara	Laki-laki	Gubernur Sulut
Sulawesi Tengah	Laki-laki	Bupati Parigi Moutong
Sulawesi Selatan	Laki-laki	Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara	Laki-laki	Wakil Ketua DPRD I
Gorontalo	Laki-laki	Bupati Gorontalo Utara
Sulawesi Barat	Laki-laki	Gubernur Sulbar
Maluku	Laki-laki	Anggota TNI
Maluku Utara	Laki-laki	Dirjen Bina Administrasi Negara
Papua Barat	Laki-laki	Gubernur Papua Barat
Papua	Laki-laki	Anggota MPR RI 1997 - 2002

Sumber: BPS Provinsi

5.6. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24C (1), yang berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak yang berhak mengajukan permohonan menurut Pasal 74 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu; pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan partai politik peserta Pemilu. Tidak semua perselisihan hasil Pemilu dapat diajukan ke MK. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi: terpilihnya anggota DPD; penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, terdapat dua periode yang berbeda. Pada periode awal dilaksanakannya pemilihan kepala daerah, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan diamanatkan kepada Mahkamah Agung (MA). Pasal 106 UUD No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MA. Pengajuan keberatan atas penetapan hasil disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota. Ketentuan tersebut hanya berlaku sampai pertengahan tahun 2008 karena pada tanggal 28 April 2008 diundangkan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UUD No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sejak saat itu, dimulai periode penyelesaian perselisihan hasil pemilihan diperankan oleh MK. Menurut Pasal 236C UUD No.12 Tahun 2008, penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK. Semenjak keputusan itu, jumlah gugatan terhadap hasil Pilkada terus meningkat, dari hanya 27 pada tahun 2008 menjadi 230 gugatan pada 2010. Pada tahun 2009 hanya ada 3 gugatan, karena pada tahun tersebut berbarengan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Pilkada tidak boleh diselenggarakan. Sebagaimana disajikan pada Tabel 5.18 jumlah pemohon yang mengajukan perkara berkaitan dengan Pemilu 2004 sebanyak 45 gugatan. Sedangkan pada Pemilu 2009 sebanyak 71 gugatan terhadap hasil Pemilu. Dari 6 partai politik lokal di Aceh, pada Pemilu 2009 hanya dua partai politik lokal Aceh yang tidak mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Partai Aceh Aman Sejahtera dan Partai Rakyat Aceh.

Rekapitulasi keputusan MK terhadap perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah ditampilkan pada tabel 5.19.

Tabel 5.18 Sengketa Pemilu di MK

Tahun	Sengketa Pemilu Legislatif	Sengketa Pilkada
(1)	(2)	(3)
2004	45	-
2005	-	-
2006	-	-
2007	-	-
2008	-	27
2009	71	3
2010	-	230
2011	-	116
Jumlah	116	376

Sumber: Mahkamah Konstitusi (2011)

Tabel 5.19 Rekapitulasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Sisa Lalu	Terima	Jumlah	Putus				Jumlah Putusan	Sisa	Sisa Tahun Ini
				Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Gugur			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2008	0	27	27	3	12	3	0	0	18	9
2009	9	3	12	1	10	1	0	0	12	0
2010	0	230	230	26	149	45	4	0	224	6
2011	6	116	122	9	81	27	1	0	119	3
Jumlah	15	376	391	39	252	76	5	0	373	18

Sumber: Mahkamah Konstitusi (2011)

Demokrasi dan Keragaman Indonesia

6

<http://www.kas.go.id>

6.1 Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Sekalipun demikian, pada prakteknya negara-negara yang mengaku demokratis tidak otomatis melakukan pengelolaan negara dan kekuasaan dengan norma-norma demokrasi. Assiddiqie (2005: 242-245) mengidentifikasi tiga persoalan yang muncul dalam kesenjangan antara gagasan dan pelaksanaan demokrasi. *Pertama*, hal yang paling nyata, meskipun 97 persen negara yang ada di zaman modern ini mengklaim menganut sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, tetapi praktek penerapannya di lapangan berbeda antara satu negara dengan yang lain, mulai dari Amerika Serikat sampai ke RRC, Kuba, bahkan eks-Uni Sovyet semua mengklaim menganut demokrasi. Perbedaan ini antara lain karena adanya jarak konseptual antara kaum individualis dengan kaum kolektivis. Kaum liberalis-individualis menganggap rakyat yang berdaulat adalah individu yang otonom sedangkan kaum kolektivis-komunis menganggap rakyat yang berdaulat dalam pengertian kolektif dan totaliter (*totalitarian*). *Kedua*, demokrasi juga mendapat tantangan dari kaum agamawan yang lebih meyakini kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan, dan bukan berasal dari rakyat. *Ketiga*, gagasan demokrasi itu sebagaimana terlihat dalam kenyataan beragamnya cara orang mempraktekan, seringkali dipraktekkan secara sepihak oleh para penguasa. Bahkan di sepanjang sejarah, corak penerapannya juga terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dengan konsepsi tersebut, tidak ada jaminan jika demokrasi menjadi defisit sebagai jargon penguasa. Diperlukan instrumen universal yang dapat mengukur pelaksanaan demokrasi dan perkembangannya di berbagai negara. Beberapa lembaga internasional menawarkan sistem yang memungkinkan untuk melakukan kuantifikasi terhadap demokrasi. Freedom House misalnya, sejak tahun 1972 melakukan pengukuran demokrasi dengan klasifikasi *free countries*, *partly free countries*, dan *not free countries*. Indonesia yang sebelumnya digolongkan sebagai negara dengan status *partly free*, sejak tahun 2008 telah digolongkan sebagai *free countries*. Dalam tren global yang dibuat freedom house, terlihat dalam rentang empat dekade terakhir jumlah negara-negara dengan status *free countries* semakin banyak (Tabel 6.1 dan 6.2). Selain *Freedom House*, *The Economist* juga membuat pengukuran serupa tentang demokrasi dengan kategori *full democracies*, *flawed democracies*, *hybrid regimes*, serta *authoritarian regimes* (Tabel 6.3). *The economist* juga mencantumkan ranking dari semua negara yang diukur. Pada Tahun 2007 Indonesia menempati ranking 65, turun menjadi peringkat 69 pada tahun 2008 dan naik menjadi peringkat 60 pada tahun 2010 dan menempati posisi yang sama pada Tahun 2011 (Tabel 6.4).

Indonesia, sejak tahun 2007 telah mengembangkan pengukuran demokrasi yang berbasis provinsi (Tabel 6.5, 6.6 dan 6.7) yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Aspek yang diukur dalam IDI di antaranya; kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi (Tabel 6.8, dan 6.9). Pengukuran IDI dilakukan pada tahun berikutnya, artinya IDI Tahun 2009 diukur pada tahun 2010, IDI tahun 2010 diukur pada Tahun 2011.

Tabel 6.1. Status Demokrasi Negara-Negara Dunia Tahun 1972 - 2011

Tahun	Jumlah Negara	Free Countries		Partly Free Countries		Not Free Countries	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2011	195	87	45	60	31	48	24
2010	194	87	45	60	31	47	24
2009	194	89	46	58	30	47	24
2008	193	89	46	62	32	42	22
2007	193	90	47	60	31	43	22
2006	193	90	47	58	30	45	23
2005	192	89	46	58	30	45	24
2004	192	89	46	58	28	49	26
2003	192	88	46	55	29	49	25
2002	192	89	46	55	29	48	25
2001	192	85	44	59	31	48	25
2000	192	86	45	58	30	48	25
1999	192	85	44	60	31	47	25
1998	191	88	46	53	28	50	26
1997	191	81	42	57	30	53	28
1996	191	79	41	59	31	53	28
1995	191	76	40	62	32	53	28
1994	191	76	40	61	32	54	28
1993	190	72	38	63	33	55	29
1992	186	75	40	73	39	38	21
1991	183	76	42	65	35	42	23
1990	165	65	40	50	30	50	30
1989	167	61	37	44	26	62	37
1988	167	60	36	39	23	68	41
1987	167	58	35	58	35	51	30
1986	167	57	34	57	34	53	32
1985	167	56	34	46	34	55	33
1984	167	53	32	59	35	55	33
1982-1983*	166	52	31	56	34	58	35
1981-1982**	165	54	33	47	28	64	39
1980	162	51	31	51	31	60	37
1979	161	51	32	54	33	56	35
1978	158	47	30	56	35	55	35
1977	155	43	28	48	31	64	41
1976	159	42	26	49	31	68	43
1975	158	40	25	53	34	65	41
1974	152	41	27	48	32	63	41
1973	151	44	29	42	28	65	43
1972	151	44	29	38	25	69	46

Sumber: *Freedom In The World 2011*, Freedom House

Tabel 6.2 Tren Perkembangan Kebebasan Global

Tahun	Free Countries		Partly Free Countries		Not Free Countries	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011	87	45	60	31	48	24
2010	87	45	60	31	47	24
2000	86	45	58	30	48	25
1990	65	40	50	30	50	30
1980	51	31	51	31	60	37

Sumber: *Freedom In The World 2012, Freedom House*

Tabel 6.3 Indeks Demokrasi Dunia berdasarkan Rezim

Status	Jumlah Negara	% Negara	% Dari Populasi Dunia
(1)	(2)	(3)	(4)
Full democracies	25	15	11.3
Flawed democracies	53	31.7	37.1
Hybrid regimes	37	22.2	14
Authoritarian regimes	52	31.1	37.6

Sumber: *Democracy index 2011, The Economist*

Tabel 6.4 Peringkat Demokrasi Indonesia Tahun 2007-2011 Versi *The Economist*

Tahun	Rang king	Total Skor	Skor Kategori					Status
			Proses Pemilu dan Pluralisme	Fungsi Pemerintah	Partisipasi Politik	Budaya Politik	Kebebasan Sipil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2011	60	6.53	6.92	7.50	5.56	5.63	7.06	Flawed Democracies
2010	60	6.53	6.92	7.00	5.00	5.63	7.06	Flawed Democracies
2008	69	6.34	6.92	6.76	5.00	6.25	6.76	Flawed Democracies
2007	65	6.41	6.92	7.14	5.00	6.25	6.76	Flawed Democracies

Sumber: *Democracy index 2007, 2008, 2010, & 2011 The Economist*

Tabel 6.5 Skor IDI Menurut Provinsi Tahun 2009 - 2010

Provinsi	Skor	
	IDI 2009	IDI 2010
(1)	(2)	(3)
Aceh	66,29	65,36
Sumut	60,20	63,45
Sumbar	60,29	63,04
Riau	75,85	71,45
Jambi	71,00	65,88
Sumsel	72,52	73,65
Bengkulu	64,76	70,78
Lampung	67,47	67,80
Babel	67,01	65,94
Kepri	73,61	62,89
DKI	73,91	77,44
Jabar	71,07	59,41
Jateng	66,45	63,42
DIY	67,55	74,33
Jatim	62,49	55,12
Banten	67,98	60,60
Bali	70,35	72,44
NTB	58,12	58,13
NTT	71,64	72,05
Kalbar	72,38	69,32
Kalteng	77,63	71,10
Kalsel	66,63	70,94
Kaltim	72,31	73,04
Sulut	70,94	65,94
Sulteng	66,02	66,63
Sulsel	61,48	56,67
Sultra	64,29	54,79
Gorontalo	73,50	64,97
Sulbar	67,99	68,82
Maluku	69,07	69,51
Malut	67,21	59,92
Papua Barat	63,06	67,75
Papua	63,80	60,26
Indonesia	67,30	63,17

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2009, 2010

Tabel 6.6 Indeks Demokrasi Indonesia 2009

Peringkat	Provinsi	Aspek			Indeks Demokrasi
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga Demokrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kalimantan Tengah	98,45	60,50	78,69	77,63
2	Riau	93,14	65,40	70,68	75,85
3	DKI Jakarta	91,65	52,20	86,09	73,91
4	Kepulauan Riau	96,22	59,47	67,62	73,61
5	Gorontalo	96,05	56,39	72,32	73,50
6	Sumatera Selatan	95,42	56,07	69,83	72,52
7	Kalimantan Barat	98,29	53,46	69,85	72,38
8	Kalimantan Timur	98,22	54,78	67,57	72,31
9	Nusa Tenggara Timur	95,55	51,46	73,63	71,64
10	Jawa Barat	85,84	68,48	56,61	71,07
11	Jambi	95,86	50,41	72,43	71,00
12	Sulawesi Utara	92,23	58,50	63,91	70,94
13	Bali	93,97	49,82	73,24	70,35
14	Maluku	92,77	52,05	66,30	69,07
15	Sulawesi Barat	93,82	53,09	59,15	67,99
16	Banten	95,46	49,47	62,83	67,98
17	DI Yogyakarta	92,15	52,52	60,48	67,55
18	Lampung	90,57	51,81	63,27	67,47
19	Maluku Utara	93,61	46,30	67,23	67,21
20	Bangka Belitung	96,51	48,29	59,65	67,01
21	Kalimantan Selatan	68,24	62,63	70,95	66,63
22	Jawa Tengah	86,48	51,85	64,43	66,45
23	Aceh	64,42	70,39	62,13	66,29
24	Sulawesi Tengah	98,51	45,90	57,14	66,02
25	Bengkulu	94,26	54,03	44,70	64,76
26	Sulawesi Tenggara	94,66	43,97	58,37	64,29
27	Papua	92,83	43,84	58,97	63,80
28	Papua Barat	93,14	37,09	66,48	63,06
29	Jawa Timur	83,30	50,96	54,64	62,49
30	Sulawesi Selatan	82,94	42,36	64,88	61,48
31	Sumatera Barat	63,06	53,57	67,48	60,29
32	Sumatera Utara	84,16	41,26	60,14	60,20
33	Nusa Tenggara Barat	68,05	47,50	62,48	58,12
	Indonesia	86,97	54,60	62,72	67,30

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2009, UNDP (2010)

Tabel 6.7 Indeks Demokrasi Indonesia 2010

Peringkat	Provinsi	Aspek			Indeks Demokrasi
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga Demokrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DKI Jakarta	92,46	56,19	92,30	77,44
2	DI Yogyakarta	91,24	55,96	82,25	74,33
3	Sumatera Selatan	100,00	55,17	69,85	73,65
4	Kalimantan Timur	97,79	53,89	72,34	73,04
5	Bali	94,10	51,52	78,43	72,44
6	Nusa Tenggara Timur	95,55	55,89	68,15	72,05
7	Riau	91,02	47,19	85,39	71,45
8	Kalimantan Tengah	94,51	56,05	65,57	71,10
9	Kalimantan Selatan	67,74	72,66	72,25	70,94
10	Bengkulu	94,40	64,35	51,29	70,78
11	Maluku	96,22	48,12	69,89	69,51
12	Kalimantan Barat	99,17	45,19	70,11	69,32
13	Sulawesi Barat	94,48	47,22	66,06	68,82
14	Lampung	94,39	53,90	56,44	67,80
15	Papua Barat	99,84	44,24	64,73	67,75
16	Sulawesi Tengah	92,19	51,82	58,01	66,63
17	Bangka Belitung	85,95	48,44	68,57	65,94
18	Sulawesi Utara	92,98	44,90	65,34	65,94
19	Jambi	85,15	48,14	69,81	65,88
20	Aceh	69,98	62,63	63,87	65,36
21	Gorontalo	82,55	51,72	63,90	64,97
22	Sumatera Utara	76,64	57,42	56,45	63,45
23	Jawa Tengah	84,83	46,29	63,70	63,42
24	Sumatera Barat	58,34	63,90	67,59	63,04
25	Kepulauan Riau	87,04	39,80	69,20	62,89
26	Banten	83,17	38,70	66,99	60,60
27	Papua	90,72	31,76	67,22	60,26
28	Maluku Utara	92,59	30,82	65,06	59,92
29	Jawa barat	74,41	46,74	60,67	59,41
30	Nusa Tenggara Barat	67,22	46,48	65,19	58,13
31	Sulawesi Selatan	78,19	32,40	68,17	56,67
32	Jawa Timur	78,48	42,06	46,47	55,12
33	Sulawesi Tenggara	83,71	30,46	57,06	54,79
	Indonesia	82,53	47,87	63,11	63,17

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2010, BPS (2011)

Tabel 6.8 Skor Tertinggi Tiap Aspek Menurut Provinsi Tahun 2009

Peringkat	Kebebasan Sipil		Peringkat	Hak-hak Politik		Peringkat	Lembaga Demokrasi	
	Provinsi	Skor		Provinsi	Skor		Provinsi	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sulteng	98,51	1	Aceh	70,39	1	DKI	86,09
2	Kalteng	98,45	2	Jabar	68,48	2	Kalteng	78,69
3	Kalbar	98,29	3	Riau	65,40	3	NTT	73,63
4	Kaltim	98,22	4	Kalsel	62,63	4	Bali	73,24
5	Babel	96,51	5	Kalteng	60,50	5	Jambi	72,43
6	Kepri	96,22	6	Kepri	59,47	6	Gorontalo	72,32
7	Gorontalo	96,05	7	Sulut	58,50	7	Kalsel	70,95
8	Jambi	95,86	8	Gorontalo	56,39	8	Riau	70,68
9	NTT	95,55	9	Sumsel	56,07	9	Kalbar	69,85
10	Banten	95,46	10	Kaltim	54,78	10	Sumsel	69,83
11	Sumsel	95,42	11	Bengkulu	54,03	11	Kepri	67,62
12	Sultra	94,66	12	Sumbar	53,57	12	Kaltim	67,57
13	Bengkulu	94,26	13	Kalbar	53,46	13	Sumbar	67,48
14	Bali	93,97	14	Sulbar	53,09	14	Malut	67,23
15	Sulbar	93,82	15	DIY	52,52	15	Papua Barat	66,48
16	Malut	93,61	16	DKI	52,20	16	Maluku	66,30
17	Riau	93,14	17	Maluku	52,05	17	Sulsel	64,88
18	Papua Barat	93,14	18	Jateng	51,85	18	Jateng	64,43
19	Papua	92,83	19	Lampung	51,81	19	Sulut	63,91
20	Maluku	92,77	20	NTT	51,46	20	Lampung	63,27
21	Sulut	92,23	21	Jatim	50,96	21	Banten	62,83
22	DIY	92,15	22	Jambi	50,41	22	NTB	62,48
23	DKI	91,65	23	Bali	49,82	23	Aceh	62,13
24	Lampung	90,57	24	Banten	49,47	24	DIY	60,48
25	Jateng	86,48	25	Babel	48,29	25	Sumut	60,14
26	Jabar	85,84	26	NTB	47,50	26	Babel	59,65
27	Sumut	84,16	27	Malut	46,30	27	Sulbar	59,15
28	Jatim	83,30	28	Sulteng	45,90	28	Papua	58,97
29	Sulsel	82,94	29	Sultra	43,97	29	Sultra	58,37
30	Kalsel	68,24	30	Papua	43,84	30	Sulteng	57,14
31	NTB	68,05	31	Sulsel	42,36	31	Jabar	56,61
32	Aceh	64,42	32	Sumut	41,26	32	Jatim	54,64
33	Sumbar	63,06	33	Papua Barat	37,09	33	Bengkulu	44,70
	Indonesia	86,97		Indonesia	54,60		Indonesia	62,72

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2009, UNDP (2010)

Tabel 6.9 Skor Tertinggi Tiap Aspek Menurut Provinsi Tahun 2010

Kebebasan Sipil			Hak-hak Politik			Lembaga Demokrasi		
Peringkat	Provinsi	Skor	Peringkat	Provinsi	Skor	Peringkat	Provinsi	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sumsel	100,00	1	Kalsel	72,66	1	DKI	92,30
2	Papua Barat	99,84	2	Bengkulu	64,35	2	Riau	85,39
3	Kalbar	99,17	3	Sumbar	63,90	3	DIY	82,25
4	Kaltim	97,79	4	Aceh	62,63	4	Bali	78,43
5	Maluku	96,22	5	Sumut	57,42	5	Kaltim	72,34
6	NTT	95,55	6	DKI	56,19	6	Kalsel	72,25
7	Kalteng	94,51	7	Kalteng	56,05	7	Kalbar	70,11
8	Sulbar	94,48	8	DIY	55,96	8	Maluku	69,89
9	Bengkulu	94,40	9	NTT	55,89	9	Sumsel	69,85
10	Lampung	94,39	10	Sumsel	55,17	10	Jambi	69,81
11	Bali	94,10	11	Lampung	53,90	11	Kepri	69,20
12	Sulut	92,98	12	Kaltim	53,89	12	Babel	68,57
13	Malut	92,59	13	Sulteng	51,82	13	Sulsel	68,17
14	DKI	92,46	14	Gorontalo	51,72	14	NTT	68,15
15	Sulteng	92,19	15	Bali	51,52	15	Sumbar	67,59
16	DIY	91,24	16	Babel	48,44	16	Papua	67,22
17	Riau	91,02	17	Jambi	48,14	17	Banten	66,99
18	Papua	90,72	18	Maluku	48,12	18	Sulbar	66,06
19	Kepri	87,04	19	Sulbar	47,22	19	Kalteng	65,57
20	Babel	85,95	20	Riau	47,19	20	Sulut	65,34
21	Jambi	85,15	21	Jabar	46,74	21	NTB	65,19
22	Jateng	84,83	22	NTB	46,48	22	Malut	65,06
23	Sultra	83,71	23	Jateng	46,29	23	Papua Barat	64,73
24	Banten	83,17	24	Kalbar	45,19	24	Gorontalo	63,90
25	Gorontalo	82,55	25	Sulut	44,90	25	Aceh	63,87
26	Jatim	78,48	26	Papua Barat	44,24	26	Jateng	63,70
27	Sulsel	78,19	27	Jatim	42,06	27	Jabar	60,67
28	Sumut	76,64	28	Kepri	39,80	28	Sulteng	58,01
29	Jabar	74,41	29	Banten	38,70	29	Sultra	57,06
30	Aceh	69,98	30	Sulsel	32,40	30	Sumut	56,45
31	Kalsel	67,74	31	Papua	31,76	31	Lampung	56,44
32	NTB	67,22	32	Malut	30,82	32	Bengkulu	51,29
33	Sumbar	58,34	33	Sultra	30,46	33	Jatim	46,47
Indonesia		82,53	Indonesia		47,87	Indonesia		63,11

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2010, BPS (2011)

6.2 Keragaman Indonesia

Keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan merupakan ciri utama yang menjadi ciri masyarakat majemuk (Suparlan, 2002:99). Beberapa negara secara alami terdiri dari masyarakat yang majemuk, namun sebagian lainnya menjadi semakin majemuk karena adanya migrasi. Indonesia merupakan bangsa dan negara dengan tingkat kemajemukan yang paling tinggi di dunia. Kemajemukan bangsa dan masyarakat Indonesia setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut: Secara geografis, terdiri atas 13.667 pulau baik yang dihuni maupun yang tidak. Secara etnik, di Indonesia terdapat 358 suku bangsa dan 200 sub suku bangsa, serta beragam agama dan kepercayaan yang dianut (Zubair, 2003:113). Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010, suku bangsa di Indonesia berjumlah 1.340 suku bangsa.

Kemajemukan memiliki peran besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Gelombang kesadaran akan persamaan perasaan nasib tertindas, mendorong berbagai kelompok berbasis etnis melakukan perlawanan di banyak daerah. Pada tahun 1928 pemuda-pemuda yang berasal dari organisasi pemuda benuansa kedaerahan dan kesukuan, atau keagamaan seperti; *Jong Java*, *Jong Borneo*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Celebes*, *Jong Islamiten Bond* berkumpul, bersatu dan bersumpah untuk membangun satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia (Zubair, 2003:112). Karena itu dalam sidang BPUPKI tahun 1945, pidato Soekarno menyerukan "...marilah kita mengambil dasar Negara jang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia jang bulat! Bukan kebangsaan Djawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, jang bersama-sama mendjadi dasar satu nationale staat.."

Fakta tersebut menjelaskan bahwa negara ini dibangun dan diikat dengan komitmen persatuan bangsa yang memberi ruang setara bagi seluruh kelompok suku bangsa dan agama. Berdasarkan SP 2010 pada tingkat nasional penduduk Indonesia paling banyak suku Jawa dengan jumlah 95,2 juta jiwa, kemudian Sunda 36,7 juta jiwa, dan suku Batak dengan 8,5 juta jiwa (Tabel 6.10). Jumlah penduduk berdasarkan suku dan jenis kelamin ditampilkan pada Tabel 6.11, sedangkan jumlah desa menurut banyaknya suku ditampilkan pada Tabel 6.12. Berdasarkan penganut agama, mayoritas penduduk Indonesia penganut Agama Islam dengan jumlah 207,2 juta penganut, selanjutnya Kristen dengan 16,5 juta penganut, dan Katolik dengan 6,9 juta penganut. Informasi tentang penganut agama berdasarkan wilayah dan kelompok umur ditampilkan pada Tabel 6.13 dan 6.14.

Tabel 6.10 Jumlah Penduduk menurut Suku Bangsa

Pulau/Kawasan	Kelompok Suku	Jumlah	Persentase	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera	Suku-suku Asal Aceh	4.091.451	1,73	14
	Batak	8.466.969	3,58	3
	Nias	1.041.925	0,44	30
	Melayu	5.365.399	2,27	9
	Minangkabau	6.462.713	2,73	7
	Suku-suku asal Jambi	1.415.547	0,6	25
	Suku-suku asal Sumatera Selatan	5.119.581	2,16	10
	Suku-suku asal Lampung	1.381.660	0,58	26
	Suku asal Sumatera Lainnya	2.204.472	0,93	21
Jawa dan Bali	Betawi	6.807.968	2,88	6
	Suku-suku asal Banten	4.657.784	1,97	11
	Sunda	36.701.670	15,5	2
	Jawa	95.217.022	40,22	1
	Cirebon	1.877.514	0,79	24
	Madura	7.179.356	3,03	5
	Bali	3.946.416	1,67	15
Nusa Tenggara	Sasak	3.173.127	1,34	16
	Suku-suku asal Nusa Tenggara Barat	1.280.094	0,54	27
	Suku-suku asal Nusa Tenggara Timur	4.184.923	1,77	12
Kalimantan	Dayak	3.009.494	1,27	17
	Banjar	4.127.124	1,74	13
	Suku-suku asal Kalimantan lainnya	1.968.620	0,83	23
Sulawesi	Makassar	2.672.590	1,13	20
	Bugis	6.359.700	2,69	8
	Minahasa	1.237.177	0,52	29
	Gorontalo	1.251.494	0,53	28
	Suku-suku asal Sulawesi Lainnya	7.634.262	3,22	4
Maluku	Suku-Suku asal Maluku	2.203.415	0,93	22
Papua	Suku-suku asal Papua	2.693.630	1,14	19
	Cina	2.832.510	1,2	18
	Asing/Luar Negeri	162.772	0,07	31
Total		236.728.379	100	

Sumber: Sensus Penduduk 2010 – BPS

Catatan : Cina dan Asing/Luar Negeri adalah penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia

Tabel 6.11 Jumlah Penduduk Menurut Suku dan Jenis Kelamin

Nama Kelompok Suku	Jenis Kelamin				Total
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Suku-suku Asal Aceh	2.046.592	50,02	2.044.859	49,98	4.091.451
Batak	4.268.074	50,41	4.198.895	49,59	8.466.969
Nias	526.723	50,55	515.202	49,45	1.041.925
Melayu	2.696.036	50,25	2.669.363	49,75	5.365.399
Minangkabau	3.228.346	49,95	3.234.367	50,05	6.462.713
Suku-suku asal Jambi	707.707	50,00	707.840	50,00	1.415.547
Suku-suku asal Sumatera Selatan	2.574.509	50,29	2.545.072	49,71	5.119.581
Suku-suku asal Lampung	693.375	50,18	688.285	49,82	1.381.660
Suku asal Sumatera Lainnya	1.111.821	50,43	1.092.651	49,57	2.204.472
Betawi	3.441.848	50,56	3.366.120	49,44	6.807.968
Suku-suku asal Banten	2.378.474	51,06	2.279.310	48,94	4.657.784
Sunda	18.601.602	50,68	18.100.068	49,32	36.701.670
Jawa	47.827.027	50,23	47.389.995	49,77	95.217.022
Cirebon	961.406	51,21	916.108	48,79	1.877.514
Madura	3.518.361	49,01	3.660.995	50,99	7.179.356
Bali	1.983.212	50,25	1.963.204	49,75	3.946.416
Sasak	1.521.664	47,95	1.651.463	52,05	3.173.127
Suku-suku asal Nusa Tenggara Barat	648.666	50,67	631.428	49,33	1.280.094
Suku-suku asal Nusa Tenggara Timur	2.094.812	50,06	2.090.111	49,94	4.184.923
Dayak	1.518.879	50,47	1.490.615	49,53	3.009.494
Banjar	2.063.769	50,01	2.063.355	49,99	4.127.124
Suku-suku Asal Kalimantan	1.006.260	51,11	962.360	48,89	1.968.620
Makassar	1.325.342	49,59	1.347.248	50,41	2.672.590
Bugis	3.177.757	49,97	3.181.943	50,03	6.359.700
Minahasa	625.128	50,53	612.049	49,47	1.237.177
Gorontalo	631.715	50,48	619.779	49,52	1.251.494
Suku-suku Asal Sulawesi	3.832.710	50,2	3.801.552	49,8	7.634.262
Suku-suku Asal Maluku	1.124.441	51,03	1.078.974	48,97	2.203.415
Suku-suku Asal Papua	1.410.595	52,37	1.283.035	47,63	2.693.630
Cina	1.425.236	50,32	1.407.274	49,68	2.832.510
Asing/Luar Negeri	81.974	50,36	80.798	49,64	162.772
Total	119.054.061	50,29	117.674.318	49,71	236.728.379

Sumber: Sensus Penduduk 2010 – BPS

Catatan : Cina dan Asing/Luar Negeri adalah penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia

Tabel 6.12 Banyaknya Desa Menurut Keragaman Agama dan Suku

Provinsi	Agama		Etnis / Suku	
	Satu Agama	Multi Agama	Satu Etnis	Multi Etnis
	(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5.951	532	2.441	4.042
Sumatera Utara	1.482	4.315	1.238	4.559
Sumatera Barat	660	373	224	809
Riau	499	1.156	152	1.503
Jambi	731	641	267	1.105
Sumatera Selatan	1.871	1.315	541	2.645
Bengkulu	833	676	220	1.289
Lampung	674	1.790	204	2.260
Bangka Belitung	96	265	49	312
Kepulauan Riau	70	283	37	316
DKI Jakarta	5	262	55	212
Jawa Barat	3.404	2.501	1.066	4.839
Jawa Tengah	2.886	5.691	3.463	5.114
DI Yogyakarta	6	432	107	331
Jawa Timur	3.549	4.953	2.759	5.743
Banten	911	624	220	1.315
Bali	153	563	195	521
Nusa Tenggara Barat	636	448	155	929
Nusa Tenggara Timur	896	2.070	794	2.172
Kalimantan Barat	217	1.750	268	1.699
Kalimantan Tengah	169	1.359	224	1.304
Kalimantan Selatan	1.319	681	305	1.695
Kalimantan Timur	337	1.128	249	1.216
Sulawesi Utara	395	1.298	234	1.459
Sulawesi Tengah	443	1.372	148	1.667
Sulawesi Selatan	1.548	1.434	627	2.355
Sulawesi Tenggara	1.302	819	222	1.899
Gorontalo	382	349	181	550
Sulawesi Barat	291	347	129	509
Maluku	520	504	235	789
Maluku Utara	649	430	131	948
Papua Barat	736	703	430	1.009
Papua	2.673	1.251	1.897	2.027
Indonesia	36.294	42.315	19.467	59.142

Sumber: Potensi Desa 2011, BPS

Tabel 6.13 Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut

Provinsi	Agama									Jumlah
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lain	Tdk Trjwb	Tdk Dtnykn	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	4.413.244	50.309	3.315	136	7.062	36	277	1	20.030	4.494.410
Sumut	8.579.830	3.509.700	516.037	14.644	303.548	984	5.088	1.760	50.613	12.982.204
Sumbang	4.721.924	69.253	40.428	234	3.419	70	493	1.930	9.158	4.846.909
Riau	4.872.873	484.895	44.183	1.076	114.332	3.755	2.088	517	14.648	5.538.367
Jambi	2.950.195	82.311	13.250	582	30.014	1.491	303	313	13.806	3.092.265
Sumsel	7.218.951	72.235	42.436	39.206	59.655	663	164	1.928	15.156	7.450.394
Bengkulu	1.669.081	28.724	6.364	3.727	2.173	41	130	1.538	3.740	1.715.518
Lampung	7.264.783	115.255	69.014	113.512	24.122	596	664	3.442	17.017	7.608.405
Babel	1.088.791	22.053	14.738	1.040	51.882	39.790	323	862	3.817	1.223.296
Kepri	1.332.201	187.576	38.252	1.541	111.730	3.389	198	620	3.656	1.679.163
Jakarta	8.200.796	724.232	303.295	20.364	317.527	5.334	2.410	3.133	30.696	9.607.787
Jabar	41.763.592	779.272	250.875	19.481	93.551	14.723	5.657	66.868	59.713	43.053.732
Jateng	31.328.341	572.517	317.919	17.448	53.009	2.995	5.657	7	84.764	32.382.657
DIY	3.179.129	94.268	165.749	5.257	3.542	159	506	4.557	4.324	3.457.491
Jatim	36.113.396	638.467	234.204	112.177	60.760	6.166	2.042	45.010	264.535	37.476.757
Banten	10.065.783	268.890	115.865	8.189	131.222	3.232	11.722	16	27.247	10.632.166
Bali	520.244	64.454	31.397	3.247.283	21.156	427	282	1	5.513	3.890.757
NTB	4.341.284	13.862	8.894	118.083	14.625	139	40	30	3.255	4.500.212
NTT	423.925	1.627.157	2.535.937	5.210	318	91	81.129	247	9.813	4.683.827
Kalbar	2.603.318	500.254	1.008.368	2.708	237.741	29.737	2.907	671	10.279	4.395.983
Kalteng	1.643.715	353.353	58.279	11.149	2.301	414	138.419	220	4.239	2.212.089
Kalsel	3.505.846	47.974	16.045	16.064	11.675	236	16.465	3	12.308	3.626.616
Kaltim	3.033.705	337.380	138.629	7.657	16.356	1.080	849	1.951	15.536	3.553.143
Sulut	701.699	1.444.141	99.980	13.133	3.076	511	1.363	83	6.610	2.270.596
Sulteng	2.047.959	447.475	21.638	99.579	3.951	141	2.575	638	11.053	2.635.009
Susel	7.200.938	612.751	124.255	58.393	19.867	367	4.731	728	12.746	8.034.776
Sultra	2.126.126	41.131	12.880	45.441	978	48	8	1.471	4.503	2.232.586
Gorontalo	1.017.396	16.559	761	3.612	934	11	18	205	668	1.040.164
Sulbar	957.735	164.667	11.871	16.042	326	35	6.535	383	1.057	1.158.651
Maluku	776.130	634.841	103.629	5.669	259	117	6.278	0	6.583	1.533.506
Malut	771.110	258.471	5.378	200	90	212	122	87	2.417	1.038.087
Papua Brt	292.026	408.841	53.463	859	601	25	0	341	4.266	760.422
Papua	450.096	1.855.245	500.545	2.420	1.452	76	174	21	23.352	2.833.381
Jumlah	207.176.162	16.528.513	6.907.873	4.012.116	1.703.254	117.091	299.617	139.582	757.118	237.641.326

Sumber: Sensus Penduduk 2010, BPS

Tabel 6.14 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut

Klmpk Umur	Agama									Jumlah
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lainnya	Tidak Terjawab	Tidak Dtnykan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0-4	19.701.622	1.730.941	731.201	340.030	117.323	7.349	33.818	5.924	10.494	22.678.702
15-18	20.076.013	1.830.056	788.072	364.129	132.162	8.000	36.687	3.639	14.722	23.253.480
20-23	19.570.144	1.716.328	738.669	351.300	129.950	7.939	29.180	11.431	116.140	22.671.081
15-19	18.047.190	1.490.013	614.571	302.277	135.442	8.402	24.663	14.291	243.885	20.880.734
20-24	17.356.491	1.368.715	545.779	275.403	143.362	8.970	23.152	18.234	151.527	19.891.633
25-29	18.751.271	1.405.502	552.770	316.382	153.338	9.375	23.360	15.286	83.159	21.310.443
30-34	17.394.118	1.356.633	531.404	331.215	131.651	7.563	20.664	13.116	44.321	19.830.685
35-39	16.216.251	1.254.291	494.365	356.120	115.180	6.568	19.530	11.786	31.040	18.505.131
40-44	14.501.505	1.096.115	448.778	310.958	109.682	6.728	18.042	10.308	22.736	16.524.852
45-49	12.333.954	906.890	382.055	258.209	112.479	7.889	16.258	8.571	14.677	14.040.982
50-54	10.128.813	741.151	320.824	214.235	114.915	9.161	14.557	7.463	10.202	11.561.321
55-59	7.351.878	550.988	246.793	168.424	100.220	8.620	10.690	5.640	5.317	8.448.570
60-64	5.249.024	388.405	185.779	136.828	74.438	6.741	9.709	4.483	3.354	6.058.761
65-69	4.098.516	277.214	134.964	112.302	53.429	4.709	7.303	3.609	1.985	4.694.031
70-74	3.037.243	197.096	90.945	79.280	38.114	3.972	5.626	2.549	1.506	3.456.331
75-79	1.729.706	115.960	52.701	48.752	22.741	2.591	3.151	1.575	728	1.977.905
80-84	1.006.474	63.192	29.007	28.066	11.745	1.503	1.848	811	524	1.143.170
85-89	380.819	26.189	12.410	11.440	4.941	702	787	366	307	437.961
90-94	150.870	8.611	4.439	4.414	1.617	226	352	145	225	170.899
95+	94.260	4.223	2.347	2.352	525	83	240	355	269	104.654
Jumlah	207.176.162	16.528.513	6.907.873	4.012.116	1.703.254	117.091	299.617	139.582	757.118	237.641.326

Sumber: Sensus Penduduk 2010, BPS

Daftar Pustaka

- Aribowo & Muhammad Asfar, dkk. (2002), *“Model-Model Sistem Pemilihan di Indonesia”* Surabaya: Pusdeham.
- Asshidiqqie, Jimly (2005), *“Hukum Tata Negara Dan Demokrasi”* Jakarta: Konpress.
- Badan Pusat Statistik (2010) *”Sensus Penduduk 2010.”* Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2010) *”Statistik Indonesia 2010.”* Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2012) *”Statistik Keuangan Daerah 2008-2011.”* Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (2011) *”Statistik Potensi Desa Indonesia 2011.”* Jakarta: BPS.
- Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- The Economist Intelligence Unit (2010), *”Democracy Index 2010: Democracy In Retreat”* Tidak Diterbitkan.
- Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri (2010) *“Postur APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.”* Jakarta: Tidak Diterbitkan.
- Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri (2011) *“Postur APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011.”* Jakarta: Tidak Diterbitkan.
- Freedom House (2010), *”Freedom of The Press 2010”* Tidak Diterbitkan.
- Freedom House (2011), *”Freedom In The World 2011”* Tidak Diterbitkan.
- Hardiman, F. Budi (2009), *“Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas.”* Jogjakarta: Kanisius.
- Haris, Syamsuddin (2008), *“Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca-Amandemen, Konstitusi (2004-2008)”*, disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hendrayana *”Menegakkan Kemerdekaan Pers dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah.”* Jurnal Dewan Pers Edisi No 2 November 2010.
- Ibrahim, Anis (2008), *“Legislasi dan Demokrasi: Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Daerah.”* Malang: In-Trans Publishing.
- Kemenpan & RB (2010), *”Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.”*
- Komisi Pemilihan Umum (2010) *”Pemilu 2009 Dalam Angka.”* Jakarta: KPU.

- Luwarso, Lukas Dkk. (2008), "Mengelola Kebebasan Pers." Jakarta: Dewan Pers.
- Mahkamah Agung (2010) "*Laporan Tahunan 2010.*" Tidak Diterbitkan.
- Mahkamah Konstitusi (2010) "*Laporan Tahunan 2010.*" Tidak Diterbitkan.
- Mas' oed, Mohtar & Colin McAndrews (2008), "*Perbandingan Sistem Politik.*" Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- McQuail, Denis (2005), "*Mass Communication Theory, Fifth Edition.*" London: Sage Publications.
- Mujani, Saiful (2007), "*Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*" Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rais, M.Amin (2008), "*Selamatkan Indonesia!*" Yogyakarta: PPSK Press.
- Rauf, Maswadi dkk. (2011), "*Menakar Demokrasi di Indonesia: Indeks Demokrasi Indonesia 2009.*" Jakarta: UNDP.
- Safa'at (2011), "*Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergerakan Republik*" Jakarta: Rajagrafindo.
- Schein, Edgar H (2004). "*Organizational Culture and Leadership*" USA: Jossey-Bass.
- Sekretariat Jenderal ASEAN (2010) "*Asean Selayang Pandang: Edisi 19 Tahun 2010.*" Jakarta: ASEAN.
- Sekretariat Jendral DPR RI (2010), "*Rencana Strategis DPR RI 2010 – 2014.*"
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (1980), "*30 Tahun Indonesia Merdeka, Cetakan Ketiga*" Jakarta: Tira Pustaka.
- Sudarmanto (2009). "*Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudibyoy, Agus Dkk. (2010), "*Media dan Politik Lokal*" Jakarta: Jurnal Dewan Pers No 3, Desember 2010.
- Sisk, Timothy D (2002), "*Demokrasi Di Tingkat Lokal*" Jakarta: AMEEMPRO.
- Suparlan, Parsudi (2002), "*Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural.*" Makalah, tidak diterbitkan.
- Surbakti, Ramlan dkk (2008), "*Perekayaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan tata Politik Demokratis*" Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Surbakti, Ramlan (2010), "*Memahami Ilmu Politik*" Jakarta: Grasindo.
- Thoah, Miftah (2010), "*Birokrasi & Politik di Indonesia.*" Jakarta: Rajawali Grasindo.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wibowo, I & Samsul Hadi (2009), “ *Merangkul Cina: Hubungan Indonesia-Cina Pasca Soeharto*” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zubair, Ahmad Charris (2003), ”Membangun Etika Kesadaran Multikulturalisme Di Indonesia.” Yogyakarta: Jurnal Filsafat, Agustus 2003, Jilid 34, Nomor 2.

Website

www.mahkamahkonstitusi.go.id

www.depdagri.go.id

www.kompolnas.go.id

www.globalfirepower.go.id

www.bkn.go.id

www.bps.go.id

www.kpu.go.id

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4. Fax.: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsq@bps.go.id

ISSN 2303-2448



9 772303 244801